

volume

2



Masyarakat Pribumi dan Hak Atas Kebenaran

Kumpulan Studi Kasus

COVER



Masyarakat Pribumi dan Hak atas Kebenaran: Volume 2

Panduan ini merupakan bagian dari seri AJAR tentang keadilan transisi di Australia dan Pasifik.

Edisi:

pertama, Maret 2022.

Tim Peneliti dan Penulis (Bahasa Inggris dan Indonesia):

Matheus Adadikam, Ani Sipa, Agusta Melani Sorabut, Solfinus Hendrik Horota, Nipson Murib, Derek Windessy, Agnes Deda, Matt Easton, Nick Dobrijevich dan Galuh Wandita.

Ilustrasi Sampul Depan:

Michael Yan Devis

Desain:

Wibi Arya

Foto dan Karya Seni: semua foto dan karya seni telah direproduksi dengan izin dari artis, fotografer, galeri, manajemen, atau pemilik hak cipta terkait. Foto dan karya seni tersebut tidak boleh direproduksi di luar publikasi ini tanpa lisensi atau izin sebelumnya.

Diterbitkan oleh Asia Justice and Rights (AJAR) dan Elsham Papua.

Penelitian ini dilaksanakan dengan dukungan Pemerintah Swiss Government. Pandangan yang diungkapkan disini tidak mewakili pandangan mereka.

Pengalaman Masyarakat Pribumi dengan Mekanisme Pengungkapan Kebenaran:
Volume 2 © Asia Justice and Rights 2022.

Konten dalam dokumen ini memiliki lisensi di bawah Creative Commons (atribusi, non-komersial, tanpa turunan 4.0 internasional)
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.asia-ajar.org. Materi yang tidak terkait dengan pemilik hak cipta selain Asia Justice and Rights tidak tunduk pada lisensi Creative Commons.

Cetakan Pertama, Maret 2022.

Siapa Kami?

ELSHAM Papua

ELSHAM Papua (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia) lahir karena terjadi banyaknya pelanggaran HAM yang berlangsung terus menerus di Papua. ELSHAM, lahir pada 5 Mei 1998, merupakan cikal bakal dari IJWGP (Irian Jaya Working Group for West Papua) yang telah bekerja sejak tahun 1990an. Secara formal didirikan oleh tiga pimpinan gereja (GKI di Tanah Papua, Keuskupan Jayapura dan Kingmi Papua) dan aktivis NGO di Papua. Sejak didirikan, ELSHAM telah melakukan berbagai kegiatan monitoring, investigasi dan advokasi berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. ELSHAM Papua bekerja atas prinsip-prinsip HAM dengan visi mewujudkan tatanan masyarakat Papua yang memiliki kesadaran kritis terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi di Tanah Papua.

AJAR

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah lembaga nirlaba yang bertujuan untuk memperkuat HAM dan bekerja untuk mengakhiri impunitas di kawasan Asia-Pasifik. AJAR memfasilitasi pembelajaran dan dialog tentang HAM, dokumentasi, resolusi konflik, dan proses-proses holistik untuk mendorong pemulihan, pemberdayaan, dan advokasi bagi para korban, keluarga, dan komunitas mereka. Kami percaya bahwa cara paling efektif untuk mencapai tujuan kami adalah dengan berinvestasi pada orang-orang yang akan terlibat dalam perjuangan menegakkan HAM dalam jangka panjang yang mencakup korban, penyintas dan aktivis HAM. Kerja kami saat ini berfokus pada negara-negara yang sedang mengalami transisi dari konteks pelanggaran HAM berat menuju demokrasi.

DAFTAR ISI

Prakata	02
Pendahuluan	06
Bab 1: Amerika Latin	12
Bab 2: Amerika Utara	32
Bab 3: Afrika	62
Bab 4: Asia Pasifik	72
Bab 5: Eropa	158
Bab 6: Pelajaran dan pertimbangan	168
Daftar Referensi berdasarkan Bab	180



PRAKATA



People hug in front of a mural honoring all the missing indigenous children during the first National Day for Truth and Reconciliation, on Parliament Hill in Ottawa on September 30, 2021.

(Photo by Lars Hagberg / AFP) (Photo by LARS HAGBERG/AFP via Getty Images)

Prakata

Selama bertahun-tahun, masyarakat pribumi atau masyarakat adat Papua telah berjuang bersama melawan ketidakadilan. Dibalik penyalahgunaan kekuasaan yang merusak keadilan, hukum, dan hak atas kebenaran ada hak-hak masyarakat pribumi atas tanah mereka yang terus terkikis. Ketika masyarakat pribumi kehilangan tanah mereka, apa yang terjadi pada mereka? Kemana mereka harus pergi?

Saya teringat kalimat yang disampaikan seorang perempuan pribumi di Unurum Guay yang bekerja bersama kami, saat itu dia sedang menceritakan kehilangan yang dia rasakan setelah tanah mereka berubah menjadi perkebunan kelapa sawit:

“...Setelah pohonnya ditebang, setelah kita berdiri di dalam, terasa seperti hati ini hancur. Terasa seperti badan ini, kepala ini digunduli botak, hancur semuanya. Hutan sudah tidak ada, semuanya hilang”¹

Dijanjikan melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (2001), tindakan-tindakan khusus untuk pengakuan identitas lewat simbol-simbol kultural dan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi terus ditolak beberapa tahun kemudian. Menghadapi intimidasi, kekerasan dan perampasan lahan, masyarakat pribumi Papua terus melanjutkan perjuangan mereka untuk Hak Asasi Manusia (HAM).

Merupakan suatu kebahagiaan ketika Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua bersama dengan Asia Justice and Rights (AJAR) mempublikasi buku yang berjudul “Masyarakat Pribumi dan Hak atas Kebenaran”, buku yang berangkat dari

1. AJAR & PWC, Burung Pun Tak Ada Lagi: Perempuan Adat Bertahan Menghadapi Kehilangan Hutan di Papua. AJAR, 2021. Pg. 67.

pengalaman panjang kerja-kerja bersama dalam bidang HAM dan solidaritas masyarakat pribumi untuk mendorong pemenuhan HAM di Indonesia, Asia dan tentu untuk dunia. Kerja-kerja bersama ELSHAM Papua dan AJAR dapat memberi dampak dalam upaya-upaya pemajuan HAM, terutama dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya dan hak politik di berbagai komunitas

Buku dengan judul “Masyarakat Pribumi dan Hak atas Kebenaran” ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para aktivis dan memperkaya pembaca dalam gerakan mendorong serta membangun kesadaran bersama akan pentingnya hak masyarakat pribumi, khususnya hak atas kebenaran. Harapannya, buku ini juga dapat memperkuat masyarakat pribumi untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak asasi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan serta pengaruh perubahan dunia yang terus terjadi.

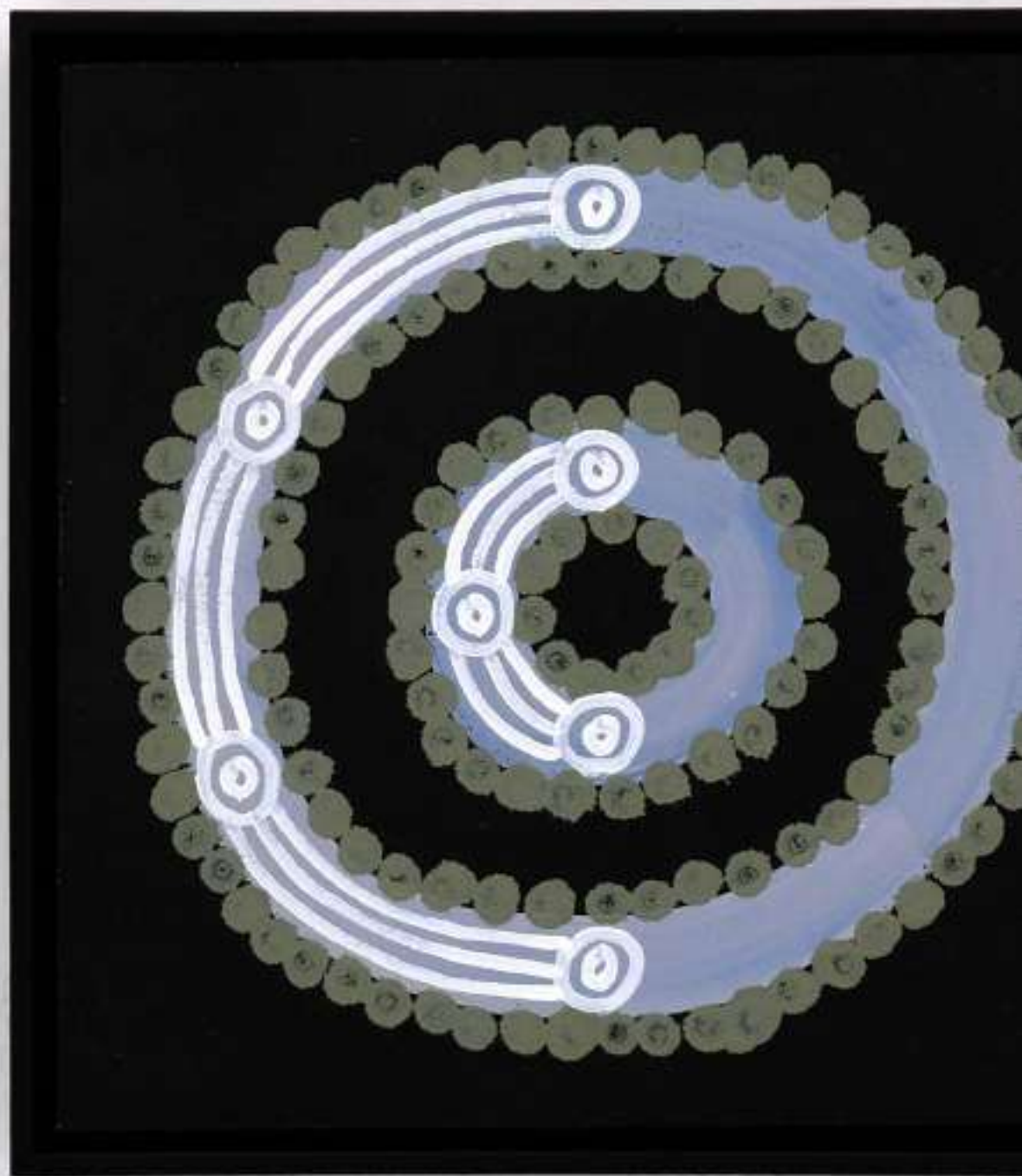
Studi kasus tentang masyarakat pribumi Papua dan beberapa pengalaman yang diangkat dari masyarakat pribumi di wilayah Pasifik/Melanesia maupun Amerika Latin tentu akan memperkaya para pembaca.

Terima kasih kepada AJAR dan semua yang telah turut terlibat dalam menghasilkan sebuah buku yang sangat berharga untuk perjuangan eksistensi masyarakat pribumi di Papua dan dimana saja.

Jayapura, Januari 2022.

ELSHAM Papua.

Pdt. Matheus Adadikam.STh.





PENDAHULUAN

*Otis Hope Carey, Jagun (Tanah Air), 2021, cat akrilik di atas
kanvas, 33 h x 33 w cm. Sydney, China Heights Gallery.*

Buku panduan ini menawarkan bantuan praktis kepada organisasi dan aktivis hak asasi manusia masyarakat pribumi dan non-pribumi, serta Pemerintah, yang sedang mempertimbangkan proses pengungkapan kebenaran. Dokumen tersebut menyaring pelajaran dari empat puluh tahun proses pengungkapan kebenaran di seluruh dunia, terutama yang melibatkan masyarakat pribumi. Panduan ini juga menguraikan prinsip-prinsip utama dari kerangka kerja internasional yang muncul tentang hak-hak masyarakat pribumi, yang mungkin kurang dikenal oleh organisasi non-pribumi.

Selama 40 tahun terakhir, praktek keadilan transisional telah muncul dan matang, sebagian besar dalam konteks pasca-konflik atau pasca-rejim otoriter. Selama periode yang sama ini, gerakan masyarakat pribumi global telah muncul, yang mengarah pada pengembangan kerangka hak asasi manusia internasional tentang hak-hak masyarakat pribumi yang didukung oleh hampir semua negara. Fertilisasi silang antara kedua gerakan itu terbatas, meskipun studi kasus mencakup contoh-contoh penting di mana mereka telah bersatu, serta tanda-tanda munculnya gelombang pengungkapan kebenaran yang dipimpin oleh para aktivis masyarakat pribumi. Panduan ini bertujuan untuk mendorong pembelajaran silang antara bidang keadilan transisional dan hak-hak masyarakat pribumi.

Volume kedua ini terdiri dari survei luas Komisi Kebenaran dan proses pengungkapan kebenaran lainnya yang telah melibatkan atau berfokus pada masyarakat pribumi. Studi kasus yang ringkas memberikan gambaran tentang komunitas yang terlibat; latar belakang proses; mandat; metodologi; temuan dan rekomendasi; menindaklanjuti; dan pelajaran yang didapat. Diorganisasikan berdasarkan wilayah, studi kasus ini memberikan contoh proses pengungkapan kebenaran yang berbeda, serta konteks yang sangat berbeda pula, termasuk:

- Komisi Kebenaran pasca-konflik yang memeriksa pelanggaran terhadap masyarakat pribumi di antara kelompok korban lainnya (Guatemala, Peru, Paraguay, Kolombia, Maroko, Kenya, Timor-Leste, Kepulauan Solomon, Filipina, Nepal).
- Penyelidikan resmi atas pelanggaran tematik tertentu terhadap masyarakat pribumi, baik melalui komisi yang dibentuk secara khusus atau lembaga hak asasi manusia nasional (Australia, Kanada, Malaysia, Indonesia).
- Komisi resmi yang memeriksa sifat dan dasar hubungan antara masyarakat pribumi dan non-pribumi di suatu negara (Kanada, Chili).
- Komisi Kebenaran untuk memeriksa pelanggaran terhadap masyarakat pribumi, termasuk sejumlah komisi dan proses saat ini dan yang direncanakan (Kanada, Amerika Serikat, Greenland, Norwegia, Swedia, Finlandia, Australia).
- Salah satu contoh komisi penyelidikan hak-hak masyarakat pribumi, yang beroperasi sejak 1975 (Selandia Baru).

- Penyelidikan yang dipimpin oleh masyarakat sipil, tanpa adanya tindakan negara (Papua/Indonesia,² Amerika Serikat, Australia).

Sebuah konferensi terobosan di New York pada tahun 2011 mengeksplorasi kerangka kerja lain untuk mempertimbangkan pengungkapan kebenaran masyarakat pribumi. Diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Keadilan Transisional, konferensi tersebut membahas tiga konteks sejarah-politik:

- Hak masyarakat pribumi dan pencarian kebenaran di wilayah kolonisasi awal (negara-negara Amerika Latin).
- Komisi Kebenaran sebagai pendekatan baru untuk mencari keadilan di masyarakat pemukim (Kanada dan Amerika Serikat).
- Hak masyarakat pribumi dan pencarian kebenaran dalam konteks pembangunan bangsa pascakolonial (Afrika dan Asia-Pasifik).

Sejak konferensi ini, masyarakat pribumi telah memulai gelombang baru pengungkapan kebenaran untuk memeriksa dan mengatur ulang dasar-dasar hubungan antara masyarakat pribumi dan negara-bangsa. Tiga Komisi Kebenaran yang terkait dengan orang Sámi di negara-negara Skandinavia Norwegia, Swedia dan Finlandia sedang berlangsung. Greenland menyelesaikan Komisi Rekonsiliasi yang berfokus pada masyarakat pribumi. Di Australia ada seruan untuk proses pengungkapan kebenaran nasional dan proses sub-nasional direncanakan. Di Amerika Serikat ada inisiatif baru di California, serta advokasi untuk Komisi Kebenaran nasional yang akan mencakup pengungkapan kebenaran pribumi. Lihat studi kasus di bawah ini.

Kerangka Studi Kasus

Setiap studi kasus dibuka dengan garis besar singkat masyarakat adat di wilayah dan negara tertentu; ringkasan hubungan historis mereka dengan masyarakat non-pribumi; dan tinjauan singkat tentang pendekatan negara-bangsa modern tentang hak-hak masyarakat pribumi. Meskipun catatan ini mencakup isu-isu yang kompleks, catatan tersebut singkat dan ditujukan terutama untuk membantu audiens non-pribumi dan mereka yang berasal dari berbagai wilayah dan negara.

Catatan pengantar ini mengidentifikasi isu-isu terkait kedaulatan dan penentuan nasib sendiri, yang mendukung identitas dan hak masyarakat pribumi. Ringkasan sejarah singkat ini penting karena proses pengungkapan kebenaran yang melibatkan masyarakat pribumi telah menunjukkan kesinambungan antara situasi

2. Dalam buku panduan ini kami menggunakan kata “Papua” untuk merujuk kepada baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.

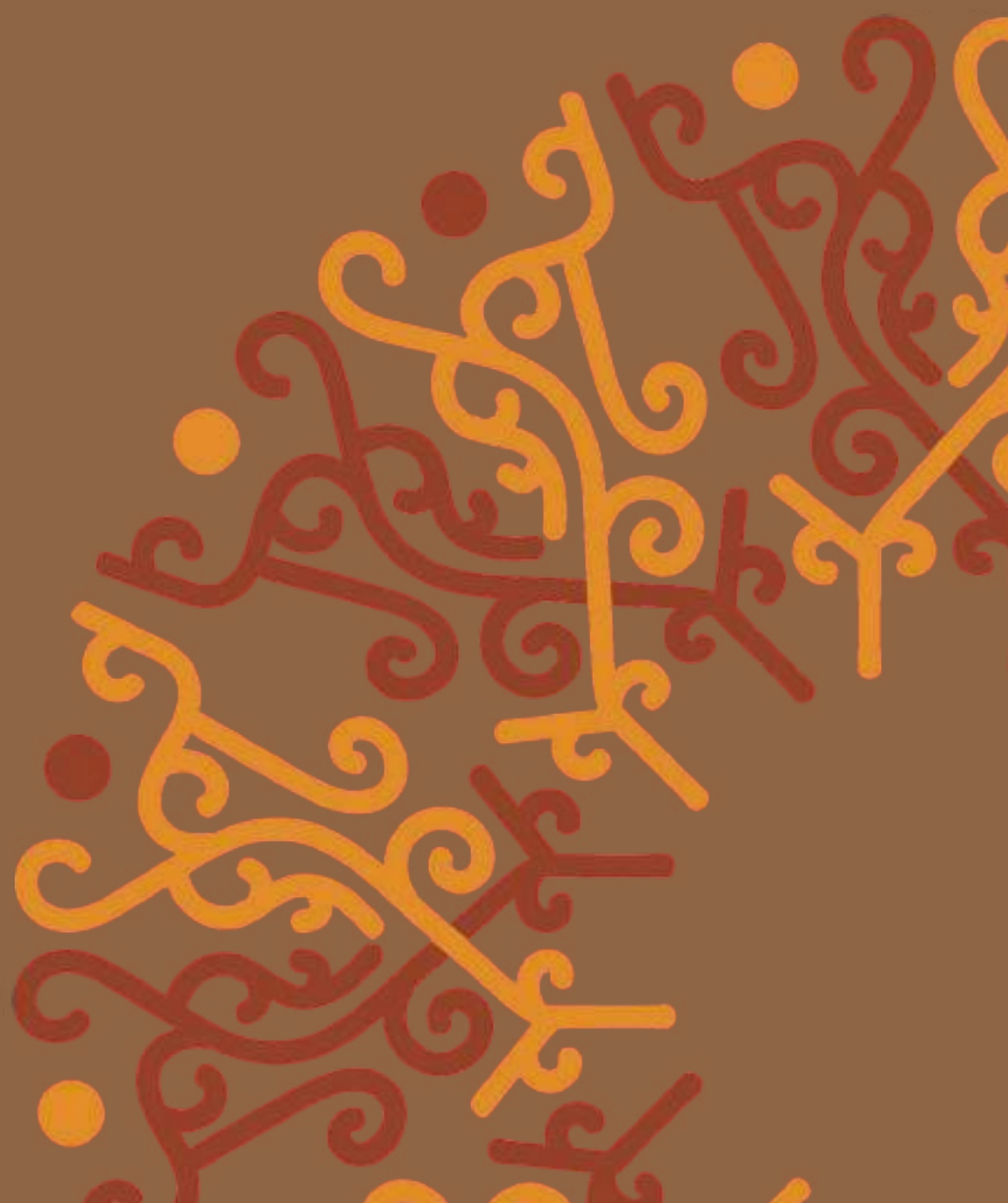
kontemporer dan kurangnya pengakuan hak secara historis.

Studi kasus juga menunjukkan potret perlawanan masyarakat pribumi, aktivisme dan pertumbuhan gerakan hak-hak modern.

Studi kasus diatur sebagai berikut:

- Latar belakang proses pengungkapan kebenaran
- Amanat
- Metodologi
- Temuan dan rekomendasi
- Tindak lanjut
- Pembelajaran dan dukungan

Setiap studi kasus menyertakan tautan ke bacaan latar belakang untuk memungkinkan analisis yang lebih dalam.







B A B

01

AMERIKA LATIN

*Seratus masyarakat pribumi Misak
berprotes sebagai bagian dari demonstrasi
Minda Nasional di Bogota, Colombia,
Oktober, 2020.*

*(Photo oleh Chepa Beltran/VWPics/
Universal Images Group, lewat Getty
Images).*

Amerika Latin adalah rumah bagi beberapa Komisi Kebenaran pertama, setelah berakhirnya konflik bersenjata internal dan rezim otoriter pada 1980-an. Sekitar sepertiga dari Komisi Kebenaran dunia telah berlangsung di Amerika Latin. Sementara mandat-mandat tidak hanya terfokus pada masyarakat pribumi, karena mandate-mandat tsb. membuat porsi yang signifikan dari korban-korban pelanggaran.

Amerika Latin dan Karibia adalah rumah bagi 54 juta masyarakat pribumi. Spanyol adalah penjajah utama wilayah yang luas ini, dengan Portugal menjajah Brasil dan berbagai kekuatan Eropa di wilayah lainnya. Penjelajah Eropa telah mencapai Amerika pada tahun 1492, dan Doktrin Kepausan tahun 1493 menetapkan Doktrin Penemuan. Sepanjang “Age of Discovery” atau “Jaman Penemuan” berikutnya, penjelajah Eropa menggunakan Doktrin ini untuk mengklaim tanah berdaulat mereka yang diduduki oleh penduduk non-Kristen.

Dari kontak, perang brutal penaklukan, perampasan, dan penyakit menghancurkan komunitas masyarakat pribumi di seluruh Amerika Selatan, Tengah dan Utara. Awal “penakluk” mencari emas dan kekayaan mineral ditambah dengan monarki Katolik yang bertujuan untuk menginjili penduduk non-Kristen. Di banyak negeri, penjajah menemukan komunitas masyarakat pribumi yang berpenduduk padat. Kemerdekaan dari Spanyol abad kesembilan belas membawa sedikit kelonggaran bagi masyarakat pribumi, karena konsolidasi negara-negara baru memperburuk perampasan. Menjelang akhir abad, lahan untuk pertanian dan peternakan diperluas melalui kampanye militer yang terus memusnahkan populasi masyarakat pribumi, terutama di Argentina dan Chili. Pada pertengahan abad kedua puluh, kolonisasi Amazon dan daerah terpencil lainnya menyebabkan siklus baru perampasan masyarakat pribumi.

Selama konflik abad kedua puluh di seluruh wilayah, masyarakat pribumi termasuk kelompok yang paling rentan. Industri obat-obatan terlarang di daerah pedesaan juga sangat berdampak pada masyarakat pribumi. Baru-baru ini, pertambangan besar dan industri ekstraktif lainnya serta proyek infrastruktur besar telah menyebabkan perampasan dan kerentanan masyarakat pribumi lebih lanjut.

Sejak tahun 1960-an, gerakan hak-hak masyarakat pribumi mulai berkembang di seluruh wilayah, semakin cepat di akhir abad kedua puluh. 1992 adalah tahun tonggak sejarah, ketika aktivis masyarakat pribumi di seluruh benua menolak rencana Pemerintah untuk merayakan HUT ke-500 tahun kolonialisme Eropa. Banyak masyarakat adat menggunakan istilah *Abya Yala* untuk menyebut Amerika Latin, istilah orang Guna atau Kuna yang tinggal di Panama dan Kolombia.

Sebagian besar negara Amerika Latin mengakui masyarakat pribumi dalam

konstitusi mereka, kecuali Chili, yang mulai menyusun konstitusi baru pada tahun 2021. Amerika Latin adalah kawasan dengan ratifikasi Konvensi ILO 169 paling banyak dan semua negara mendukung UNDRIP. Namun demikian, masyarakat pribumi tetap sangat terpinggirkan dan miskin di sebagian besar negara dan menghadapi hambatan besar untuk realisasi hak-hak mereka.

Melihat Komisi Kebenaran, dari tahun 1990-an hingga Komisi Kolombia saat ini, adalah mungkin untuk melacak perubahan dan peningkatan dalam cara komisi melibatkan masyarakat pribumi. Studi kasus berikut berfokus pada komisi yang mengkaji pengalaman masyarakat pribumi di antara kelompok korban konflik lainnya. Sementara negara-negara di kawasan Amerika Latin dapat dianggap sebagai “daerah kolonisasi awal”, semua kecuali satu dari komisi ini (Chili) meneliti konflik sejarah baru-baru ini tanpa mempertimbangkan secara rinci pengalaman panjang masyarakat pribumi sejak awal kolonisasi.

Komisi yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap masyarakat pribumi meliputi:

- Guatemala: Komisi Klarifikasi Sejarah (1997-1999)
- Chili: Komisi Kebenaran dan Kesepakatan Baru Sejarah (2000-2004)
- Peru: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2001-2003)
- Paraguay: Komisi Kebenaran dan Keadilan (2004-2008)
- Kolombia: Komisi Kebenaran, Koeksistensi, dan Tanpa-Pengulangan (sedang berlangsung 2018).

Guatemala

Komisi Klarifikasi Sejarah (1997-1999)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Dari tahun 1950-an hingga 1970-an, Pemerintah Guatemala secara signifikan menekan warganya selama konflik bersenjata internal yang berkepanjangan. Khususnya di awal 1980-an, kampanye tentara melawan pasukan oposisi memiliki konsekuensi serius bagi populasi Maya di pedalaman, termasuk ratusan pembantaian dan penghancuran pusat-pusat penduduk. Kesepakatan damai tahun 1996 antara Pemerintah dan gerilyawan membentuk Komisi Klarifikasi Sejarah (**the Commission for Historical Clarification/CHC**).

Dua puluh empat kelompok masyarakat pribumi membentuk lebih 43% dari populasi. Meskipun Guatemala telah meratifikasi Konvensi ILO 169 dan mengesahkan **UNDRIP**, masyarakat pribumi terus menghadapi tantangan besar dan diskriminasi.

Mandat

Masyarakat pribumi (dan pihak berkepentingan lainnya seperti kelompok korban) sebagian besar dikecualikan dari negosiasi yang mengarah pada kesepakatan damai, yang mengakibatkan mandat yang tidak jelas bagi Komisi. Mobilisasi intensif kemudian menghasilkan proses yang memang melibatkan korban masyarakat pribumi, dan salah satu dari tiga komisar berawal dari komunitas Maya.

Mandat Komisi adalah untuk “memeriksa pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan di antara rakyat Guatemala.” Meskipun mandat tersebut tidak menyebutkan masyarakat pribumi, Komisi menyelidiki kejahatan yang dilakukan terhadap korban masyarakat pribumi dan membahasnya secara terpisah dalam laporan akhirnya.

Metodologi dan pengoperasiannya

Investigasi difokuskan pada eksekusi sewenang-wenang, penghilangan paksa, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan sistemik. Dengan menggunakan laporan dan kerja lapangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi pergi ke daerah-daerah dengan populasi masyarakat pribumi yang besar di mana banyak pelanggaran hak kolektif telah terjadi. Ini menggunakan masyarakat pribumi setempat dan penerjemah untuk memfasilitasi dialog, terutama dengan perempuan, menggunakan pertanyaan terbuka untuk memungkinkan saksi menceritakan kisah mereka dengan menghormati alur kesaksian mereka.

Temuan dan rekomendasi

Komisi menemukan bahwa agen negara telah melakukan tindakan genosida terhadap orang-orang Maya di empat wilayah yang paling terkena dampak kekerasan. Ditemukan bahwa persepsi militer tentang Maya sebagai sekutu oposisi bersenjata, ditambah dengan rasisme yang mendalam, menciptakan kondisi yang mengarah pada pemusnahan seluruh komunitas masyarakat pribumi.

Komisi mengidentifikasi banyak pelanggaran terhadap masyarakat pribumi, termasuk beberapa dengan makna simbolis yang mendalam dan berdampak kolektif. Ini termasuk pembunuhan di luar hukum terhadap para tetua – penjaga pengetahuan tradisional – dan perusakan ladang jagung.

Komisi merekomendasikan reparasi, kegiatan untuk memperingati dan memulihkan situs Maya, dan pendanaan untuk penggalian. Ia juga merekomendasikan reformasi struktural polisi militer untuk memungkinkan partisipasi masyarakat pribumi dalam kepolisian melalui bilingualisme, penghapusan diskriminasi, pendidikan multikultural, penghormatan terhadap bentuk-bentuk tradisional resolusi konflik, dan langkah-langkah lainnya. Hal ini juga mengakui kebutuhan masyarakat pribumi untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan Pemerintah Daerah untuk mengakui hak mereka atas identitas etnis, menjamin perlindungan hak individu dan kolektif masyarakat pribumi, menghormati pluralitas budaya dan mempromosikan hubungan antar budaya.

Pembelajaran dan dukungan

- Penduduk asli, di antara yang paling terpengaruh oleh konflik, tidak terlibat dalam negosiasi damai yang mengarah pada Komisi Kebenaran. Masalah ini terulang dalam negosiasi Kolombia 2016 yang mengarah ke Komisi Kebenaran negara itu.
- Namun, aktivis dan organisasi masyarakat pribumi masih dapat mempengaruhi interpretasi mandat dan pelaksanaan pencarian kebenaran bahkan jika mereka bukan bagian dari negosiasi politik sebelumnya.
- Koalisi baru antara organisasi Pribumi adalah salah satu hasil paling signifikan dari CHC Guatemala.
- Bahkan komisi yang tidak hanya terfokus pada masyarakat pribumi dapat mempengaruhi pengakuan masyarakat pribumi dan pengalaman mereka. Hal ini juga dapat mempengaruhi perubahan sosial yang lebih luas, seperti yang ditunjukkan oleh ditemukannya genosida terhadap masyarakat pribumi Guatemala.

Chili

Komisi Kebenaran dan Kesepakatan Baru Sejarah (2001–2004)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Komisi Kebenaran Sejarah dan Kesepakatan Baru dibentuk pada tahun 2001 sebagai langkah awal pengakuan hak-hak masyarakat adat di Chili. Chili telah memiliki Komisi Kebenaran pasca-konflik setelah transisi dari kekuasaan militer: Komisi Nasional Kebenaran dan Rekonsiliasi (1990–1991).

Masyarakat pribumi membentuk sekitar 9% dari populasi Chili. Sembilan kelompok masyarakat pribumi yang diakui sebagian besar tinggal di daerah perkotaan, dengan sekitar seperempat di daerah pedesaan. Chili adalah satu-satunya negara di Amerika Latin yang konstitusinya, dibuat selama kediktatoran militer, tidak mengakui masyarakat pribumi. Chili telah meratifikasi Konvensi ILO 169 dan mengadopsi **UNDRIP**.

Mandat

Komisi dibentuk oleh undang-undang untuk memberi nasihat kepada Presiden Chili tentang perspektif masyarakat pribumi tentang peristiwa bersejarah di Chili dan untuk membuat rekomendasi guna membangun hubungan baru antara masyarakat pribumi dan masyarakat Chili lainnya.

Komisi itu unik di Amerika Latin, ditunjuk untuk mengakui pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ratusan ribu

orang masyarakat pribumi, sejak awal era kolonial dan pembentukan negara modern. Konflik ini belum termasuk dalam narasi dan sejarah nasional yang diakui.

Metodologi

Komisi diketuai oleh mantan Presiden Republik, Patricio Aylwin. Itu terdiri dari 25 komisar, termasuk sejumlah anggota masyarakat pribumi. Komisi mendasarkan penilaiannya pada penyelidikan sejarah daripada pernyataan korban. Ia bertemu dalam sesi pleno dan dalam kelompok kerja di bidang tematik dan kelompok etnis, dan berkonsultasi dengan para ahli masyarakat pribumi.

Temuan dan rekomendasi

Pemerintah menerbitkan laporan komisi pada 2008, setelah selesai dan tertunda selama empat tahun. Komisi membuat berbagai rekomendasi dengan konsekuensi hukum, sosial dan ekonomi. Komisi juga mengakui masyarakat pribumi sebagai keturunan masyarakat pertama di wilayah Chili saat ini, dan menyatakan bahwa bangsa Chili modern dibentuk untuk mengasimilasi penduduk pribumi, termasuk dengan menyangkal identitas mereka dan melalui kekerasan.

Komisi merekomendasikan negara tersebut untuk memanfaatkan kesempatan bersejarah dalam mengakui keragaman budaya Chili, dan identitas sejarah maupun budaya masyarakat adat sebagai masyarakat pribumi. Ini merekomendasikan pengakuan konstitusional atas hak kolektif masyarakat pribumi mengenai konsultasi dan partisipasi, tanah, sumber daya alam, pendidikan, budaya, adat istiadat dan hukum. Ini juga menyerukan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan pada masyarakat pribumi berkaitan dengan tanah, lingkungan dan budaya. Untuk memastikan partisipasi dan konsultasi masyarakat pribumi, Komisi juga merekomendasikan pembentukan dewan masyarakat pribumi, lembaga penelitian dan promosi masyarakat pribumi, dan dana untuk membiayai kebijakan masyarakat pribumi.

Pelajaran dan dukungan

- Komisi Peru memang memeriksa dan menyoroti tingkat kekerasan terhadap masyarakat pribumi selama konflik, termasuk temuan kemungkinan genosida.
- Namun, beberapa komunitas masyarakat pribumi merasa tidak siap untuk komisi, membatasi partisipasi efektif mereka. Lebih lanjut, proses tersebut tidak memberikan ruang yang cukup untuk dialog antarbudaya

- antara negara dan penduduk asli Amazon.
- Komisi tersebut telah dikritik karena tidak memeriksa sterilisasi paksa massal terhadap perempuan pribumi di bawah pemerintahan Fujimori. Karena program itu bukan bagian dari konflik bersenjata, maka program itu tidak berada di bawah mandat komisi.

Peru

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2001–2003)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Jatuhnya rezim otoriter yang dipimpin oleh Alberto Fujimori pada tahun 2000 memungkinkan untuk menentukan tanggung jawab atas pelanggaran selama dua dekade konflik bersenjata. Mulai tahun 1980, kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Shining Path telah terlibat dalam konflik bersenjata dengan Pemerintah, sehingga menimbulkan berbagai organisasi bersenjata ilegal dan pelanggaran HAM besar-besaran. Pada tahun 2001, setelah demokrasi dipulihkan, Pemerintah sementara mengeluarkan dekrit pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Sekitar 4 juta masyarakat pribumi dari 55 kelompok tinggal di Peru, dalam populasi yang lebih luas sekitar 28 juta. Peru meratifikasi Konvensi ILO 169 pada tahun 1994, dan telah mengesahkan **UNDRIP**.

Mandat

Komisi dibentuk untuk menetapkan proses, fakta dan tanggung jawab atas kekerasan teroris dan pelanggaran hak asasi manusia antara Mei 1980 dan November 2000, dan untuk mengusulkan inisiatif untuk memperkuat perdamaian dan harmoni. Komisi berfokus pada penghilangan paksa, eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, pengasingan dan pelanggaran HAM berat lainnya. Mandat tersebut secara eksplisit mencakup penyelidikan pelanggaran hak kolektif masyarakat Andes dan penduduk pribumi

negara tersebut.

Metodologi

Komisi menciptakan proses yang sangat partisipatif dan publik. Komisi melakukan perjalanan di seluruh negeri merekam 17.000 kesaksian individu dan mengadakan 27 dengar pendapat publik, yang pertama oleh Komisi Kebenaran Amerika Latin. Media massa meliput audiensi secara ekstensif, termasuk satu audiensi publik tematik nasional tentang pelanggaran terhadap masyarakat pribumi. Komisi melakukan studi kasus dan penelitian mendalam lainnya. Dari 12 Komisar, hanya dua yang berbicara bahasa Quechua, salah satu bahasa masyarakat pribumi Peru.

Temuan dan rekomendasi

Komisi menyimpulkan bahwa konflik bersenjata bukanlah konflik etnis semata. Namun, mereka menerima begitu banyak kesaksian tentang pelanggaran oleh kelompok pemberontak **Shining Path** atau Jalur Cemerlang terhadap orang-orang Asháninka Amazon sehingga memutuskan bahwa pemusnahan itu mungkin telah mencapai tingkat genosida.

Misalnya, 75% dari mereka yang meninggal dunia berbicara bahasa Quechua atau bahasa ibu lainnya sebagai bahasa ibu mereka. Tragedi itu dirasakan terutama oleh penduduk pedesaan yang tinggal di Andes Peru dan hutan hujan tropis, yang berbicara bahasa Quechua atau Asháninka. Komisi menemukan bahwa semua aktor dalam konflik memiliki pandangan rasis dan perasaan superioritas atas masyarakat adat. Institusi publik, masyarakat sipil, media massa dan sistem pendidikan semuanya berkontribusi pada kelangsungan kekerasan.

Komisi merekomendasikan: reparasi, terutama bagi para korban keturunan masyarakat pribumi yang miskin dan terpinggirkan; upaya untuk mencapai rekonsiliasi nasional, termasuk pengakuan dan penerimaan komposisi multi-etnis dan multibahasa negara; serta penuntutan para pelaku untuk memerangi impunitas.

Komisi menyatakan rekonsiliasi di Peru harus menjadi proses membangun kembali ikatan dasar di antara orang Peru. Prosesnya harus menghormati keragaman besar negara dan menjadi multi-etnis, pluralitas kultural, multibahasa dan multi-denominasi.

Pelajaran dan dukungan

- Komisi Peru memang memeriksa dan menyoroti tingkat kekerasan terhadap masyarakat pribumi selama konflik, termasuk temuan kemungkinan

- genosida.
- Namun, beberapa komunitas masyarakat pribumi merasa tidak siap untuk komisi, membatasi partisipasi efektif mereka. Lebih lanjut, proses tersebut tidak memberikan ruang yang cukup untuk dialog antarbudaya antara negara dan penduduk asli Amazon.
 - Komisi tersebut telah dikritik karena tidak memeriksa sterilisasi paksa massal terhadap perempuan pribumi di bawah pemerintahan Fujimori. Karena program itu bukan bagian dari konflik bersenjata, maka program itu tidak berada di bawah mandat komisi.

Paraguay

Komisi Kebenaran dan Keadilan (2004–2008)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Pada tahun 2003, menyusul perubahan dalam pemerintahan, Komisi Kebenaran dan Keadilan dibentuk oleh undang-undang untuk menyelidiki kekerasan dan kejahatan oleh pasukan keamanan Paraguay. Fokusnya adalah pada “Operasi Condor” transnasional selama tahun 1970-an dan 1980-an, di mana lawan politik terbunuh.

Masyarakat pribumi dari 19 kelompok membentuk sekitar 2% dari penduduk Paraguay. Paraguay telah meratifikasi Konvensi ILO 169 dan mengesahkan **UNDRIP**. Meskipun demikian, masyarakat pribumi mewakili kelompok termiskin, paling terpinggirkan di negara ini dan menghadapi tantangan besar hak asasi manusia.

Mandat

Komisi ini dirancang untuk lebih mempromosikan keadilan daripada rekonsiliasi. Ia diberi mandat untuk menyelidiki tindakan yang merupakan atau dapat merupakan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara atau agen paramilitari antara Mei 1954 dan 2003. Ini difokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia seperti penghilangan paksa, penyiksaan, dan pengasingan. Komisi ini juga melihat penahanan sewenang-wenang dan perampasan tanah, serta dampaknya terhadap penduduk tertentu, seperti perempuan, anak-anak, dan penduduk pribumi.

Metodologi

Ada sembilan komisar, termasuk hanya satu perempuan. Temuan didasarkan pada 2.050 kesaksian, 14.000 dokumen, dan delapan audiensi publik, termasuk satu tentang masyarakat pribumi.

Temuan dan rekomendasi

Komisi menemukan bahwa represi tidak terbatas pada kelompok tertentu tetapi ditujukan terhadap orang-orang dari latar belakang politik, sosial dan budaya yang beragam. Daerah pedesaan secara tidak proporsional terkena dampak kekerasan. Masyarakat pribumi, yang secara historis merupakan populasi paling terpinggirkan di negara itu, menjadi kelompok yang paling terpengaruh oleh kekerasan, termasuk pembantaian dan perdagangan anak-anak pribumi. Tanah adat secara sistematis disita dan secara tidak sah diberikan kepada sekutu rezim.

Rekomendasi luas Komisi termasuk: menyelidiki dan menganalisis kerusakan lingkungan di wilayah masyarakat pribumi; meminta Sekretariat Nasional Hak Asasi Manusia dan Institut Nasional untuk Masyarakat Pribumi menyelidiki pembantaian dan pelanggaran lainnya terhadap masyarakat pribumi dan mengusulkan reparasi; menetapkan ukuran memori kolektif; memastikan bahwa masyarakat pribumi berpartisipasi dalam mengusulkan dan melaksanakan inisiatif berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan; dan memproduksi teks dan mempromosikan program radio dalam bahasa Spanyol, Guaraní dan bahasa-bahasa pribumi lainnya. Juga sangat direkomendasikan bahwa laporan tentang tanah yang disita secara tidak sah disampaikan kepada Penasihat Jenderal Republik dan Jaksa Agung Negara, sebagai dasar untuk penyelidikan dan tindakan pencabutan hak, penilaian ulang, dan pemulihan properti dan tanah leluhur. Ia juga merekomendasikan pelatihan khusus tentang hak dan budaya masyarakat pribumi untuk pejabat publik dan organisasi masyarakat sipil.

Pelajaran dan dukungan

- Bagian Kebenaran, Keadilan dan Reparasi dari Kantor Ombudsman didirikan setelah Komisi untuk menerapkan langkah-langkah.
- Pemerintah memprakarsai program reparasi, yang dikelola oleh Komnas HAM.
- Kurangnya sumber daya merupakan masalah utama selama kerja Komisi, terutama pada hari-hari awal ketika parlemen Paraguay memotong anggarannya hingga setengahnya. Pada bulan Desember 2007, Pemerintah menghentikan pendanaan Komisi, menanggukkan penyelidikan selama beberapa bulan.

Kolombia

Komisi Kebenaran, Koeksistensi dan Tanpa-Pengulangan (2018–sekarang)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Ada 115 kelompok Pribumi yang diakui di Kolombia, dengan populasi gabungan sekitar 1,9 juta orang atau 4,4% dari populasi. Mereka telah tinggal di lereng dataran tinggi pegunungan Andes dan daerah pesisir Karibia setidaknya selama 12.000 tahun. Hampir sepertiga wilayah nasional dikategorikan sebagai Cagar Alam Asli, dan sebagian besar menghadapi konflik lingkungan yang serius dan perampasan tanah karena kegiatan ekstraktif. Organisasi Pribumi Nasional Kolombia memainkan peran penting sebagai mediasi antara negara dan masyarakat.

Spanyol menjajah daerah tersebut dari awal abad keenam belas, memulai proses kekerasan massal dan perampasan masyarakat pribumi. Pada tahun 1810, Kolombia mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol, sebuah proses yang diresmikan pada tahun 1819. Perbudakan penduduk asli dan orang-orang asal Afrika berlangsung hingga pertengahan 1800-an, dan bahkan setelah penghapusan praktek kerja paksa terus berlanjut.

Setelah penjajahan dan kemerdekaan dengan kekerasan awal, Kolombia memiliki sejarah konflik kekerasan. Dua perang saudara menelan ratusan ribu nyawa, antara tahun 1899 dan 1902 dan pada tahun 1940-an dan 50-an. Kelompok gerilya sayap kiri kemudian dibentuk untuk menantang negara, kelompok sayap kanan dibentuk untuk melawan mereka bersama dengan pasukan formal negara,

dan konflik kekerasan berlanjut hingga kesepakatan damai 2016. Terperangkap di antara pihak-pihak yang bertikai, masyarakat pedesaan menderita akibat konflik. Masyarakat pribumi dan komunitas petani pedesaan menderita secara tidak proporsional, dengan kekejaman massal yang dilakukan oleh semua pihak yang berkonflik. Lebih dari 50 tahun konflik bersenjata menewaskan sekitar 220.000 orang, dengan 25.000 lainnya hilang dan sekitar 6 juta orang mengungsi.

Aktivis masyarakat pribumi di Kolombia dan sebagian Amerika Latin memainkan peran penting dalam gerakan masyarakat pribumi global yang muncul pada 1980-an. Konstitusi 1991 mengakui hak-hak dasar masyarakat pribumi, pertama kali sifat multikultural dan multi-etnis negara diakui secara konstitusional, dan Kolombia meratifikasi Konvensi **ILO 169**. Prestasi ini membentuk platform untuk aktivisme Pribumi, termasuk aliansi dengan etnis minoritas seperti sebagai komunitas Afro-Kolombia. Pada tahun 2009, Kolombia mendukung Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi. Mahkamah Konstitusi telah menjadi salah satu aktor terpenting bagi hak-hak Masyarakat Adat dan telah memasukkan **UNDRIP** ke dalam yurisprudensinya.

Pada tahun 2016, kesepakatan perdamaian membentuk pendekatan yang komprehensif untuk keadilan transisional, termasuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, unit orang hilang, pengadilan khusus untuk menentukan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan bagi mantan gerilyawan dan tokoh masyarakat, dan reparasi bagi korban.

Mandat

Komisi ini dibentuk oleh undang-undang parlemen tahun 2017 sebagai badan negara di luar hukum dan independen. Mandatnya memiliki empat tujuan: untuk memperjelas dan menjelaskan kompleksitas konflik 50 tahun; untuk mendorong pengakuan terhadap korban dan tanggung jawab individu dan kolektif; untuk mendorong koeksistensi di wilayah; dan untuk meletakkan dasar-dasar untuk tidak terulangnya lagi. Mulai beroperasi pada akhir 2018, komisi ini memiliki mandat tiga tahun.

Kesebelas komisaris termasuk satu wanita Pribumi dan satu perempuan Afro-Kolombia. Namun, masyarakat pribumi dan Afro-Kolombia sebagian besar dikeluarkan dari proses empat tahun negosiasi perjanjian damai. Pada menit terakhir, keprihatinan mereka dimasukkan sebagai Bab Etnis, yang membutuhkan perspektif berbasis etnis dalam mengimplementasikan kesepakatan. Komunitas masyarakat pribumi mendukung kesepakatan tersebut, bahkan ketika referendum nasional untuk sementara membuat masa depan mereka dipertanyakan *future into question*.

Metodologi

Sejak awal, ada upaya internal untuk membuat komisi lebih relevan dan selaras dengan masyarakat pribumi dan etnis minoritas. Dipimpin oleh dua komisaris perempuan, satu masyarakat pribumi dan satu Afro-Kolombia, komisi bergulat dengan bagaimana mendasarkan pendekatannya pada keragaman. Ini meninjau upaya sebelumnya dari masyarakat adat, kulit hitam dan gipsi yang telah bekerja pada kebenaran dan akar konflik. Ini mempertimbangkan laporan dari Pejabat Kantor Ombudperson, Pengawas Keuangan Jenderal, dan Inspektur Jenderal tentang kelemahan lembaga negara mengenai masyarakat etnis, serta rekomendasi dari pelapor khusus PBB untuk masyarakat pribumi dan keturunan Afrika. Dari bahan-bahan ini, komisi merancang sebuah “metodologi etnis melawan rasisme, diskriminasi rasial, dan bentuk-bentuk intoleransi terkait lainnya.” Tujuannya adalah untuk memastikan staf komisi bekerja secara efektif dengan masyarakat pribumi dan etnis minoritas.

Secara eksternal, komisi memulai konsultasi dengan kelompok masyarakat adat dan etnis minoritas sebelum memulai pekerjaannya. Komisaris Pribumi Patricia Tobon Yagari mengatakan bahwa merupakan tantangan bagi semua di komisi untuk menerima bahwa langkah ini perlu. Dia juga mengatakan bahwa para pemimpin masyarakat pribumi memberi tahu komisi itu:



Anda tidak dapat mempelajari sejarah umat Islam dengan Alkitab Katolik karena itu tidak memotongnya. Dan Anda tidak dapat mempelajari sejarah orang Pribumi dengan pola pikir Barat karena tidak memotongnya. Inilah sebabnya mengapa kita membutuhkan sebuah bab etnis dengan jaminan bahwa kita dapat memasukkan kebenaran kita secara bebas, sehingga menjadi bagian dari narasi nasional dan tidak tunduk pada budaya mayoritas.³

Para pemimpin masyarakat pribumi ingin menceritakan kisah konflik berdasarkan pengalaman mereka. Mereka tidak melihatnya sebagai konflik yang dimulai pada 1950-an atau 60-an, tetapi sebagai konflik yang mencakup penaklukan Eropa, kolonisasi, dan periode republik penuh. Para pemimpin Afro-Kolombia berpendapat bahwa salah satu sumber konflik adalah rasisme.

Komisi mulai beroperasi pada November 2018 dengan audiensi publik. Pada 2019, ia menerima 10.755 kesaksian dari 5.988 wawancara individu dan kolektif, dengan

3. Patricia Tobon Yagari's full interview is available online via Justice Info: <https://www.justiceinfo.net/en/75613-patricia-tobon-yagari-legacy-colombias-trc-active-participation-ethnic-peoples.html>

20% dari masyarakat pribumi dan etnis. Acara publik menyediakan platform bagi korban untuk berbagi pengalaman dan pelaku kesempatan untuk mengakui tanggung jawab mereka.

Untuk mendengar dari masyarakat adat secara khusus, Komisi mengadakan enam dengar pendapat dan acara tentang topik #LaVerdadIndigena (Kebenaran Masyarakat Pribumi) di seluruh wilayah Karibia, Andes, Pasifik, Amazon, dan Orinoquian di Kolombia. Para pemimpin masyarakat pribumi dan masyarakat lainnya memandu komisi mengenai kasus mana yang ingin mereka fokuskan dalam dengar pendapat ini.

Komisi telah merencanakan untuk menghabiskan sebagian besar tahun 2020 di lapangan, berbicara dengan masyarakat, mengadakan ratusan acara lokal dan mengumpulkan informasi untuk laporan akhirnya. Pandemi membuat rencana ini berantakan ketika Kolombia memasuki salah satu penguncian terlama di dunia, dan satu komisararis meninggal karena Covid-19.

Pandemi memaksa Komisi untuk menemukan kembali operasinya pada tahun 2020. Komisi harus membatalkan atau menunda acara publik seperti dengar pendapat dan program ganti rugi yang ambisius untuk para korban masyarakat pribumi di Amazon. Sebaliknya, Komisi meluncurkan percakapan streaming langsung, podcast, acara TV, dan konser.

Laporan terakhir

Komisi akan menyelesaikan kegiatannya pada akhir tahun 2021 dan mengeluarkan laporan akhirnya. Ada diskusi tentang perpanjangan, terutama karena dampak Covid-19, tetapi opsi ini mungkin rumit secara politis. Laporan akhir akan mencakup bab tentang masyarakat pribumi dan etnis minoritas.

Pembelajaran dan dukungan

- Sementara partisipasi masyarakat pribumi dan etnis minoritas dalam proses perdamaian terlambat, dimasukkannya Bab Etnis dalam perjanjian perdamaian meletakkan dasar bagi Komisi dan lembaga keadilan transisi lainnya untuk terlibat dengan kelompok-kelompok ini.
- Sebelum memulai pekerjaannya, Komisi berkonsultasi dengan para pemimpin dan masyarakat pribumi lebih banyak daripada komisi kebenaran umum lainnya. Upaya ini mengarah pada metodologi khusus untuk terlibat dengan masyarakat adat dan etnis minoritas dan kemungkinan akan menghasilkan laporan yang mencerminkan perspektif mereka dengan cara yang tidak mungkin dilakukan.
- Kepemimpinan komisararis pribumi dan etnis minoritas sangat penting

untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal terhadap orientasi kelembagaan yang inovatif ini.

- Warisan komisi adalah partisipasi masyarakat pribumi dan etnis dalam penyusunan laporan, pemilihan kasus, metodologi, dan penguatan informasi.
- Pemahaman masyarakat adat dan etnis minoritas tentang akar konflik cenderung berbeda secara signifikan, dan dalam jangka waktu yang jauh lebih lama, dibandingkan pandangan lainnya. Audiensi di masyarakat adat menunjukkan bahwa konflik bersenjata internal merupakan kelanjutan dari rasisme, kekerasan dan pengabaian yang dialami oleh masyarakat adat sejak zaman kolonial. Sebuah bab dalam laporan akhir tentang pengungkapan kebenaran Pribumi dan etnis minoritas akan menjadi kontribusi penting bagi dialog nasional yang baru.
- Komisaris Adat Patricia Tobon Yagari menjelaskan peran Komisi dalam mengubah pemahaman negara tentang konflik dan masyarakat dalam sebuah wawancara: “Konflik bersenjata yang kami alami juga merupakan ekspresi dari konflik berbasis etnis dan identitas yang telah berlangsung lama, akibat hubungan kolonial yang belum diatasi negara selama pembangunan republik. Sulit bagi Kolombia untuk menerima akar konflik ini.... Ini akan membutuhkan upaya institusional dan kebijakan pendidikan — dari anak usia dini hingga universitas — bagi negara untuk menyadari sifat antar budayanya.... Sangat sulit untuk mengubah ini jika perspektif pengetahuan tidak berubah. Anda tidak dapat berhubungan dengan sesuatu yang tidak Anda ketahui. KKR memungkinkan kami untuk membuka refleksi ini.”
- Dalam audiensi publik, kelompok-kelompok masyarakat pribumi mempresentasikan rekomendasi tentang bagaimana memastikan kelangsungan hidup fisik dan budaya mereka, serta tanpa-pengulangan. Poin kuncinya adalah bahwa kurangnya kesadaran publik tentang masyarakat pribumi, tradisi dan praktik berkontribusi pada pengorbanan mereka dan ancaman kepunahan budaya. Masyarakat pribumi menyoroti perlunya sistem pendidikan antarbudaya untuk fokus pada kekayaan masyarakat pribumi.
- Terlepas dari kesepakatan perdamaian dan inisiatif keadilan transisional yang sedang berlangsung, perdamaian di Kolombia sangat rapuh dan masyarakat adat terus mengalami kekerasan tingkat tinggi, termasuk pembunuhan. Dalam empat tahun setelah perjanjian damai 2016, 250 pemimpin adat dibunuh, dan 2019 ditandai dengan gelombang kekerasan di seluruh wilayah leluhur. Ketika kelompok-kelompok bersenjata berusaha untuk menguasai wilayah mereka, masyarakat pribumi di masyarakat pedesaan masih tidak dapat hidup dengan aman meskipun tanah mereka diakui dalam titik reformasi pedesaan yang komprehensif dalam perjanjian damai.





BAB

12

AMERIKA UTARA

Selama Hari Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi yang pertama, orang berdiri dekat sepatu di Parliament Hill, Ottawa untuk menghormati semua anak pribumi yang masih hilang. September, 2021.

(Foto oleh Lars Hagberg/AFP lewat Getty Images).

Latar Belakang

Setidaknya selama 20.000 tahun, masyarakat adat telah tinggal di seluruh bagian benua Amerika Utara serta negara-negara kepulauan seperti Hawaii. Benua ini adalah rumah bagi beragam negara dan budaya masyarakat pribumi, dari orang Inuit di wilayah kutub utara yang membeku hingga berbagai peradaban pribumi di pesisir dan pegunungan Meksiko, serta ratusan negara yang sekarang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kontak Eropa dengan masyarakat pribumi di Amerika dimulai sekitar abad ke-11. Penjelajah Norse bergerak melintasi dataran tinggi utara Skandinavia ke Islandia dan Greenland, akhirnya tiba di pulau Newfoundland di Kanada saat ini. Namun, baru pada tahun 1492 era penjajahan Eropa dimulai, dengan kedatangan Christopher Columbus dan penaklukan “Dunia Baru”. Spanyol dan Portugal adalah kekuatan penjajah awal, dan dari abad keenam belas Inggris, Prancis, Spanyol dan Belanda berkompetisi di berbagai bagian Amerika Utara. Koloni awal difokuskan di pesisir timur benua.

Selama periode ini, tidak ada negara yang dominan dan semua koloni berjuang untuk bertahan hidup. Bangsa-bangsa pribumi berada dalam posisi kekuatan relatif dan menikmati tingkat koeksistensi. Untuk tujuan perdagangan dan militer, orang Eropa membuat aliansi dan perjanjian dengan bangsa-bangsa pribumi yang tidak melibatkan penyerahan tanah. Namun, penyakit yang dibawa oleh orang Eropa menyebabkan kehancuran di antara penduduk pribumi di tahun-tahun kontak pertama ini.

Inggris dan Prancis menjadi kekuatan dominan di tempat yang sekarang disebut Kanada dan Amerika Serikat, dan lebih dari 150 tahun berperang, dengan sekutu-sekutu pribumi di masing-masing pihak. Inggris muncul dominan, dan pada 1763 mengeluarkan proklamasi kerajaan dengan implikasi penting untuk tanah bangsa-bangsa pribumi. Proklamasi ini menyatakan bahwa hanya Kerajaan saja yang dapat membeli tanah dari bangsa-bangsa pribumi dan menetapkan perbatasan sebelah barat yang tegas, membatasi semua pemukiman di dalam perbatasan ini dan menggambarkan semua tanah di barat sebagai wilayah suku bangsa Indian. Proklamasi tersebut merupakan pengakuan publik pertama atas hak bangsa pribumi atas tanah dan hak miliknya.

Kanada

Latar belakang

Ada lebih dari 630 komunitas Bangsa Pertama di Kanada, yang mewakili lebih dari 50 Bangsa dan bahasa. Hampir 1,7 juta orang diidentifikasi sebagai Pribumi, populasi dengan pertumbuhan tercepat di negara ini. Mereka secara kolektif dikenal sebagai orang Aborigin.

Perdagangan bulu binatang ke Eropa membawa kontak dan hubungan perdagangan dengan suku-suku pribumi di beberapa bagian terpencil negara itu. Setelah Amerika Serikat memperoleh kemerdekaan, Inggris melanjutkan dominasinya di koloni-koloni sebelah utara. Lebih banyak pemukim tiba, menuntut lebih banyak tanah. Masyarakat pribumi terlantar, dan perjanjian menjadi sarana penyerahan tanah secara paksa.

Sejak tahun 1820-an, kebijakan asimilasi diterapkan, dengan tujuan “membudayakan” masyarakat pribumi. Pada tahun 1839 undang-undang membuat wali kerajaan dari semua tanah Cagar Alam Indian. Pada tahun 1867 Dominion Kanada didirikan oleh Inggris, menjadikan wilayah tersebut sebagai entitas yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam Kerajaan Inggris. Pemerintah nasional yang baru mempertahankan pendekatan terpusat dari Kerajaan Inggris terhadap masyarakat pribumi.

Ada perjanjian historis dengan First Nations dan perjanjian modern, juga dikenal sebagai perjanjian klaim tanah yang komprehensif. Perjanjian bersejarah adalah yang ditandatangani antara Kerajaan Inggris dan bangsa-bangsa pribumi, dan yang ditandatangani oleh Kanada yang merdeka antara tahun 1871 dan 1921. Selama periode kedua ini, serangkaian perjanjian penyerahan tanah menyisihkan tanah cadangan untuk bangsa-bangsa pribumi dan memberi mereka tunjangan hidup dan hak lanjutan untuk berburu dan memancing di

tanah kerajaan yang tidak berpenghuni dengan imbalan gelar Aborigin. Juga termasuk sekolah dan guru untuk mendidik anak-anak First Nations di tempat-tempat reservasi; peralatan pertanian, berburu dan memancing; serta elemen seremonial dan simbolik, seperti medali, bendera, maupun pakaian untuk kepala suku.

Bangsa-bangsa pribumi memasuki perjanjian ini karena mereka berusaha untuk bertahan hidup di dunia yang berubah dengan cepat. Situasi di Kanada bagian barat sangat kontras dengan dataran barat Amerika Serikat. Daripada kekerasan massal terhadap masyarakat adat, Kanada memasuki perjanjian penyerahan tanah antara 1871-1887. Sampai tahun 1921 Kanada mengadakan perjanjian lebih lanjut untuk mengamankan sumber daya alam di wilayah utara yang luas.

Pada tahun 1870-an Kanada mengesahkan Undang-Undang Suku Indian, yang secara efektif memposisikan Pemerintah nasional sebagai penjaga masyarakat pribumi. Status ini memfasilitasi tujuan asimilasi dan banyak praktek budaya dilarang. Pada tahun 1880-an, sekolah perumahan diperluas sebagai kendaraan utama untuk memajukan “peradaban” dan “asimilasi”. Dalam kemitraan dengan organisasi Kristen, jaringan lebih dari 130 sekolah didirikan di seluruh negeri. Lebih dari 150.000 anak bersekolah di sekolah ini sampai tahun 1990-an.

Perjuangan masyarakat pribumi, khususnya pada tahun 1970-an, mengubah pendekatan pemerintah nasional menjadi hak atas tanah dan pemerintahan sendiri. Tiga kasus pengadilan yang signifikan pada tahun 1970-an membawa pengakuan baru terhadap hak atas tanah bangsa-bangsa pribumi. Pemerintah nasional menetapkan kebijakan klaim yang komprehensif untuk negosiasi dengan bangsa-bangsa pribumi, yang kemudian menjadi era perjanjian baru. Antara 1974 dan 2015, ada 26 perjanjian yang diselesaikan.

Perjanjian-perjanjian ini diimplementasikan melalui undang-undang dan tetap menjadi cara paling komprehensif untuk menangani hak dan kepemilikan orang Aborigin. Mereka mencari kepastian tentang kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan tanah dan sumber daya untuk semua pihak. Hak-hak yang diatur dalam perjanjian mendapat perlindungan konstitusional.

Dari tahun 1990-an pemerintahan sendiri menjadi fokus baru untuk hubungan bangsa pribumi. Komisi Kerajaan 1991-96 adalah refleksi nasional utama pada hubungan antara masyarakat pribumi dan negara serta masyarakat non-pribumi Kanada. Proses pengungkapan kebenaran utama telah terjadi berkaitan dengan sistem sekolah perumahan dan pembunuhan perempuan maupun anak perempuan pribumi.

Pada tahun 2016, Kanada mengesahkan tanpa kualifikasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi, setelah menentanginya dalam voting tahun 2007. Kanada belum meratifikasi Konvensi ILO 169.

Komisi Kerajaan untuk Masyarakat Aborigin (1991–96)

Latar belakang

Komisi Kerajaan (RCAP) didirikan pada tahun 1991 untuk memeriksa kebijakan Pemerintah terhadap “ bangsa-bangsa bersejarah asli” tersebut. Langkah itu menyusul Krisis Oka, kebuntuan 78 hari antara pengunjuk rasa Mohawk dan pihak berwenang Kanada atas usulan pembangunan di tanah pemakaman. Itu juga merupakan saat ketika para pemimpin negara memperdebatkan tempat masyarakat pribumi dalam konstitusi, dan ketika laporan media mengungkap fakta kehidupan yang mengganggu bagi banyak masyarakat pribumi: tingkat kemiskinan yang tinggi, kesehatan yang buruk, kehancuran keluarga dan bunuh diri. Komisaris kemudian mencatat dalam laporan mereka bahwa ini juga merupakan saat harapan, ketika masyarakat pribumi membangun kembali ikatan kuno satu sama lain dan mencari budaya dan warisan mereka untuk akar identitas mereka.

Mandat

Penyelidikan didirikan sebagai Komisi Kerajaan, dengan mandat¹⁶ poin untuk memeriksa hubungan antara masyarakat pribumi dan non-pribumi sejak 500 tahun yang lalu. Para komisaris memfokuskan konsultasi mereka “pada satu pertanyaan utama: Apa dasar dari hubungan yang adil dan terhormat antara orang Aborigin dan non-Aborigin di Kanada?”

Pada tahun 2016, Kanada mengesahkan tanpa kualifikasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi, setelah menentanginya dalam suara asli tahun 2007. Kanada belum meratifikasi Konvensi ILO 169.

Metodologi

Di bawah pengawasan enam komisaris, empat di antaranya adalah orang pribumi, Komisi Kerajaan melakukan agenda penelitian yang luas. Menelusuri 500 tahun silam, RCAP melihat empat tahap:

- Waktu ketika orang Aborigin dan non-Aborigin tinggal di benua yang berbeda dan tidak mengenal satu pun.
- Setelah tahun-tahun kontak pertama, ketika hubungan perdamaian yang rapuh, persahabatan dan kesetaraan yang kasar diberi kekuatan hukum

dalam perjanjian.

- Saat kekuasaan condong ke arah orang dan pemerintah non-Aborigin, dan mereka memindahkan orang-orang Aborigin dari sebagian besar tanah mereka dan mengambil langkah untuk “membudayakan” mereka.
- Tahap saat ini, masa pemulihan bagi orang dan budaya Aborigin, untuk tinjauan kritis terhadap hubungan, dan negosiasi ulang serta pembaruan.

RCAP mengadakan dengar pendapat publik di seluruh negeri, menerima pengarah dan masukan dari individu dan kelompok, menugaskan penelitian, menerbitkan laporan dan mengadakan pertemuan meja bundar. Dalam 178 hari sidang, 2.067 orang hadir, dan lebih dari 76.000 halaman kesaksian dicatat. Laporan sementara diterbitkan pada Oktober 1992, Oktober 1993, November 1993 dan November 1994.

Menyadari kesulitan yang akan dialami beberapa kelompok Aborigin dalam berpartisipasi, Program Partisipasi Perantara membantu organisasi dalam meneliti dan mengartikulasikan posisi mereka. Komisi Kerajaan mengembangkan penelitian melalui konsultasi dengan 150 cendekiawan terkemuka, dengan lebih dari 350 penelitian ditugaskan pada empat tema utama: Pemerintahan, tanah dan ekonomi, masalah sosial dan budaya, dan wilayah Utara. Komisi termasuk penelitian ke dalam sistem sekolah pola asrama. Empat belas kelompok kebijakan dibentuk untuk mengembangkan laporan akhir dan rekomendasinya.

Temuan dan rekomendasi

RCAP menghasilkan laporan lima volume dengan temuan luas dan 440 rekomendasi. Para Komisaris membingkai rekomendasi mereka sebagai komitmen 20 tahun, menyerukan agenda komprehensif untuk perubahan sepenuhnya merestrukturisasi hubungan antara masyarakat pribumi dan non-pribumi di Kanada. Hal ini mengusulkan Proklamasi Kerajaan yang baru serta mengikat pemerintah pada seperangkat prinsip etika baru yang menghormati hubungan antara masyarakat pribumi dan negara. Hubungan baru ini akan menghormati asal-usul sejarah kebangsaan masyarakat pribumi, hak yang melekat pada penentuan nasib sendiri, dan budaya serta nilai-nilai pribumi. Menerapkan banyak dari rekomendasi akan membutuhkan perubahan konstitusional. Laporan tersebut juga menyoroti perlunya penyelidikan publik tentang tujuan sistem sekolah berasrama dan dampaknya terhadap komunitas Aborigin.

Menindaklanjuti

Pemerintah Federal tidak secara resmi menanggapi laporan tersebut sampai 7 Januari 1998. Meskipun Pemerintah Federal dan Provinsi mendukung inisiatif praktis untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi dalam laporan tersebut,

hanya ada sedikit minat Pemerintah dalam diskusi konstitusional tentang masalah yang mempengaruhi masyarakat pribumi.

Perdana Menteri mengeluarkan permintaan maaf resmi, menyatakan penyesalan atas kesalahan masa lalu dalam Pernyataan Rekonsiliasi. Dia berkomitmen \$350 juta untuk penyembuhan berbasis komunitas, terutama untuk korban pelecehan dari sistem sekolah pola berasrama.

Pembelajaran dan dukungan

- Penelitian, temuan, dan rekomendasi lebih luas jangkauannya daripada Komisi Federal Kanada lainnya. Namun, karena hambatan atau keengganan terhadap perubahan konstitusi, nilai jangka panjang laporan tersebut mungkin lebih sebagai upaya penelitian utama daripada rencana induk untuk perubahan.
- Seperti halnya proses pengungkapan kebenaran lainnya, implementasi rekomendasi bergantung pada kemauan politik, yang dapat berubah seiring dengan pergantian pemerintahan, sehingga tindak lanjut menjadi rentan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada (2008–2015)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada (TRC) dibentuk melalui penyelesaian hukum antara penyintas sekolah berasrama, Dewan Bangsa-Bangsa Pertama, perwakilan Inuit dan mereka yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjalankan sekolah: pemerintah federal dan badan-badan gereja. Ini adalah satu-satunya komisi kebenaran yang dibentuk sebagai bagian dari penyelesaian pengadilan.

Dari tahun 1893 hingga 1998 pemerintah federal dalam kemitraan dengan empat gereja besar di negara itu mengoperasikan lebih dari 130 Sekolah Perumahan India. Hukum Kanada mewajibkan kehadiran semua anak Aborigin dan menjadikan administrasi sekolah sebagai wali sah anak-anak. Ketika TRC dibentuk, antara 105.000 dan 150.000 orang Kanada yang masih hidup telah bersekolah di sekolah masyarakat sebagai anak-anak.

Aktivisme masyarakat adat melahirkan KKR. Komisi Kerajaan sebelumnya tentang Masyarakat Aborigin (1991–96) mempertimbangkan pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem sekolah tempat tinggal. Pada tahun 1993, Kepala Nasional Phil Fontaine muncul di berita nasional dan membuat pernyataan yang menceritakan pelecehan fisik dan seksual di sekolah yang dia hadiri sebagai seorang anak. Pernyataan itu membuka pintu air tindakan hukum, dengan ribuan kasus diajukan terhadap negara untuk pengalaman serupa pelecehan di sekolah. Masuknya kasus mendorong Pemerintah untuk menyetujui penyelesaian yang dinegosiasikan untuk gugatan **class action** besar-besaran yang diajukan terhadapnya. Penyelesaian ini membutuhkan program kompensasi yang ekstensif bagi para penyintas, permintaan maaf resmi dari Pemerintah dan KKR.

Mandat

Mandat KKR adalah untuk menginformasikan semua warga Kanada tentang apa yang terjadi di Sekolah Masyarakat Suku Indian, dan untuk mendokumentasikan kebenaran para korban yang selamat, keluarga, masyarakat, dan siapa pun yang terkena dampak secara pribadi. Mandat itu didefinisikan secara sempit di sekitar sekolah tempat tinggal dan tidak termasuk kerugian lain yang penting bagi masyarakat adat di Kanada, seperti perampasan tanah di masa lalu dan yang sedang berlangsung. Mandat itu tidak termasuk ribuan anak yang bersekolah di sekolah

asrama sebagai siswa harian. Mandat yang sempit itu karena akarnya dalam Perjanjian Penyelesaian Sekolah Masyarakat Suku Indian, daripada muncul dari konsultasi yang lebih luas dengan masyarakat pribumi.

Metodologi

KKR menghadapi tantangan kepemimpinan awal, dengan ketua dan dua komisaris lainnya mengundurkan diri setelah konflik. Setelah beroperasi penuh di bawah kepemimpinan baru, antara tahun 2008 dan 2014 KKR menerima lebih dari 6.500 kesaksian dari para penyintas di lingkungan publik dan pribadi, termasuk audiensi komunitas, lingkaran berbagi, dan Panel Berbagi Komisaris. KKR mengadakan tujuh dengar pendapat nasional, dengan audiens yang besar dan liputan media membantu mendidik masyarakat dan menghormati para penyintas dan keluarga mereka. Selama kesaksian publik, para korban yang selamat menceritakan pengalaman mereka mengalami pelecehan, kekerasan seksual dan kekurangan gizi, serta diperkosa bahasa dan budaya mereka.

Temuan dan rekomendasi

Pada bulan Juni 2015, KKR merilis Ringkasan Eksekutif dari temuannya bersama dengan 94 Panggilan untuk Bertindak kepada pemerintah, lembaga pendidikan dan agama, kelompok masyarakat sipil dan semua warga Kanada, untuk “memperbaiki warisan sekolah tempat tinggal dan memajukan proses rekonsiliasi Kanada. Komisi menyimpulkan pada bulan Desember 2015 dengan menerbitkan laporan akhir multi-volume yang menyimpulkan bahwa sistem sekolah sama dengan genosida budaya.

Menindaklanjuti

- Perdana Menteri Justin Trudeau menerima Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menyatakan komitmen Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi komisi.
- Pada tahun 2013, **Orange Shirt Day** atau Hari Kaos Oranye dibuat sebagai peringatan untuk mendidik orang dan mempromosikan kesadaran tentang sistem sekolah asrama suku Indian dan terhadap komunitas masyarakat pribumi yang terus berlanjut hingga hari ini.
- Pada tahun 2015, Pusat Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi didirikan di Universitas Manitoba di Winnipeg. Ini akan bekerja sebagai gudang permanen arsip KKR, dengan tujuan mengajar orang Kanada tentang sejarah ini.
- Pada tahun 2016, Kanada mengesahkan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi, meskipun undang-undang implementasi nasional belum disahkan.
- Pada tahun 2016 Penyelidikan Nasional untuk Perempuan dan Anak Perempuan Pribumi yang Hilang dan Terbunuh didirikan, sesuai dengan salah satu

- panggilan untuk Bertindak KKR (lihat di bawah).
- Pada tahun 2020, lima tahun setelah selesainya KKR, ada refleksi atas pelaksanaan rekomendasinya. Perdana Menteri Trudeau menyatakan bahwa 80% dari 94 Ajakan untuk Bertindak yang melibatkan Pemerintah Kanada telah selesai atau berjalan dengan baik, meskipun ia mengakui masih banyak pekerjaan yang tersisa. Namun, yang lain mengeluarkan kritik yang lebih tajam. Tiga mantan komisaris menyatakan pernyataan tentang implementasi **Call to Action** (Ajakan untuk Bertindak) yang “lambat dan tidak merata”. Mereka mendukung dua landasan penting untuk rekonsiliasi yang belum dilaksanakan: undang-undang federal untuk menerapkan deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi sebagai “kerangka rekonsiliasi” dan pembentukan Dewan Nasional untuk Rekonsiliasi.
 - Lembaga dan organisasi masyarakat pribumi menyatakan frustrasi dengan kurangnya implementasi di bidang-bidang utama. Lembaga First Nations, yang menerbitkan suatu kartu laporan tahunan tentang kemajuan, mencatat perlunya tindakan di bidang keadilan, kesetaraan dalam sistem hukum dan anak-anak yang hilang. Komisi Penyiaran Kanada memulai sebuah proyek untuk secara terbuka memantau implementasi Ajakan untuk Bertindak, yang disebut **Beyond 94** atau Setelah 94. Pada Juni 2021, dilaporkan bahwa 20 Panggilan belum dimulai, 38 sedang berlangsung dengan proyek yang diusulkan, 24 sedang berlangsung dengan proyek yang sedang berjalan, dan 12 sudah selesai.
 - Vatikan telah menyatakan bahwa Paus tidak akan secara resmi meminta maaf atas peran gereja Katolik dalam sistem sekolah berasrama (Call to Action #58), yang terus menjadi kontroversi di Kanada.
 - Pada tahun 2021, setelah ditemukannya jasad lebih dari dua ribu anak-anak pribumi di halaman sekolah tempat tinggal, parlemen dengan cepat menjadikan hari itu sebagai hari libur umum menurut undang-undang. Investigasi yang dipimpin oleh masyarakat pribumi terus mengungkapkan tempat pemakaman tersembunyi untuk anak-anak di lokasi bekas sekolah berasrama tsb.

Lessons and features

- Mandat tersebut dibangun secara sempit dengan tema khusus sekolah berasrama, karena muncul dari penyelesaian kasus pengadilan class action. Ini membatasi ruang lingkup penyelidikan.
- Butuh waktu bagi TRC untuk menyelesaikan pekerjaannya, setelah tahun pertama yang penuh gejolak.
- TRC Kanada telah mendapat kredit dengan mengilhami Komisi Kebenaran lebih lanjut tentang pelanggaran hak-hak masyarakat pribumi di wilayah Arktik, di tiga negara Skandinavia.
- Meskipun KKR bersifat profil tinggi, implementasi rekomendasinya tetap menjadi tantangan.

Penyelidikan Nasional terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Pribumi yang Hilang dan Dibunuh (2016–2019)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Perempuan pribumi menyumbang 16% dari semua perempuan yang terbunuh di Kanada antara tahun 1980 dan 2012 meskipun hanya 4% dari populasi perempuan. Dari 2001-2015, tingkat pembunuhan untuk perempuan pribumi hampir enam kali lebih tinggi daripada perempuan non-Pribumi.

Lebih dari satu dekade aktivis pribumi, termasuk investigasi yang dipimpin masyarakat, mendorong penyelidikan resmi atas krisis tersebut. Asosiasi Perempuan Asli Kanada melakukan penelitian dan investigasi selama periode lima tahun dari tahun 2005 dalam proyek **Sisters in Spirit** yang memicu kegiatan lebih lanjut.

Pada bulan Juni 2015, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memasukkan Ajakan Bertindak Nomor 41 untuk melakukan penyelidikan terhadap penduduk pribumi yang terbunuh dan hilang. Menyusul perubahan pemerintahan pada tahun 2015, Penyelidikan Nasional untuk Perempuan dan Anak Perempuan Pribumi yang Hilang dan Dibunuh (**MMIWG**) didirikan pada tahun berikutnya. Lima komisaris diangkat, empat di antaranya adalah masyarakat pribumi.

Mandat

Mandat badan tersebut adalah untuk menyelidiki penyebab mendasar dan masalah sistemik yang berkontribusi pada tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan masyarakat pribumi. Komisaris mengambil pendekatan yang luas, berusaha untuk mengatasi kekerasan seksual, pelecehan anak, kekerasan dalam rumah tangga, intimidasi dan pelecehan, bunuh diri, serta menyakiti diri sendiri. Mereka menjelaskan bahwa kekerasan ini saling berhubungan dan dapat memiliki efek yang sama-sama menghancurkan.

Penyelidikan Nasional didirikan di bawah Undang-Undang Penyelidikan Federal dan terikat pada undang-undang penyelidikan di 13 provinsi dan teritori. Status ini memberikan wewenang kepada Penyelidik untuk memaksa catatan dan saksi, termasuk polisi kota dan provinsi maupun dokumen mereka, sesuatu yang tidak dimiliki KKR. Badan Penyelidik Nasional diberi periode operasional dua tahun,

kemudian diperpanjang enam bulan. Sebaliknya, KKR dimandatkan selama lima tahun dan berjalan selama hampir enam tahun.

Metodologi

Badan Penyidik Nasional menghadapi tantangan dan kritik di tahun pertama, karena masalah logistik dan manajemen dilaporkan memperlambat permulaan pekerjaannya. Beberapa kritikus juga percaya bahwa Badan ini mengambil pendekatan yang terlalu legalistik, meniadakan beberapa orang yang selamat dan komunitas masyarakat pribumi. Seorang komisariss mengundurkan diri, dengan alasan sebagian dari kekhawatiran ini. Penjangkauan dan komunikasi publik juga bermasalah.

Komisaris berjanji untuk berbuat lebih banyak untuk terlibat dengan organisasi masyarakat pribumi dan kelompok akar rumput serta meningkatkan komunikasi publik. Mereka juga berpendapat bahwa proses mereka telah berkembang melalui mendengarkan dan belajar agar menjadi inklusif, sesuai budaya dan trauma yang disampaikan.

Badan Penyidik Nasional menetapkan prinsip-prinsip kunci untuk operasinya, termasuk:

- Membangun landasan bagi perempuan dan anak perempuan pribumi untuk merebut kembali kekuasaan dan tempat mereka.
- Mengakui keragaman masyarakat adat: “Masyarakat First Nations, Métis, dan Inuit masing-masing memiliki budaya, bahasa, dan cara hidup yang berbeda termasuk sistem politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua, atau pendekatan pan-pribumi.”
- Mengakarkan penelitian dalam metodologi masyarakat pribumi, diatur oleh hukum dan etika tradisional yang menegaskan perlawanan dan kebangkitan perempuan dan anak perempuan pribumi, termasuk orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai ‘Dua Roh, lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, questioning, interseks, dan aseksual’ (2SLGBTQQIA).
- Menghormati kebenaran melalui pendidikan publik. Penyelidikan mencatat bahwa perempuan dan anak perempuan pribumi telah direndahkan atau diabaikan secara publik dan persepsi umum telah dibentuk oleh stereotip kolonial yang berbahaya. Penyelidikan bertujuan untuk membuat dengar pendapat dan produk mereka dapat diakses oleh publik sebanyak mungkin.
- Menciptakan warisan yang hidup melalui peringatan dan ekspresi artistik. Prinsip ini sangat penting untuk pengajaran dan pembelajaran dari anak-anak dan remaja.

Penyelidikan mengadakan banyak pertemuan dan 24 dengar pendapat di seluruh Kanada, mengumpulkan pernyataan dari 750 orang, mengadakan kunjungan institusional di delapan lembaga pemasyarakatan, memimpin empat Dialog Terpandu, dan mengadakan delapan pertemuan validasi. Lebih dari 2.300 orang berpartisipasi dalam 15 audiensi komunitas masyarakat adat, termasuk 468 anggota keluarga dan korban kekerasan. Dalam lebih dari 140 sesi pribadi, anggota keluarga dan korban berbagi cerita. Lebih dari 80 saksi ahli, sesepuh dan Penjaga Pengetahuan Tradisional, pekerja garis depan dan para pejabat memberikan kesaksian dalam sembilan audiensi.

Temuan dan Rekomendasi

Pada Juni 2019, Badan Penyidik Nasional mempresentasikan laporan akhirnya, **Reclaiming Power and Place** atau Mengambil Kembali Kuasa dan Tempat, kepada Perdana Menteri. Laporan tersebut mengungkapkan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat pribumi yang terus-menerus dan disengaja sebagai akar penyebab di balik tingkat kekerasan yang mengejutkan terhadap perempuan, anak perempuan, dan 2SLGBTQQIA masyarakat pribumi.

Laporan tersebut berfokus pada bagaimana hak asasi manusia dan hak masyarakat pribumi, dan sejarah penjajahan dapat menginformasikan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan Inuit dan Metis orang 2SLGBTQQIA **First Nations**. Laporan tersebut mendokumentasikan bahwa sejarah penjajahan telah mengubah hubungan Inuit dan Metis dari **First Nations** dengan budaya dan identitas mereka melalui kebijakan yang ditargetkan untuk memutuskan hubungan budaya dan kekerabatan mereka. Serangan terhadap budaya ini adalah titik awal untuk bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan, anak perempuan serta masyarakat pribumi saat ini.

Laporan Akhir dua volume juga mendokumentasikan kesaksian dari anggota keluarga dan korban kekerasan tentang trauma multigenerasi dan marginalisasi dalam bentuk kemiskinan, perumahan yang tidak aman atau tunawisma, hambatan terhadap pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan dan dukungan budaya. Ahli dan Penjaga Pengetahuan Tradisional berbicara tentang kebijakan kolonial dan patriarki tertentu yang menggusur perempuan dari peran tradisional mereka dalam masyarakat dan pemerintahan serta mengurangi status mereka dalam masyarakat, membuat mereka rentan terhadap kekerasan.

Laporan tersebut menyerukan perubahan hukum dan sosial untuk menyelesaikan krisis yang telah menghancurkan masyarakat pribumi di seluruh negeri. Laporan ini menyampaikan 231 Panggilan individu untuk keadilan

diarahkan pada Pemerintah, lembaga, penyedia layanan sosial, industri dan semua orang Kanada. Mereka menguraikan tindakan transformatif di bidang kesehatan, keamanan, keadilan dan budaya, termasuk:

- Mendirikan Ombudsman Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Pribumi Nasional serta Pengadilan / Tribunal Nasional Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Pribumi.
- Mengembangkan dan menerapkan Rencana Aksi Nasional untuk memastikan akses yang adil terhadap pekerjaan, perumahan, pendidikan, keselamatan, dan perawatan kesehatan.
- Menyediakan dana jangka panjang untuk program pendidikan dan kampanye penyadaran untuk pencegahan dan perlawanan kekerasan yang meluas.
- Melarang penangkapan anak atas dasar kemiskinan dan bias budaya.

Rencana Tindak-lanjut

Untuk memetakan jalan ke depan dalam 231 Panggilan untuk Keadilan, pada tahun 2021 sebuah Rencana Aksi Nasional diluncurkan: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak Perempuan dan 2SLGBTQIA+ Masyarakat Pribumi. Langkah selanjutnya dari rencana tersebut termasuk layanan dan dukungan untuk para korban dan anggota keluarga, badan pengawas, dan kesadaran serta pelatihan publik, semuanya dengan keterlibatan berkelanjutan dari keluarga dan korban. Ini juga menguraikan langkah-langkah selanjutnya untuk data dan akuntabilitas. Asosiasi Perempuan Asli Kanada telah menerbitkan rencana aksinya sendiri, berjudul **Our Calls, Our Actions** atau Panggilan Kami, Aksi Kami.

Pembelajaran dan dukungan

- Penting pada awalnya untuk mencari kejelasan tentang ruang lingkup, fokus dan metodologi penyelidikan. Upaya ini biasanya membutuhkan waktu sebelum komisi mulai bekerja. Melakukan ini dengan benar di awal mencegah miskomunikasi dan kebingungan tentang proses pengungkapan kebenaran dan juga dapat membantu mengelola ekspektasi.
- Sumber daya yang signifikan harus diinvestasikan dalam penjangkauan masyarakat, konsultasi dan keterlibatan bahkan sebelum komisi memulai pekerjaannya. Mempertahankan kepercayaan ini di semua tahap masa hidup komisi sangat penting untuk pekerjaan komisi dan kemampuannya guna melibatkan komunitas dan individu dalam proses pengungkapan kebenaran.
- Kapasitas untuk menyesuaikan selama masa komisi bekerja adalah penting: untuk mencari dan bertindak berdasarkan umpan balik dari

- konstituen; untuk mengevaluasi proses dan dampaknya; dan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan.
- Ada nilai dalam mendorong ekspresi artistik sebagai salah satu metode untuk mengatakan dan berbagi kebenaran. Upaya ini dapat diperluas ke masyarakat di luar proses pengungkapan kebenaran formal. Praktek budaya dan ekspresi artistik adalah aset yang kuat untuk pengungkapan kebenaran yang autentik.

Amerika Serikat

Latar belakang

Jumlah penduduk pribumi di Amerika Serikat diperkirakan antara 2,5 dan 6 juta, atau sebanyak 1,7% dari populasi. Masyarakat pribumi mengidentifikasi diri mereka menurut negara mereka, sementara kantor-kantor Pemerintah, undang-undang dan wacana umum, termasuk oleh masyarakat pribumi, sering menggunakan istilah Indian Amerika dan Penduduk Asli Amerika.

Saat ini, status resmi sebagai Penduduk Asli Amerika atau Penduduk Asli Alaska umumnya diberikan kepada anggota “suku yang diakui secara federal”. Pada 2019, ada 574 entitas suku yang diakui secara resmi, sebagian besar dengan tanah air nasional yang diakui. Bangsa-bangsa Pribumi yang diakui secara federal dan inheren adalah bangsa-bangsa berdaulat, tetapi kedaulatan mereka secara hukum dibatasi sebagai lingkungan pemerintah federal. Ada juga suku yang diakui negara dan tidak diakui tetapi ini bukan negara asli secara resmi di mata pemerintah federal.

Sifat hubungan antara bangsa Pribumi dan penjajah Eropa dan keturunannya telah berubah dari waktu ke waktu. Selalu ada pengakuan oleh kekuatan asing dan penjajah atas kedaulatan bangsa-bangsa pribumi, suatu posisi yang diwarisi dan diadaptasi oleh Amerika Serikat.

Kemerdekaan Amerika

Periode awal penjajahan dan kebangkitan kekuatan Inggris di Amerika Utara dijelaskan di atas. Perang kemerdekaan Amerika antara tahun 1775 dan 1783 memiliki konsekuensi besar pada Bangsa-bangsa Pribumi. Terperangkap di tengah, negara-negara Pribumi mencoba menentukan tindakan terbaik untuk melindungi tanah dan cara hidup mereka. Awalnya netral,

sebagian besar tetapi tidak semua negara Pribumi akhirnya memihak Inggris.

Pada tahun 1776, dokumen pendirian Deklarasi Kemerdekaan merujuk dan merendahkan Bangsa-bangsa Pribumi, yang menyatakan bahwa “Penduduk Perbatasan kita, Orang-Orang Liar Indian yang tanpa ampun, yang dikenal sebagai Rule of Warfare, adalah Penghancuran yang tidak dapat dibedakan...”

Setelah negara Amerika Serikat memenangkan kemerdekaannya, Inggris mengalihkan klaimnya ke semua wilayah antara Atlantik dan Mississippi dan antara Great Lakes dan Florida pada konferensi Perdamaian Paris. Tidak ada penduduk asli Amerika dalam pembicaraan tersebut dan mereka tidak disebutkan dalam istilahnya. Berkenaan dengan tanah, istilah-istilah tersebut memperlakukan bangsa-bangsa pribumi secara setara baik mereka berpihak pada Inggris atau kaum revolusioner Amerika, meskipun bahasa Deklarasi Kemerdekaan memberikan indikasi kuat tentang pendekatan negara baru terhadap bangsa-bangsa pribumi.

Negara yang baru: dua kebijakan utama

Amerika Serikat mengklaim bahwa Doktrin Penemuan diterapkan ke negara baru, melegitimasi kedaulatannya atas tanah benua dengan klaim yang berasal dari “penemuan” Eropa sebelumnya. Klaim ini ditegaskan oleh pengadilan tertinggi di tanah yang, di bawah kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung Marshall, membuat keputusan tentang kedaulatan dan hak atas tanah pribumi antara tahun 1801 hingga 1835.

Pengadilan menemukan bahwa kedaulatan penduduk asli Amerika adalah “melekat” dan mengakui bangsa-bangsa pribumi, tetapi membatasi kedaulatan itu dengan mengkarakterisasi bangsa-bangsa pribumi bukan sebagai negara berdaulat yang independen tetapi sebagai “bangsa-bangsa yang bergantung pada domestik.” Pemerintah AS memiliki “tanggung jawab kepercayaan federal” atas bangsa-bangsa pribumi, yang berarti bahwa bangsa-bangsa pribumi seperti lingkungan Pemerintah nasional. Hak atas tanah adat hanya terbatas pada hak huni, sedangkan hak milik adalah negara.

Kongres memimpin dalam menetapkan kebijakan pemerintah tentang masyarakat pribumi, dengan dua pendekatan kebijakan menyeluruh: “akuisisi tanah adat” dan “membudayakan” masyarakat pribumi.

Ekspansi ke barat melalui abad kesembilan belas menyebabkan perang baru, kekerasan massal dan perampasan. Undang-Undang Penghapusan Indian tahun 1830 mengakibatkan puluhan ribu penduduk asli Amerika meninggal dalam pemindahan paksa seperti “Jejak Air Mata.” Perjanjian adalah salah satu aspek

dari strategi pengadaan tanah, terutama sampai tahun 1871. Beberapa dari 600 perjanjian mengakui kedaulatan pribumi sampai batas tertentu, tetapi sering kali ditandatangani secara paksa, diubah tanpa persetujuan penduduk asli, dan tidak dihormati oleh Pemerintah. Pada tahun 1893, Amerika Serikat secara paksa mencaplok pulau-pulau Hawaii tanpa persetujuan dari masyarakat pribumi.

Percepatan Asimilasi

Setelah perang abad kesembilan belas dan pembebasan tanah, kebijakan asimilasionis dipercepat. Pemindahan anak-anak dari keluarga dan budaya mereka untuk bersekolah di sekolah asrama digambarkan sebagai tujuan untuk “membunuh orang Indian, menyelamatkan orang itu.” Sekolah asrama ini terus beroperasi hingga tahun 1960-an, dan penyelidikan telah menemukan pelecehan fisik, seksual dan mental yang meluas.

Sejak tahun 1940-an, pemerintah federal memulai kebijakan penghentian, berusaha membongkar pengakuan pemerintah federal atas kedaulatan suku-suku. Pendanaan federal untuk pemerintah dan layanan suku juga berakhir, dan komunitas masyarakat pribumi diarusutamakan ke dalam layanan negara untuk memaksa asimilasi.

Penentuan nasib sendiri dan hubungan hari ini

Aktivisme Pribumi yang berkelanjutan dari tahun 1960-an hingga 1970-an mengarah pada pembentukan Dewan Perjanjian India Internasional, yang juga mencakup masyarakat adat dari Amerika Latin dan Pasifik. Aktivisme pribumi sepanjang tahun 1970-an bertujuan untuk memperluas penentuan nasib sendiri. Kebijakan federal saat ini mengakui bentuk kedaulatan Pribumi yang terbatas dan menekankan hubungan antar pemerintah antara Amerika Serikat dan suku-suku yang diakui secara federal. Kongres AS terus mengawasi hubungan ini, dan masing-masing negara bagian tidak memiliki otoritas atas pemerintah suku. Sebagian besar tanah penduduk asli Amerika dipercaya oleh Amerika Serikat, dan hukum federal masih mengatur hak ekonomi dan politik pemerintah suku. Sejak 1824 Biro Urusan Masyarakat Indian telah mengatur kebijakan pemerintah tentang masalah-masalah pribumi.

Sekitar 326 wilayah daratan India dikelola sebagai reservasi federal India. Beberapa adalah sisa-sisa pangkalan tanah asli suku. Lainnya diciptakan oleh pemerintah federal untuk memukimkan kembali orang-orang yang dipindahkan secara paksa dari tanah air mereka. Tidak setiap suku yang diakui secara federal memiliki reservasi. Reservasi Federal India umumnya dikecualikan dari yurisdiksi oleh negara bagian, termasuk perpajakan, kecuali jika Kongres secara khusus mengesahkan yurisdiksi tersebut.

Banyak masyarakat adat yang tinggal di luar daerah reservasi suku. Studi terbaru menunjukkan bahwa 54% penduduk asli Amerika tinggal di daerah pedesaan dan kota kecil di atau dekat reservasi, tetapi sebagian besar tinggal di daerah perkotaan.

Penduduk asli Amerika berbicara tentang menjadi warga negara dari tiga kedaulatan: suku mereka, Amerika Serikat, dan negara bagian tempat mereka tinggal.

Penduduk asli Amerika saat ini memiliki semua hak Konstitusional orang Amerika lainnya. Konstitusi mengacu pada masyarakat adat tiga kali tetapi tidak secara eksplisit mengakui kedaulatan mereka. Tidak ada badan perwakilan masyarakat adat yang dipilih, atau kursi yang dicadangkan di lembaga-lembaga politik nasional. Didirikan pada tahun 1944, Kongres Nasional Indian Amerika bertujuan untuk memberikan suara terpadu bagi masyarakat pribumi Amerika.

Pada tahun 2009, Presiden Obama mengeluarkan permintaan maaf kepada penduduk asli Amerika, “atas nama rakyat Amerika Serikat kepada semua penduduk asli atas banyak contoh kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian yang dilakukan terhadap penduduk asli oleh warga Amerika Serikat.” Namun, banyak masyarakat adat yang frustrasi dengan permintaan maaf tersebut. Itu dibuat sebagai resolusi yang ditambahkan ke RUU alokasi pertahanan, dan tidak pernah diumumkan, dipublikasikan atau dibacakan secara publik oleh Presiden, Gedung Putih atau Kongres.

Amerika Serikat mengumumkan pada tahun 2010 bahwa mereka akan mendukung UNDRIP sebagai pedoman moral setelah memberikan suara menentanginya pada tahun 2007. Amerika Serikat belum meratifikasi Konvensi ILO No. 169.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kesejahteraan Anak Negara Bagian Maine Wabanaki (2013–2015)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Orang-orang Wabanaki yang berbahasa Algonquian telah menduduki wilayah laut di Amerika Serikat (Maine, New Hampshire, Vermont dan Massachusetts) dan Kanada (Quebec, Newfoundland, Prince Edward Island, Nova-Scotia dan New Brunswick) selama ribuan tahun.

Dekade kebijakan asimilasi di abad ke-20 termasuk menempatkan paksa anak-anak pribumi ke sekolah-sekolah perumahan, di mana pelecehan secara teratur terjadi, serta dengan keluarga non-pribumi. Pada tahun 1970-an, penelitian menemukan 25–30% anak-anak pribumi diambil dari rumah mereka dan sebagian besar ditempatkan di luar keluarga dan komunitas mereka bahkan ketika kerabat yang sehat dan bersedia tersedia. Pada tahun 1978, pemerintah federal memberlakukan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Indian untuk melindungi “kepentingan terbaik Anak-anak India” sambil mempromosikan “stabilitas dan keamanan suku dan keluarga Indian”.

Namun, pada tahun 1999 tinjauan situasi di Maine menemukan masalah yang berkelanjutan. Sebuah kelompok kerja kolaboratif dibentuk oleh Wabanaki dan pekerja kesejahteraan anak non-Pribumi, saat ini dan mantan. Mereka menyimpulkan bahwa komisi kebenaran untuk memeriksa masalah akan menjadi langkah yang berguna untuk mengatasi beberapa akar permasalahan. Kelompok kerja bermitra dengan pemimpin negara bagian dan suku dan menyiapkan deklarasi niat dan draf mandat dan komisaris terpilih. Gubernur Maine dan lima Kepala Suku menandatangani otorisasi komisi kebenaran.

Mandat

Ini adalah komisi pertama yang berfokus pada kesejahteraan anak dari komunitas pribumi di Amerika Serikat. Itu juga unik karena didirikan secara kolaboratif oleh “kedua belah pihak yang berkonflik.” Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Negara Bagian Maine Wabanaki memiliki tujuh tujuan:

- Berikan “suara kepada orang-orang Wabanaki yang memiliki pengalaman dengan kesejahteraan anak negara bagian Maine.”

- Berikan suara kepada mereka yang bekerja di sistem kesejahteraan suku dan negara serta penyedia perawatan dan mereka yang terlibat dalam sistem hukum tentang pengalaman mereka dengan keluarga Wabanaki.
- Menetapkan sejarah yang lebih lengkap “orang-orang Wabanaki dalam sistem kesejahteraan anak negara bagian”.
- Berkolaborasi dengan Komunitas TRC dan Kelompok Pertemuan “untuk memberikan kesempatan penyembuhan dan pemahaman yang lebih dalam bagi orang-orang Wabanaki dan staf kesejahteraan anak negara bagian.”
- Meningkatkan praktik kesejahteraan anak dan menciptakan perubahan berkelanjutan yang berupaya menciptakan sistem kesejahteraan anak terbaik.
- Pastikan bahwa pelajaran yang dipetik oleh Komisi tidak dilupakan dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah suku dan negara bagian.
- Mempromosikan “rekonsiliasi individu, relasional, sistemik dan budaya.”

Metodologi

Komisi mulai beroperasi pada tahun 2013 dan stafnya melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengunjungi desa-desa dan komunitas Maine untuk mendengar kesaksian orang-orang. Mereka meninjau dokumen negara, mewawancarai lebih dari 150 orang, dan melakukan 13 kelompok fokus.

Fokus Komisi pada penyembuhan sangat khas. Elemen penting dari operasinya adalah kemitraan yang berkelanjutan dengan kelompok kerja kolaboratif dari pekerja kesejahteraan anak saat ini dan mantan pekerja kesejahteraan anak yang telah membantu mempersiapkan landasan bagi komisi kebenaran. Kelompok ini, sekarang disebut Maine-Wabanaki REACH, adalah mitra penting ketika Komisi menjangkau masyarakat pribumi dan non-pribumi yang dapat membantu menciptakan narasi yang akurat. Kelompok ini juga membantu Komisi menyajikan temuan awal dan rekomendasi di seluruh negara bagian.

Ketika Komisi menyerahkan laporan akhirnya, Komisi telah mengumpulkan pernyataan dari penduduk asli dan non-pribumi, termasuk tetua pribumi, orang tua asuh, mereka yang sebelumnya berada dalam sistem kesejahteraan anak, hakim, pengacara suku, mantan pekerja sosial, penyedia layanan, dan anak angkat. Anggota dari keempat grup Wabanaki — Maliseet, Micmac, Passamaquoddy, dan Penobscot — berpartisipasi.

Temuan dan rekomendasi

Komisi menemukan bahwa anak-anak Pribumi lima kali lebih mungkin untuk diasuh daripada anak-anak lain. Namun, tinjauan federal baru-baru ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah anak-anak Pribumi tidak memiliki

keturunan asli mereka yang diverifikasi, yang berarti tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak anak-anak Pribumi dalam sistem.

Komisi menemukan bahwa kondisi untuk anak-anak Pribumi dan fakta masuknya mereka ke dalam pengasuhan yang tidak proporsional dapat dilihat dalam konteks genosida budaya yang berkelanjutan, sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi Genosida yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.

Komisi menemukan bahwa penting untuk mempelajari dan menyebutkan akar masalah, kerugian masa lalu dan harapan untuk masa depan. Ditemukan bahwa tidak mengakui kerumitan ini tidak hanya merugikan keluarga Wabanaki dan orang lain yang terlibat dalam kesejahteraan anak, tetapi sampai taraf tertentu, semua yang menyebut Maine sebagai rumah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan anak Pribumi, Komisi menemukan bahwa Maine dan suku-suku harus terus menghadapi:

- Mendasari rasisme di antara lembaga-lembaga negara dan publik.
- Dampak trauma sejarah yang berkelanjutan, juga dikenal sebagai trauma antargenerasi, pada orang Wabanaki, yang memengaruhi kesejahteraan orang dan komunitas.
- Penafsiran yang berbeda tentang kedaulatan dan yurisdiksi suku yang membuat pertemuan antara suku dan pemerintah menjadi kontroversial.

Komisi membuat empat belas rekomendasi, termasuk:

- Menghormati kedaulatan dan berkomitmen untuk menegakkan protokol suku, negara bagian dan federal baik di tingkat negara bagian maupun lokal.
- Hormati “pilihan Wabanaki untuk mendukung penyembuhan sesuai keinginan suku dan rayakan kebangkitan budaya suku-suku dalam konfederasi Wabanaki sehingga individu dan komunitas dapat diperkuat.”
- Mengembangkan pelatihan hukum dan peradilan untuk Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk mengenali bias dan membangun kesadaran budaya dan akuntabilitas di semua tingkat kepemimpinan dengan cara yang membingkai sistem kesejahteraan anak dalam konteks historis.
- Ciptakan dukungan yang lebih baik untuk keluarga angkat atau asuh non-pribumi untuk memperkuat ikatan budaya anak-anak Wabanaki.
- Buat lebih banyak rumah asuh dan terapi Pribumi.
- Perbarui kelompok kerja kesejahteraan anak untuk membantu menciptakan dan menerapkan metode pelatihan baru.
- Dengan bantuan suku Wabanaki, buat kebijakan untuk memantau kepatuhan terhadap undang-undang kesejahteraan anak.

Menindaklanjuti

Sejak laporan akhir, pekerjaan terus berlanjut pada penyembuhan individu dan komunitas, serta mengubah sistem kesejahteraan anak.

Pembelajaran dan dukungan

- Pembentukan Komisi melalui kemitraan sejati antara negara-negara Pribumi dan Negara Bagian Maine merupakan hal yang inovatif dan mendasar bagi legitimasinya.
- Bahkan dengan legitimasi ini, komisar Pribumi sadar akan keragaman komunitas Pribumi dan fakta bahwa mereka hanya berasal dari salah satu komunitas tersebut.
- Kelompok kerja gabungan dari pekerja kesejahteraan anak saat ini dan mantan penduduk asli dan non-Pribumi memainkan peran mendasar dalam membentuk Komisi. Fakta bahwa Komisi terus bekerja sama dengan kelompok ini selama operasinya sangat memperkuat kapasitasnya untuk bekerja di masyarakat adat.
- Model pendanaan tidak biasa, didanai sepenuhnya oleh donor swasta dan yayasan nasional, dan memperkuat independensi Komisi.
- Komisi tidak berbicara dengan penduduk asli dalam bahasa Wabanaki apa pun. Meskipun penyedia diberi pilihan untuk berbicara dalam bahasa pribumi, hampir semua memilih bahasa Inggris.
- Komisi menyayangkan bahwa itu tidak berhubungan sebanyak yang dimaksudkan dengan pemuda dan guru Wabanaki.
- Komisi beroperasi di bawah batasan waktu yang sangat ketat dan pada kenyataannya usaha semacam ini membutuhkan waktu bertahun-tahun.
- Beberapa orang Wabanaki merasa bahwa komunitas mereka belum siap untuk membagikan kebenaran yang menyakitkan ini dan khawatir akan adanya dukungan untuk penyedia pernyataan.

Dewan Kebenaran & Penyembuhan California (2019–sekarang)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

California adalah negara bagian AS dengan populasi pribumi terbesar. Sensus 2019 menunjukkan hampir 300.000 penduduk asli yang tinggal di California, dari 109 suku yang diakui federal dan 40 lainnya dari kelompok yang mencari pengakuan.

Pada tahun 1850-an dengan perluasan Amerika Serikat ke arah barat, Gubernur California menyerukan perang pemusnahan terhadap masyarakat adat di Negara Bagian tersebut. Perang dan perampasan paksa dan relokasi mengakibatkan hilangnya banyak nyawa di antara negara-negara Pribumi. Perjanjian adalah salah satu alat pembebasan tanah oleh negara, tetapi ini sering bersifat memaksa dan tidak dihormati oleh negara. Kebijakan asimilasionis mengikuti kekerasan massal dan perampasan tanah sepanjang akhir abad ke-19 dan jauh ke dalam abad ke-20.

Pada Juni 2019, Gubernur California mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada masyarakat adat, menandatangani perintah eksekutif yang mengeluarkan permintaan maaf dan mengakui sejarah diskriminasi California terhadap orang India. Pada sebuah upacara dengan para pemimpin Pribumi, dia berkata, “Ini disebut genosida. Itulah yang terjadi: genosida. Tidak ada cara lain untuk menggambarkan ini. Dan begitulah yang perlu dijelaskan dalam buku-buku sejarah.... Jadi saya di sini untuk mengatakan yang berikut: Saya minta maaf atas nama negara bagian California.” Perintah eksekutif juga membentuk Dewan Kebenaran dan Penyembuhan California.

Dewan Kebenaran dan Penyembuhan California adalah entitas pertama dari jenisnya di Amerika Serikat yang ditugasi dengan usaha yang begitu luas dan berbasis luas. Dewan dipimpin dan diselenggarakan oleh Penasihat Suku Gubernur dan mencakup perwakilan dari suku, lembaga negara bagian dan lokal, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Mandat

Mandat Dewan menyatakan bahwa itu adalah untuk menjadi saksi, merekam, memeriksa dokumentasi yang ada, dan menerima narasi penduduk asli Amerika California mengenai hubungan historis antara Negara Bagian California dan

penduduk asli Amerika California, untuk memperjelas catatan sejarah dari hubungan dalam semangat kebenaran dan penyembuhan. Dewan wajib melaporkan setiap tahun dan menyerahkan laporan tertulis akhir dari temuan-temuan paling lambat 1 Januari 2025.

Temuan dan rekomendasi

Laporan akhir akan bertujuan untuk mencerminkan pemahaman holistik tentang hubungan historis antara penduduk asli Amerika California dan Negara Bagian. Ini akan dimodelkan pada dokumen kebenaran dan rekonsiliasi serupa yang memeriksa hubungan antara pemerintah dan penduduk asli, menggunakan kerangka hak asasi manusia internasional.

Gerakan nasional Kellogg Foundation untuk Kebenaran, Penyembuhan Rasial, dan Transformasi

Pada tahun 2016, Yayasan Kellogg mulai mengembangkan gerakan nasional untuk Kebenaran, Penyembuhan Rasial, dan Transformasi. Yayasan tersebut percaya bahwa sudah waktunya untuk proses yang komprehensif, nasional dan berbasis masyarakat untuk merencanakan dan membawa perubahan dan untuk mengatasi efek historis dan kontemporer dari rasisme.

Gerakan ini berusaha untuk menggali dan membuang kepercayaan yang dipegang teguh, seringkali tidak disadari, yang diciptakan oleh rasisme, terutama gagasan tentang hierarki nilai manusia. Yayasan Kellogg mengembangkan kerangka kerja dari lima bidang: Perubahan Narasi, Penyembuhan Rasial dan Membangun Hubungan, Pemisahan, Hukum dan Ekonomi.

Gerakan ini lebih berfokus pada transformasi daripada rekonsiliasi, berdasarkan analisis bahwa Amerika Serikat harus secara mendasar mengubah keyakinan dasarnya yang dibangun di atas hierarki rasial. Yayasan mendanai kolaborasi multi-sektor di tingkat masyarakat. Gerakan ini mencakup kemitraan dengan **First Alaskans Institute** serta sebuah universitas di Hawai'i, menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat adat.

Komisi Kebenaran, Penyembuhan Rasial dan Transformasi Nasional

Pada awal tahun 2021, undang-undang diperkenalkan kembali ke Kongres AS yang menyerukan pembentukan Komisi Kebenaran, Penyembuhan Rasial, dan Transformasi (TRHT) Amerika Serikat yang pertama. Komisi akan memeriksa efek perbudakan, rasisme institusional, dan diskriminasi terhadap orang kulit berwarna, dan dampak sejarah itu terhadap hukum dan kebijakan saat ini. RUU tersebut telah beredar selama empat tahun tetapi mendapatkan momentum baru sebagai tanggapan atas gerakan publik melawan kebrutalan polisi terhadap orang kulit hitam setelah pembunuhan George Floyd.

Anggota Kongres yang memperkenalkan RUU itu mengatakan komisi itu akan menjadi proses pendidikan publik yang besar, dan langkah pertama yang diperlukan untuk membasmi rasisme sistemik di institusi, membuat proposal untuk mengatasi dan memperbaiki kerusakan di masa lalu, dan membangun negara yang lebih adil. Sejumlah legislatif negara bagian telah secara resmi menyerukan pembentukan komisi nasional.

Sementara RUU tersebut berpusat pada rasisme anti-Kulit Hitam, ada ketentuan tentang pengalaman masyarakat adat, termasuk menolak kewarganegaraan di tanah mereka; kebijakan sekolah asrama federal yang dimaksudkan untuk menghapus budaya, tradisi, dan bahasa Pribumi; dan kebijakan pertanahan. RUU itu juga merujuk pencaplokan Hawai'i tanpa persetujuan penduduk pribumi. Kerangka RUU mencerminkan pelajaran dari pekerjaan Yayasan Kellogg, seperti yang terlihat pada kesamaan nama dan terutama fokus pada transformasi. Undang-undang terpisah tentang reparasi telah diperkenalkan, meskipun Komisi direncanakan sebagai pendahulu untuk reparasi yang adil.

Penyelenggara akar rumput sudah membantu legislator menyusun cetak biru untuk apa yang bisa dilakukan komisi, seperti membuat pelajaran sejarah untuk sistem pendidikan Amerika, membangun monumen untuk menghormati kelompok yang kurang terwakili, dan membangun ruang publik yang aman untuk dialog budaya.

Hawai'i

Latar belakang

Penduduk asli Hawai'i, yang dikenal sebagai Kānaka Maoli, tiba setidaknya 800 tahun yang lalu. Ketika navigator Inggris Kapten Cook tiba pada tahun 1788, dikatakan ada hingga satu juta orang Hawaii. Pada tahun 1810, Kerajaan Hawaii yang bersatu dibentuk, dan menerima pengakuan internasional. Pada tahun 1893, Amerika Serikat melakukan penggulingan bersenjata Kerajaan dan kemudian mencaploknya. Pada tahun 1946, setelah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hawai'i terdaftar sebagai Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri. Meskipun menjadi negara bagian pada tahun 1959, pada tahun 1998 sebuah laporan oleh Pelapor Khusus PBB tentang masyarakat adat merekomendasikan agar Hawai'i dimasukkan kembali sebagai wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri.

Penduduk asli Hawaii menjadi terorganisir dan aktif pada 1970-an dan 1980-an, dan terus menyerukan pengakuan kedaulatan mereka. Hari ini mereka mewakili 20% dari populasi. Namun, penduduk asli Hawaii adalah satu-satunya penduduk asli AS yang diakui secara federal yang dilarang menentukan nasib sendiri dan pemerintahan sendiri, masih tanpa hubungan antar pemerintah dengan Pemerintah Federal.

Inisiatif Sebelumnya

Inisiatif untuk secara resmi mengakui masa lalu termasuk 1978 perubahan Konstitusi Negara Hawai'i dan hukum yang berkaitan dengan komunitas Hawai'ian Adat. Pada tahun 1993 Kongres AS mengeluarkan undang-undang yang meminta maaf atas penggulingan tersebut dan mengakui bahwa penduduk asli Hawaii belum menyerahkan kedaulatan mereka. Pada tahun 2011, Negara Bagian Hawai'i secara resmi mengakui penduduk asli Hawaii sebagai "satu-satunya penduduk asli, penduduk asli Maoli Hawaii."

Pada tahun 2014, Departemen Dalam Negeri AS mengadakan audiensi di seluruh Hawai'i, memberikan ratusan masyarakat pribumi platform untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang pengakuan formal oleh pemerintah federal. Audiensi mengungkapkan bahwa sebagian besar menentang pengakuan, dengan alasan bahwa penggulingan AS atas Kerajaan Hawai'i melanggar hukum internasional dan karena itu Kerajaan tidak pernah berhenti untuk ada.

Pada tahun 2016, Departemen Dalam Negeri AS merilis prosedur untuk membuat kerangka kerja pengakuan formal jika penduduk pribumi Hawaii membentuk pemerintahan terpadu dan menyerukan hubungan antar pemerintah- pemerintah dengan AS.

Komisi Pita Biru yang Diusulkan

Pada awal 2020, menyusul protes besar-besaran terhadap proyek teleskop di tanah sakral, legislator negara bagian memperkenalkan undang-undang yang menyerukan “Komisi Pita Biru” untuk menangani warisan penggulingan Kerajaan Hawai’i tahun 1893 oleh Amerika Serikat, dan untuk mengembangkan proses rekonsiliasi partisipatif dan bermakna untuk membantu “membangun hubungan baru berdasarkan kepercayaan antara penduduk asli Hawaii, Negara Bagian Hawaii, dan Amerika Serikat.” Undang-undang tersebut menyebutkan perlunya mengatasi perselisihan tentang penggunaan dan pengelolaan lahan, serta lingkungan, ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan.

Tanggapannya beragam, termasuk kritik terhadap RUU tersebut karena gagal mengatasi masalah yang dihadapi Penduduk Asli Hawai, dan karena lebih banyak datang dari pemerintah negara bagian daripada para pemimpin dan komunitas Penduduk Asli. Komisi belum terbentuk. Hawai’i dan masyarakat adatnya juga disebutkan dalam rancangan undang-undang untuk Komisi Kebenaran, Penyembuhan Rasial dan Transformasi Nasional.





B A B

13

AFRIKA

*Keluarga korban berkumpul di luar
Kamp Militer Tazmamart di Maroko
dan menunjukkan potret anggota
keluarga yang ditangkap setelah
kudeta gagal pada tahun 1971-1972.
Oktober, 2000.*

*(Foto oleh Abdelhak Senna/AFP lewat
Getty Images).*

Maroko

Komisi Persamaan dan Rekonsiliasi (2004–5)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Setelah kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1956, otoritas Maroko secara sewenang-wenang menahan, menyiksa atau “menghilangkan” ribuan warga. Mereka juga menanggapi secara brutal protes dan pemogokan, menyebabkan puluhan kematian warga sipil. “Hukuman kolektif” adalah hal biasa selama beberapa dekade. Pada tahun 1975 perang pecah di Sahara Barat antara Maroko dan Front Polisario Sahrawi. Pertempuran itu ditandai dengan penghilangan, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap ribuan orang lainnya. Periode lebih dari 40 tahun penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia ini dikenal sebagai “Tahun-Tahun Kepemimpinan.”

The Amazigh adalah masyarakat pribumi di Maroko, mengidentifikasi diri dan diakui oleh Negara Maroko, dan juga di negara-negara Afrika Utara lainnya. Meskipun mereka membentuk sekitar 10,4 juta dari populasi 37 juta, narasi Arab-Islam yang dominan di negara itu gagal mengenali identitas budaya dan bahasa mereka. Karena kekhasan dan penolakan mereka untuk berasimilasi dengan budaya dan bahasa mayoritas, Amazigh telah mengalami marginalisasi politik dan degradasi budaya. Perampasan dan pencaplokan tanah, dan perusakan tanah dan saluran air oleh pertambangan juga merupakan masalah, pola yang berasal dari praktek era kolonial.

Pada tahun 1958, 1960, dan 1973, Pemerintah menanggapi pemberontakan oleh suku Amazigh dengan represi brutal, yang

mengakibatkan kematian banyak aktivis Amazigh dan penghancuran rumah mereka. Pada tahun 1994, tindakan keras Pemerintah terhadap demonstrasi menjadi bumerang, memperkuat dukungan di antara masyarakat sipil dan media untuk tuntutan Amazigh terhadap pengakuan hak budaya dan bahasa mereka. Pada tahun 2001, Raja Mohammed VI mendirikan Institut Kerajaan untuk Budaya Amazigh guna mempromosikan bahasa dan identitas kelompok tersebut.

Masyarakat sipil Maroko mengkampanyekan Komisi Kebenaran Independen sebagai bagian dari pendekatan komprehensif untuk berurusan dengan masa lalu. Komisi Kesetaraan dan Rekonsiliasi (**The Equity and Reconciliation Commission/ ERC**) didirikan bukan setelah perubahan pemerintahan, tetapi sebagai bagian dari proses perubahan bertahap yang dipimpin oleh raja yang ada. ERC adalah Komisi Kebenaran pertama di dunia Arab.

Mandat

Pada tahun 2004, **ERC** didirikan dengan dekrit kerajaan. Meskipun komisi tersebut tidak memiliki kata “kebenaran” dalam namanya, pembukaan dekrit tersebut menyebut badan baru tersebut sebagai “Komisi Kebenaran dan Kesetaraan.” Pemerintah juga memperjelas bahwa mereka melihat **ERC** sebagai langkah signifikan dalam transisi demokrasi Maroko.

Mandat **ERC** adalah untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia selama periode 43 tahun sejak kemerdekaan pada tahun 1956, dan untuk mengidentifikasi tanggung jawab institusional, tetapi bukan individu, atas kesalahan tersebut. Komisi ini ditugaskan untuk menegakkan kebenaran tentang pelanggaran masa lalu, memberikan reparasi kepada korban dan keluarga, dan merekomendasikan langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran di masa depan. **ERC** tidak secara khusus berfokus pada masyarakat adat meskipun menganggap pelanggaran terhadap mereka dalam mandat yang lebih luas.

Metodologi

Ke-17 komisaris **ERC** hanya termasuk satu perempuan. Banyak komisioner adalah mantan tahanan politik. **ERC** membagi pekerjaannya menjadi investigasi, reparasi dan penelitian. Penyelidikan termasuk dengar pendapat publik dan swasta, penelitian arsip, dan wawancara dengan pejabat pemerintah dulu dan sekarang. Untuk menjangkau khalayak sebanyak mungkin, serangkaian seminar bertema juga disiarkan di TV Pemerintah.

Temuan dan rekomendasi

ERC gagal memenuhi harapan banyak orang Amazigh. Banyak yang berpendapat

bahwa dengan mempertimbangkan pengalaman masyarakat pribumi dalam kerangka pelanggaran hak asasi manusia secara umum, mereka terpinggirkan.

ERC memang menentukan bahwa represi dan penggunaan kekuatan yang berlebihan terjadi selama puncak perjuangan hak-hak Amazigh pada 1990-an. Korban diidentifikasi dan direkomendasikan untuk kompensasi oleh **ERC**. Komisi juga merekomendasikan adopsi proyek pengembangan sosial-ekonomi dan budaya yang disesuaikan dengan sejumlah kota, termasuk wilayah yang didominasi Amazigh seperti Rif dan Atlas tengah. **ERC** membuat rekomendasi yang luas tentang reparasi bagi korban individu dan kelompok korban.

Pembelajaran dan dukungan

- ERC dianggap sebagai langkah penting sebagai komisi kebenaran pertama di dunia Arab.
- ERC juga tidak biasa pada saat itu karena didirikan oleh seorang raja yang masih berkuasa yang terus berkuasa - itu menjadi bagian dari transisi yang bertahap dan terkelola.
- Namun, fokus pada pelanggaran terhadap semua yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah membatasi kapasitas ERC untuk memeriksa akar spesifik pelanggaran terhadap masyarakat adat. Keterbatasan ini menjadi pertimbangan penting bagi komisi kebenaran yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap masyarakat adat di antara korban lainnya.

Kenya

Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi (2008–2013)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Sejarah Kenya sejak kemerdekaan dari Inggris, pada tahun 1963, telah ditandai dengan konflik etnis, pemerintahan semi-represif, marginalisasi dan kekerasan politik. Kekerasan pasca pemilu tahun 2007 menyebabkan sekitar 1.500 kematian, 3.000 perkosaan, dan 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kedua pihak menandatangani Kesepakatan Nasional pada tahun 2008, setelah mediasi oleh Panel Uni Afrika dari Tokoh-tokoh Afrika Terkemuka yang diketuai oleh Kofi Annan. Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi/ **The Truth, Justice and Reconciliation Commission (TJRC)** merupakan bagian dari komponen akuntabilitas accord/ perjanjian.

Ada lebih dari 25 komunitas Pribumi di Kenya, dan hubungan di antara komunitas suku lainnya sangat kompleks. Orang-orang yang mengidentifikasi dengan gerakan Pribumi terutama penggembala nomaden dan pemburu-pengumpul, serta beberapa desa nelayan dan komunitas pertanian kecil.

Komunitas adat mengalami pelanggaran hak asasi manusia selama era kolonial Inggris (1895–1962), termasuk pemindahan dari tanah mereka. Banyak praktik era kolonial berlanjut di bawah negara-bangsa modern, termasuk pelanggaran hak atas tanah terkait dengan praktik pertambangan dan penebangan.

Konstitusi 2010 berisi Bill of Rights progresif yang menjadikan hukum internasional sebagai komponen kunci dari hukum Kenya dan menjamin perlindungan kelompok minoritas dan terpinggirkan. Bill of Rights tidak secara eksplisit merujuk pada masyarakat adat, meskipun definisi komunitas terpinggirkan mencakup mereka. Kenya tidak memiliki undang-undang khusus tentang masyarakat adat dan belum mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, setelah abstain selama pemungutan suara awal. Ia belum meratifikasi Konvensi ILO 169.

Mandat

Sebuah Undang-Undang Parlemen membentuk **TJRC** untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia berat dan ketidakadilan sejarah lainnya di Kenya antara 12 Desember 1963 dan 28 Februari 2008. Komisi bertujuan untuk berkontribusi pada persatuan nasional, rekonsiliasi dan penyembuhan.

TJRC memiliki wewenang untuk menyelidiki, menganalisis, dan melaporkan pelanggaran berat hak asasi manusia, kejahatan ekonomi, pengambilalihan tanah publik secara ilegal, marginalisasi masyarakat, kekerasan etnis, dan konteks di mana kejahatan itu terjadi. Kekuasaan **TJRC** untuk menyelidiki kejahatan ekonomi dan tanah publik termasuk menyelidiki anggapan marginalisasi ekonomi masyarakat.

Komisi juga bertugas mendidik masyarakat tentang pekerjaannya. Ia dapat merekomendasikan penuntutan, reparasi, perubahan kelembagaan, dan amnesti sebagai ganti kebenaran bagi para pelaku yang tidak melakukan pelanggaran HAM berat. Mandat operasional dua tahun **TJRC** diperpanjang tiga kali.

Metodologi

Sebagai bagian dari mandat Komisi untuk melihat ketidakadilan historis dan pelanggaran berat hak asasi manusia, Komisi mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kelompok minoritas dan masyarakat adat berpartisipasi dalam prosesnya dan bahwa situasi mereka dipertimbangkan.

TJRC mengambil kesaksian individu dari para korban pelanggaran hak asasi manusia dan mengadakan dengar pendapat publik. Komisi menerima pernyataan dari masing-masing anggota kelompok minoritas dan pribumi, mendengar kesaksian mereka selama dengar pendapat publik, dan juga menerima masukan yang disiapkan bersama oleh anggota kelompok-kelompok ini. Komisi juga mendengar bukti dari para ahli tentang minoritas dan masyarakat adat selama Dengar Pendapat Tematik untuk melihat lebih dalam pola, penyebab dan akibat dari pelanggaran terhadap kelompok-kelompok ini. Komisi juga melakukan

tinjauan komprehensif atas makalah dan laporan akademis oleh organisasi-organisasi, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang hak-hak Pribumi dan minoritas secara global dan di Kenya.

Kredibilitas **TJRC** dipengaruhi oleh kontroversi seputar Ketuanya, yang dirinya terkait dengan pelanggaran HAM berat. Ada panggilan darinya untuk mundur dari Uskup Agung Desmond Tutu, permintaan perintah pengadilan yang mencegahnya memasuki kantor komisi, dan tuduhan serta tuduhan balasan hingga dia mengundurkan diri pada 2010.

Temuan dan rekomendasi

Komisi menemukan di samping fokus pada etnisitas dalam setiap upaya untuk memahami ketidakadilan historis di Kenya, penting untuk memahami pelanggaran yang diderita oleh anggota kelompok minoritas dan penduduk pribumi pada khususnya.

TJRC mendedikasikan satu bab dari Laporannya (Bab Tiga, Volume IIC) untuk “Kelompok Minoritas, Masyarakat Adat dan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia”/ **“Minority Groups, Indigenous People and Gross Violation of Human Rights”**. Laporan menganalisis konteks masyarakat adat di Kenya berdasarkan hukum dan standar internasional, lembaga-lembaga Afrika seperti Komisi Afrika, dan kerangka hukum Kenya, termasuk Konstitusi 2010.

TJRC menemukan bahwa diskriminasi sistematis terhadap minoritas dan masyarakat adat telah mengambil bentuk yang bervariasi di Kenya. Namun, tiga bentuk menonjol: kurangnya pengakuan formal, pelanggaran hak yang berkaitan dengan kewarganegaraan, dan penggambaran publik yang negatif.

TJRC menemukan berbagai pelanggaran berat terhadap masyarakat adat, termasuk kekerasan langsung, termasuk:

- Hukuman kolektif: Hukuman kolektif oleh negara terjadi terutama di Kenya Utara dan dalam konteks operasi keamanan atau perlucutan senjata. Praktik tersebut termasuk pembantaian warga sipil. Banyak pelanggaran HAM berat lainnya yang terjadi selama operasi keamanan, termasuk kekerasan seksual, penyiksaan dan pengingkaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi.
- Pelanggaran hak atas tanah: Penggembala asli dan pemburu-pengumpul di Kenya telah terkena dampak paling parah oleh hilangnya tanah, fragmentasi tanah dan penggusuran paksa. Hasilnya adalah peningkatan marginalisasi, pendalaman kemiskinan, dan siklus konflik dengan komunitas tetangga dan negara.

- TJRC mendokumentasikan dampak pengusiran masyarakat adat Endorois dan Ogiek dari tanah leluhur mereka. Ia merekomendasikan pengakuan hak Endorois atas kepemilikan tanah leluhur, termasuk akses tanpa batasan dan kompensasi atas kerugian yang mereka derita.
- Pelanggaran hak atas pembangunan: Dampak negatif sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang signifikan terhadap masyarakat adat muncul dari pembangunan pelabuhan, proyek pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi, penebangan dan pertambangan, dan proyek pembangunan lainnya.
- Partisipasi politik: Penduduk asli kurang terwakili di semua tingkat pemerintahan, yang mengakibatkan kurangnya suara dan kekuatan pengambilan keputusan.
- Perempuan Minoritas dan Pribumi: Perempuan dan anak perempuan minoritas dan pribumi adalah beberapa kelompok yang paling rentan di Kenya. Ditemukan bahwa keamanan yang tidak memadai dan keamanan yang menindas memiliki dampak negatif pada minoritas dan perempuan Pribumi, mulai dari hilangnya nyawa dan kekerasan seksual hingga penurunan akses ke barang dan makanan yang diperdagangkan.
- Akses ke hak-hak sosial-ekonomi. Minoritas terpinggirkan dan komunitas pribumi di Kenya jauh lebih miskin daripada populasi lainnya. Kemiskinan dikaitkan dengan kurangnya akses ke pemerintah dan layanan lainnya. Akses pendidikan bagi anak-anak minoritas dan Pribumi juga menjadi masalah utama.

Kontroversi mengelilingi Bab Tanah laporan setelah tiga komisaris menuduh isinya diubah setelah laporan itu diserahkan.

Menindaklanjuti

Laporan akhir diterima dengan tentangan oleh beberapa kekuatan sosial yang kuat. Pemerintah menolak untuk mempublikasikan laporan tersebut secara luas, dan kasus-kasus pengadilan berusaha untuk menghapus sebagian dari laporan tersebut dan untuk memblokir pelaksanaan rekomendasi.

Harapan masyarakat adat terhadap proses TJRC tidak terpenuhi. Klaim Ogiek dan Endorois tetap tidak tertangani. Penggusuran masyarakat Ogiek dari hutan Mau pada tahun 2020 menunjukkan keterpinggiran mereka yang terus berlanjut. Reparasi untuk ketidakadilan historis dan akses ke keadilan juga merupakan salah satu klaim yang belum terselesaikan dari komunitas adat.

Pembelajaran dan dukungan

- Mandat **TJRC** dikritik karena terlalu berat dan terlalu ambisius dalam upaya

- untuk menutupi 45 tahun kekerasan dan penindasan, terutama mengingat sumber daya yang terbatas dan ketegangan politik yang tinggi seputar operasinya.
- Kontroversi seputar Ketua DPR mencederai kredibilitas KPU yang tidak memiliki hubungan baik dengan masyarakat sipil.
 - Isu hak masyarakat adat berkaitan dengan tanah dan sumber daya dapat menarik oposisi kuat yang akan merasa terancam oleh proses pengungkapan kebenaran seperti itu dengan kekuatan untuk membuat rekomendasi.
 - Laporan akhir, dokumen setebal 2.000 halaman, sangat tidak dapat diakses oleh publik dan tidak dipublikasikan secara luas.
 - Meskipun Kenya belum mengesahkan **UNDRIP**, TJRC membingkai diskusinya tentang hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hak internasional.
 - Penting untuk mengelola ekspektasi apakah komisi kebenaran dengan mandat hak asasi manusia yang luas dapat mempengaruhi perubahan pada masalah hak asasi manusia yang sudah berlangsung lama bagi masyarakat adat. Masyarakat adat harus mengembangkan strategi yang jelas tentang bagaimana partisipasi dapat berkontribusi pada perjuangan mereka yang lebih lama untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Masyarakat adat di Kenya tidak merasa bahwa harapan mereka terhadap komisi tersebut terpenuhi.
 - Meskipun demikian, **TJRC** memang meningkatkan visibilitas sejumlah komunitas adat dan perjuangan mereka untuk mewujudkan hak-hak mereka.
 - Efektivitas operasi penjangkauan **TJRC** dipertanyakan.





B A B

4

ASIA — PASIFIK

Masyarakat pribumi Tuhoe turun ke jalan untuk mengingatkan Perjanjian Waitangi 1840 di Kota Auckland, Aotearoa. Februari, 2008.

(Foto oleh Hannah Peters lewat Getty Images).

Meskipun sekitar 70% masyarakat pribumi dunia tinggal di Asia dan Pasifik, bagi banyak orang pengakuan oleh negara-bangsa modern sebagai masyarakat pertama merupakan tantangan besar. Wilayah Asia-Pasifik yang luas tidak mengalami penjajahan yang dominan, tidak seperti Amerika Latin. Negara-negara penjajah termasuk Portugal dan Spanyol, diikuti oleh Belanda, Prancis, Inggris, Jepang dan Amerika Serikat, serta Jerman di Pasifik. Tidak semua negara dijajah.

Situasi masyarakat pribumi di sebagian besar negara kecil Pasifik berbeda dengan di Asia, karena mereka merupakan mayoritas penduduk. Negara-negara pemukim Australia dan Selandia Baru, masing-masing dijajah oleh Inggris, juga memiliki konteks pribumi dan kolonial yang berbeda.

Timor Leste

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, CAVR (2002–2005)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Timor-Leste dijajah oleh Portugal dari abad ke-16 hingga 1975. Setelah proses dekolonisasi yang cepat dan gagal, Timor-Leste mendeklarasikan kemerdekaan dan hampir segera diserbu oleh negara tetangga Indonesia. Indonesia menduduki wilayah tersebut selama 24 tahun melalui kontrol militer yang intens. Perlawanan orang Timor disambut dengan pelanggaran hak asasi manusia massal, termasuk operasi militer besar seperti pemboman udara, pemindahan paksa serta kelaparan terkait, pembantaian dan pembunuhan, kekerasan dan penyiksaan seksual, serta pelanggaran hak sosial, ekonomi dan budaya yang meluas. Antara 100-183.000 orang kehilangan nyawa.

Timor Timur terdaftar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1960-an, dan status ini tidak berubah di bawah pendudukan Indonesia. Pada tahun 1999, setelah jatuhnya pemimpin lama Indonesia yang otoriter Soeharto, PBB melakukan tindakan penentuan nasib sendiri melalui pemungutan suara nasional, menghasilkan suara untuk kemerdekaan. Sebagai buntut dari respon kekerasan militer Indonesia, PBB membentuk Pemerintahan Transisi sampai kemerdekaan pada tahun 2002.

Tim hak asasi manusia Administrasi Transisi PBB bekerja dengan aktivis Timor dan pemimpin gereja lokal untuk mengadakan

konsultasi tentang keadilan transisional, yang mengarah pada pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (**Commission for Reception, Truth and Reconciliation/CAVR**). Pada saat yang sama, Pemerintahan Transisi dan kemudian Timor-Leste yang merdeka melakukan proses peradilan untuk kejahatan berat yang dilakukan dalam kekerasan tahun 1999.

Timor-Leste adalah rumah bagi setidaknya 30 kelompok bahasa dan budaya pribumi yang berbeda. Sebagian besar penduduk Timor-Leste adalah keturunan Melayu-Polinesia dan Melanesia-Papua. Dalam kunjungannya tahun 2019 ke Timor-Leste, Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat mencatat bahwa sebagian besar orang Timor adalah penduduk asli.

Di bawah hukum kolonial Portugis, masyarakat pribumi dikaitkan dengan “tidak beradab”. Pada tahun 1930, Portugal mengadopsi Undang-Undang Kolonial, yang secara resmi membedakan antara pribumi (orang asli Timor) dan orang non pribumi (ini termasuk orang kulit putih, *mestiços* dan *assimilados*). Seseorang dapat memperoleh status asimilado, misalnya dengan belajar bahasa Portugis, melakukan wajib militer dan memiliki “karakter yang baik”. Stigma dan perpecahan yang disebabkan oleh penerapan terminologi tersebut meninggalkan warisan.

Timor-Leste mendukung adopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi pada tahun 2007, dan Konstitusi 2002 berisi beberapa ketentuan yang secara eksplisit mengakui adat, nilai-nilai tradisional dan warisan budaya negara tersebut. Timor-Leste belum meratifikasi Konvensi ILO 169.

Mandate

CAVR memiliki mandat yang komprehensif untuk memeriksa pelanggaran hak asasi manusia selama periode 24 tahun dari berakhirnya kekuasaan kolonial Portugis hingga akhir pendudukan Indonesia, serta untuk mempromosikan rekonsiliasi.

CAVR tidak menerapkan kerangka hak-hak masyarakat pribumi dalam proses pencarian kebenarannya. Namun, laporan akhirnya mendedikasikan satu bab untuk proses penentuan nasib sendiri, yang berfokus pada era pemerintahan kolonial Portugis dan pendudukan Indonesia. Ketujuh komisar nasional dan 28 regional semuanya orang Timor.

Metodologi

Sementara **CAVR** didirikan di bawah undang-undang administrasi PBB, komisi tersebut menjalankan operasinya setelah pemulihan kemerdekaan. Komisi tsb.

memiliki mandat yang luas untuk mencari kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia selama periode penyelidikan.

CAVR mengembangkan proses yang sangat partisipatif, dengan tim yang beroperasi di 13 distrik. Audiensi publik lokal berlangsung di samping delapan audiensi tematik nasional. Metodologi pencarian kebenaran didasarkan pada kesaksian individu, dengan hampir 8.000 pernyataan individu dicatat. Pendekatan ini dilengkapi dengan penelitian tematik, termasuk pemindahan paksa dan kelaparan, pembunuhan dan penghilangan, penyiksaan, kekerasan seksual, hak-hak anak dan peran masyarakat internasional.

Pekerjaan rekonsiliasi yang menggabungkan para pemimpin tradisional, hukum dan praktik dengan komisi kebenaran dan pengadilan.

Untuk mempromosikan rekonsiliasi di tingkat lokal, Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (**Community Reconciliation Procedures/CRP**) dilakukan di desa-desa di seluruh negeri. Dengar pendapat PRK dirancang untuk membantu masyarakat mengintegrasikan kembali sejumlah besar mantan anggota milisi yang terkait dengan kejahatan yang tidak terlalu serius. Kejahatan berat seperti pembunuhan dan kekerasan seksual berada di bawah kewenangan pengadilan khusus. **CRP** menghubungkan hukum modern, otoritas **CAVR**, dan hukum tradisional serta praktik budaya setempat, yang dikenal sebagai lisan. Audiensi publik bertujuan untuk secara damai mengintegrasikan kembali anggota milisi tingkat rendah, memulihkan martabat para korban dan membangun kembali harmoni dalam masyarakat.

Regulasi yang membentuk **CAVR** menetapkan langkah-langkah dasar untuk dengar pendapat PRK. Komisi juga menyusun pedoman prosedural untuk memastikan tingkat keseragaman. Namun, pedoman ini memberikan fleksibilitas untuk langkah atau praktik lain. Komisi mendorong masyarakat untuk menerapkan praktik budaya lokal untuk mempromosikan kepemilikan. Sejauh mana ritual lisan digunakan dan bentuknya sangat bervariasi antar komunitas. Namun, beberapa praktik umum terjadi di sebagian besar dengar pendapat PRK/**CRP**, seperti upacara **boot nahe biti** (menyebarkan tikar besar).

Audiensi dipimpin oleh komisar regional **CAVR**, dengan penandatanganan oleh unit yudisial yang menuntut kejahatan sejarah yang serius. Hukum tradisional dan praktik budaya dengan demikian terkait dengan sistem peradilan dan peradilan transisional modern.

Ada semangat kolektif dan komunitas yang kuat dalam audiensi tersebut. Ritual Lisan sering dilakukan sebagai persiapan untuk sidang PRK/**CRP** dan untuk

menandai pembukaannya. Hal ini menumbuhkan pandangan bahwa PRK/**CRP** tidak hanya diadakan untuk kepentingan pelaku individu, tetapi sebagai acara komunitas yang penting bagi seluruh desa. Nyanyian dan lantunan para pemimpin lisan dimaksudkan untuk didengar tidak hanya oleh para hadirin yang masih hidup tetapi juga oleh para penjaga masyarakat, para leluhur, yang diyakini juga akan menjadi saksi persidangan.

Temuan dan rekomendasi

CAVR mengeluarkan laporan akhir rinci lebih dari 2.500 halaman, dalam tiga bahasa. Itu disertai dengan versi ringkasan, versi remaja, dan publikasi tentang audiensi publik tematik, serta produk radio dan video. Laporan akhir mencakup satu bab yang merinci pengalaman, hasil dan pelajaran dari dengar pendapat PRK/**CRP**. Laporan akhir belum diterbitkan dalam bahasa resmi Tetun, meskipun publikasi terkait dan produk multimedia lainnya telah diterbitkan.

Pembelajaran dan dukungan

- Sidang PRK/**CRP** adalah contoh sistem peradilan campuran yang menggabungkan sistem resmi dan proses dan pemimpin budaya tradisional. Pendekatan ini membantu membuat proses CAVR lebih relevan dan bermakna dalam komunitas lokal, sambil memastikan proses tersebut diterima dalam sistem peradilan formal.
- Tingkat lokal dan karakter dengar pendapat itu penting, sebuah contoh Komisi Kebenaran yang beroperasi di tingkat desa dengan pemimpin adat dan adat memainkan peran kunci.
- Audiensi ini juga memiliki komunitas dan karakter kolektif yang kuat untuk menyampaikan kebenaran dan berbagi. Mereka berbicara tentang bagaimana konflik mempengaruhi komunitas dan juga individu. Ini mungkin relevan dalam situasi lain.
- Sejumlah peserta program PRK/**CRP** berkomentar bahwa dengan memasukkan adat tradisional membantu memulihkan lisan sebagai kekuatan pemersatu dalam masyarakat, setelah dimanipulasi selama bertahun-tahun konflik.

KEPULAUAN SOLOMON

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2009–2010)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Lebih dari 90% populasi Kepulauan Solomon adalah penduduk asli Melanesia. Sekitar 120 bahasa digunakan di 347 pulau. Sekitar 85% penduduk tinggal di tanah milik adat dan mempraktekkan mata pencaharian subsisten di lingkungan desa. Identitas sebagian besar berpusat di sekitar “**wantok**” atau loyalitas klan.

Pelaut Spanyol adalah orang Eropa pertama yang membangun kontak dengan Kepulauan Solomon pada akhir abad keenam belas. Setelah penjajahan Inggris di Australia dan Selandia Baru, misionaris Kristen mulai menetap dari tahun 1850-an. Sejak tahun 1870-an, penduduk lokal dieksploitasi sebagai tenaga kerja perkebunan di Fiji dan Queensland, Australia. Pada tahun 1886, Inggris dan Jerman membagi pulau-pulau itu di antara mereka. Pada tahun 1893, Inggris mendeklarasikan Kepulauan Solomon sebagai Protektorat dan pemerintahan kolonial dimulai tiga tahun kemudian. Kepulauan Solomon adalah lokasi pertempuran besar selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang, gerakan nasionalis muncul, mencapai kemerdekaan pada tahun 1978.

Sebuah konflik di Kepulauan Solomon, yang secara lokal disebut sebagai “ketegangan”, terjadi antara tahun 1998 dan 2003. Konflik tersebut terutama antara kelompok-kelompok militan dari dua provinsi berpenduduk terpadat, Malaita dan Guadalcanal. Diperkirakan 200 orang meninggal, dan penyiksaan, penculikan dan

kekerasan seksual terjadi. Diperkirakan 35.000 orang, atau 10% dari populasi, mengungsi. Konflik tersebut sangat mengganggu pelayanan pemerintah, memecah belah kepolisian, dan merusak perekonomian. Efeknya terasa di seluruh populasi.

Konflik telah digambarkan sebagai konflik etnis antara dua populasi pulau besar. Namun, analisis menunjukkan bahwa akar konflik adalah masalah sosial-ekonomi, pembangunan, politik dan pertanahan. Sementara konflik dimulai dengan kekerasan di sepanjang garis provinsi, seiring waktu banyak kekerasan juga terjadi di dalam kelompok.

Gereja, pemimpin lokal dan jaringan masyarakat sipil memimpin banyak rekonsiliasi yang berarti di tingkat lokal, menggambarkan kepercayaan yang diberikan kepada mereka sebagai mediator dan pembawa damai. Konflik secara resmi berakhir dengan kedatangan Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon (**Regional Assistance Mission to Solomon Islands/RAMSI**) pada Juli 2003. Misi regional yang dipimpin Australia untuk “memulihkan hukum dan ketertiban” berpusat pada tiga pilar pemulihan: mesin pemerintahan, tata kelola ekonomi, serta hukum dan keadilan. Misi tersebut melibatkan penghapusan senjata, penuntutan pidana, penguatan kelembagaan dan pembangunan kapasitas. Baik pembangunan perdamaian maupun rekonsiliasi tidak termasuk dalam mandat **RAMSI**, juga tidak bermitra langsung dengan Kementerian Persatuan, Rekonsiliasi dan Perdamaian Nasional.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kepulauan Solomon (**Solomon Islands Truth and Reconciliation Commission/ TRC**) pertama kali diusulkan pada puncak ketegangan pada tahun 2000 oleh Komite Perdamaian Asosiasi Kristen Kepulauan Solomon (**Peace Committee of the Solomon Islands Christian Association**). Komisi dipandang sebagai sarana untuk membangun persatuan nasional melalui proses pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan keadilan atau amnesti. Namun, momentum memudar ketika **RAMSI** berfokus pada inisiatif keadilan lainnya dan sampai pergantian pemerintahan pada tahun 2006 tidak ada dukungan resmi untuk KKR/**TRC**. Setelah komite konsultatif menyimpulkan ada dukungan publik untuk Komisi Kebenaran, komite pengarah dibentuk. Pada tahun 2008, parlemen mengesahkan UU KKR/**TRC**. Kepulauan Solomon belum mengesahkan **UNDRIP** atau Konvensi ILO 169. Konstitusi Kepulauan Solomon membuat sedikit referensi tentang hak-hak masyarakat pribumi.

Mandat

Komisi tersebut diluncurkan pada tahun 2009 oleh Uskup Agung Desmond Tutu, mantan Ketua KKR/**TRC** Afrika Selatan. Ini mulai beroperasi pada tahun 2010, awalnya untuk satu tahun dan diperpanjang untuk tahun berikutnya. Lima

komisaris diangkat, termasuk tiga orang Kepulauan Solomon dari tiga provinsi yang paling terkena dampak konflik. Dua komisaris adalah perempuan.

Mandatnya adalah untuk “mempromosikan persatuan dan rekonsiliasi nasional” dengan memeriksa sifat, anteseden, akar penyebab, tanggung jawab, dan tingkat pelanggaran atau pelanggaran hak asasi manusia antara 1 Januari 1998 dan kedatangan **RAMSI** pada 23 Juli 2003. Itu juga diamanatkan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, hukum, dan sektor lainnya, serta menyusun kebijakan untuk mencegah situasi serupa di masa mendatang.

Komisi tersebut juga diberi mandat untuk “bekerja untuk memulihkan martabat manusia para korban dan mempromosikan rekonsiliasi” dengan memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk menceritakan pengalaman mereka secara pribadi, “menciptakan iklim yang mendorong pertukaran konstruktif antara korban dan pelaku” (**TRC UU, 5[2c]**). Amanat tersebut menetapkan bahwa perhatian khusus diberikan pada pelecehan seksual dan pengalaman anak-anak. Komisi tidak diberi wewenang untuk memberikan amnesti atau kompensasi.

Metodologi

Komisi mengambil pernyataan di seluruh negeri dan menyusunnya ke dalam database pusat. Itu juga melakukan dengar pendapat publik regional dan tematik, yang disiarkan di televisi dan disiarkan di radio; penelitian dan investigasi; sidang tertutup; dan penggalan.

Temuan dan rekomendasi

Sebuah laporan akhir sekitar 1.000 halaman menawarkan narasi konflik dan pendahulunya, mengutip kutipan pernyataan, kesaksian dan audiensi publik. Laporan tersebut juga menyajikan analisis pelanggaran hak asasi manusia selama konflik dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mencegah terulangnya kembali.

Menindaklanjuti

- Laporan tersebut disampaikan kepada Perdana Menteri, yang menolak untuk menyampaikannya kepada Parlemen. Itu dirilis secara tidak resmi pada tahun 2013 oleh editor utama.
- Satu dekade setelah KKR/**TRC** menyelesaikan tugasnya, masyarakat sipil masih meminta parlemen untuk memperdebatkan laporan akhir dan mengimplementasikan rekomendasinya, termasuk mengenai kompensasi.

Pembelajaran dan dukungan

- Kritikus berpendapat bahwa meskipun KKR/**TRC** memenuhi model dan fungsi komisi kebenaran menurut praktik internasional, KKR/**TRC** tidak terintegrasi dengan pendekatan lokal untuk rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Dengan hanya komitmen tanda untuk kastom (budaya tradisional) dan praktik rekonsiliasi adat, itu didorong oleh norma-norma internasional keadilan transisional, kehilangan kesempatan untuk kepemilikan lokal.
- Beberapa juga berpendapat bahwa KKR/**TRC** menjadi menjauh dari masyarakat sipil dan inisiatif jaringan gereja yang membantu menciptakannya. Karena menjadi lebih dari sebuah lembaga yang didukung pemerintah, menjadi lebih jauh dari tradisi dan praktik lokal.
- Salah satu aspek ketegangan ini adalah hubungan antara pengungkapan kebenaran tentang ketidakadilan masa lalu dan tradisi budaya Melanesia, di mana orang tidak membicarakan masa lalu atau membungkainya dalam praktik kastom, seperti bentuk kompensasi simbolis.
- Lebih lanjut, telah disarankan bahwa pengambilan pernyataan dan analisis data yang dibingkai di sekitar pelanggaran hak asasi manusia tidak cukup memungkinkan mendongeng sebagai cara untuk mengungkapkan kebenaran.
- Ada laporan bahwa kejujuran bagi perempuan tidak mudah dan bahkan dianggap tidak pantas. Misalnya, perempuan mungkin maju ke depan untuk menceritakan perusakan kebun makanan mereka, tetapi tetap diam tentang kekerasan terhadap mereka, khususnya kekerasan seksual.
- Seperti yang direncanakan, program rekonsiliasi akan menjadi prioritas Komisi, bersama dengan hukum adat dan kepala suku, serta gereja. Namun, UU KKR/**TRC** tidak mengatur bagaimana rekonsiliasi akan dilakukan, hanya menyiratkan bahwa hal itu akan dihasilkan dari pencarian kebenaran. Pendekatan ini berbeda dengan program proses rekonsiliasi masyarakat yang dilaksanakan di Timor-Leste.
- Banyak yang memberikan pernyataan kepada staf **TRC** bahwa mereka termotivasi karena mereka ingin melihat rekomendasi diterapkan, mungkin termasuk kompensasi. Kurangnya tindak lanjut politik terhadap KKR dan rekomendasinya telah berdampak negatif pada korban pelanggaran yang memiliki harapan bahwa bersaksi akan mengarah pada tindakan resmi.

Malaysia

Penyelidikan Hak Tanah Adat Asli 2010–2012 dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Kelompok Orang Asli, Orang Ulu dan Anak Negeri adalah penduduk asli Malaysia, yang terdiri lebih dari 70 subkelompok. Pada tahun 2015, diperkirakan bahwa masyarakat adat mewakili sekitar 13,8% dari populasi 31 juta. Namun, di wilayah Semenanjung Malaysia, Orang asli hanya berjumlah 0,7% dari populasi. Di pulau Kalimantan, di Sarawak, masyarakat adat mewakili lebih dari 55% dan di Sabah sekitar 70% dari populasi. Mayoritas tinggal di pedesaan dan dalam banyak kasus, daerah terpencil, meskipun semakin banyak tinggal di pinggiran kota.

Pemukiman manusia di wilayah negara modern Malaysia sudah ada lebih dari 40.000 tahun. Hubungan dagang dengan Cina dan India terjalin pada abad ke-1 SM. Pada milenium pertama Masehi, Melayu menjadi etnis yang dominan di semenanjung. Negara-negara bagian awal yang kecil sangat dipengaruhi oleh budaya India, seperti juga sebagian besar Asia Tenggara. Islam datang melalui pedagang Arab dan India pada abad ke-13, mengakhiri zaman Hindu dan Buddha. Negara-negara Melayu berturut-turut dijajah oleh Portugal, Belanda dan Inggris dari abad keenam belas sebelum diduduki oleh Jepang 1942-1945. Sabah dan Sarawak diperintah oleh **North Borneo Chartered Company** dan **Brooke Rajah** sampai pendudukan Jepang, setelah itu mereka menjadi koloni Inggris. Sementara Semenanjung Malaysia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia dibentuk ketika negara-negara

daratan, Singapura, Sabah dan Sarawak membentuk sebuah federasi pada tahun 1963. Singapura menarik diri pada tahun 1965.

Malaysia telah mengesahkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Pribumi. Namun belum meratifikasi Konvensi ILO 169. Di Sarawak dan Sabah, hukum yang diperkenalkan di bawah pemerintahan kolonial Inggris yang mengakui hak dan hukum tanah adat masih berlaku. Konstitusi Malaysia juga memberikan perlindungan terhadap Hak Adat Asli. Namun, perlindungan ini tidak diterapkan dengan benar atau diabaikan. Pemerintah memiliki pola mengutamakan ekstraksi sumber daya alam yang besar dan perkebunan perusahaan swasta serta lembaga negara di atas hak dan kepentingan masyarakat adat. Di Semenanjung Malaya, minoritas kecil penduduk pribumi orang asli telah menghadapi kebijakan asimilasi Pemerintah yang terpadu, terutama sejak tahun 1990-an.

Sejak dibentuk, lembaga HAM nasional, SUHAKAM menerima banyak keluhan dari masyarakat pribumi. SUHAKAM melakukan investigasi terhadap kasus-kasus tertentu, melakukan studi lapangan, melakukan dialog dengan masyarakat terkait, diskusi meja bundar dengan Pemerintah Negara Bagian dan lembaga lain serta perusahaan swasta. Komisi kemudian menerbitkan Laporan Khusus dan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait.

SUHAKAM menerima banyak keluhan antara tahun 2002 dan 2010 terkait dengan hak ulayat atas tanah, yang banyak di antaranya belum terselesaikan. Keluhan dari masyarakat adat ini berkaitan dengan perambahan dan perampasan tanah; tanah yang termasuk dalam hutan atau taman suaka; klaim yang tumpang tindih; dan lambatnya pemrosesan permintaan untuk judul asli atau cadangan komunitas. Disimpulkan bahwa masalah tidak dapat diatasi dengan pendekatan sedikit demi sedikit atau ditangani berdasarkan kasus per kasus. Sebaliknya, akar permasalahan harus ditangani secara komprehensif dengan mengkaji pengalaman masyarakat adat di seluruh Malaysia dari kacamata hak asasi manusia. SUHAKAM memutuskan untuk melakukan penyidikan nasional terhadap Hak Tanah masyarakat pribumi di Malaysia.

Mandat

SUHAKAM mengembangkan kerangka acuan untuk penyelidikan nasional:

- Untuk menentukan sifat dan efektivitas pengakuan konstitusional, hukum, administratif dan politik atas hak masyarakat adat untuk tanah.
- Untuk menyelidiki situasi hak atas tanah masyarakat pribumi dan dampak pengakuan atau tidak diakuinya hak mereka atas tanah terhadap hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka, dengan mempertimbangkan hukum internasional dan domestik yang relevan.
- Untuk mengidentifikasi hambatan dalam penikmatan penuh hak masyarakat

- pribumi atas tanah sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka.
- Untuk menciptakan dan mempromosikan lebih banyak kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang hak masyarakat pribumi atas tanah dan cara hidup mereka.
- Untuk mengembangkan rekomendasi kepada Pemerintah Federal dan Negara Bagian.

Metodologi

SUHAKAM membentuk panel yang mewakili Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Panel dibantu oleh konsultan yang dipilih oleh Komisi berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka dalam hak-hak masyarakat pribumi. Penyelidikan mengambil pendekatan kooperatif dan responsif untuk mengembangkan solusi untuk masalah tanah masyarakat pribumi. Ini melibatkan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat pribumi, perusahaan swasta, dan kelompok dan individu lain yang berkepentingan, untuk mengidentifikasi dan mengembangkan cara-cara praktis guna meningkatkan status kepemilikan tanah masyarakat pribumi.

Penyelidikan diawali dengan sesi perkenalan di tiga wilayah, dilanjutkan dengan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan. Penyelidikan menerima pengajuan publik tertulis. Audiensi publik berikutnya mendengarkan kasus-kasus terpilih dari konsultasi dan pengajuan. Mitra dari University of Malaya, University Malaysia Sabah dan University Malaysia Sarawak, melakukan penelitian mendalam.

Konsultasi tersebut mendapat tanggapan yang luar biasa, dengan lebih dari 6.500 masyarakat pribumi berpartisipasi dalam sesi tersebut. Sebanyak 892 pernyataan dicatat, termasuk 407 dari Sabah, 198 dari Sarawak dan 287 dari Semenanjung. Sebanyak 132 kasus dipilih untuk audiensi publik di tiga wilayah. Komisi juga terlibat dengan media untuk mempromosikan kesadaran publik tentang hak masyarakat pribumi atas tanah dan cara hidup mereka, meningkatkan transparansi, dan membangun tekanan pada pihak berwenang.

Penyelidikan dipandu oleh definisi dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika mengidentifikasi siapa yang merupakan masyarakat pribumi Malaysia. Ini mempertimbangkan Konstitusi Federal, undang-undang negara bagian, dan definisi kerja yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara Penyelidikan mengakui bahwa orang Melayu adalah Penduduk Asli Malaysia, kepatuhan terhadap definisi kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa membuatnya berfokus pada Orang Asli di Semenanjung Malaysia, dan penduduk asli di Sabah dan Sarawak.

Temuan dan rekomendasi

Pada tahun 2013, SUHAKAM menerbitkan laporannya yang menganalisis hak-hak

masyarakat pribumi dalam kerangka hukum internasional, khususnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi. Laporan tersebut juga menganalisis Konstitusi dan undang-undang negara bagian terkait dengan hak atas tanah adat. Selain itu, menganalisis perkembangan peradilan hak atas tanah dalam kasus-kasus masyarakat pribumi yang diajukan terhadap lembaga negara, sektor swasta atau individu swasta.

Penyelidikan membagi temuan pada kasus-kasus yang dipertimbangkan dalam tiga bidang ke dalam kategori seperti administrasi; perkebunan; skema pengembangan lahan masyarakat; penebangan dan hutan lindung; dimasukkannya tanah hak ulayat ke dalam Kawasan Lindung Nasional atau Negara Bagian; proyek pengembangan komersial; dan ganti rugi dari pembebasan lahan. Penyelidikan menemukan bahwa masyarakat adat adalah salah satu kelompok yang paling terpinggirkan dan kurang beruntung di Malaysia. Terlepas dari ketentuan yang mengakui hak tanah mereka dalam Konstitusi Federal, hukum domestik dan internasional, masalah sistemik telah menghalangi masyarakat adat untuk menikmati sepenuhnya hak hukum dan hak asasi manusia mereka. Isu-isu sistemik ini berkembang terutama dari amandemen undang-undang pertanahan berturut-turut yang tidak mengakui perspektif masyarakat adat tentang kepemilikan dan pengelolaan tanah, dan karenanya mengikis hak adat atas tanah. Adopsi kebijakan yang memprioritaskan proyek-proyek pembangunan besar di atas ekonomi subsisten masyarakat pribumi merupakan hambatan lebih lanjut untuk hak-hak pribumi.

Laporan tersebut mengkaji dampak dari tidak diakuinya hak-hak masyarakat pribumi, dengan mempertimbangkan hukum internasional dan domestik. Ditemukan bahwa erosi cepat identitas budaya dan bahasa sebagai akibat dari hilangnya tanah telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, bahwa pengakuan akan hubungan erat antara hak budaya dan bahasa pribumi dan hak-hak mereka terkait dengan tanah, wilayah, dan sumber daya mereka diperlukan untuk memastikan penghormatan terhadap hak masyarakat pribumi untuk menentukan nasib sendiri. Penyelidikan menemukan bahwa untuk memberikan pengakuan atas hak masyarakat pribumi atas tanah akan membutuhkan tindakan untuk memperbaiki dampak ini.

Laporan tersebut mendokumentasikan 18 rekomendasi di bawah sejumlah tema: mengakui hak masyarakat pribumi atas tanah; memperbaiki kehilangan tanah; mengatasi masalah dan ketidakseimbangan pembangunan lahan; mencegah hilangnya tanah hak ulayat asli di masa mendatang; menangani masalah administrasi pertanahan; dan mengakui tanah sebagai pusat identitas masyarakat pribumi. Ia juga merekomendasikan kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, dengan menekankan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat pribumi. Rekomendasi utama adalah

bahwa Pemerintah membentuk Komisi Nasional Independen untuk masyarakat pribumi guna memastikan masalah hak atas tanah ditangani secara efektif.

Menindaklanjuti

SUHAKAM telah merencanakan untuk mengeluarkan laporan tersebut kepada Parlemen, Dewan Legislatif Negara Bagian, Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian terkait. Namun, pembubaran DPR untuk pemilihan umum memaksa SUHAKAM untuk menunda peluncurannya. Ketika sesi baru Parlemen diadakan, laporan itu tidak diajukan. Sebaliknya, Kabinet Federal memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Nasional dengan mempertimbangkan laporan tersebut.

Gugus Tugas menyelesaikan studinya pada tahun 2014 dan menghasilkan laporannya sendiri yang mendukung sebagian besar rekomendasi SUHAKAM, kecuali pembentukan Komisi Masyarakat Pribumi. Laporan Gugus Tugas diserahkan ke Kabinet pada tahun 2015, yang menyetujui pembentukan Komite Kabinet untuk Hak Tanah Masyarakat Pribumi, yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri.

Selama periode 2012-2016, SUHAKAM menjadikan hak-hak masyarakat adat sebagai salah satu tema inti dari rencana strategisnya dan terus mengadvokasi untuk menindaklanjuti rekomendasi.

Pembelajaran dan dukungan

- Penyelidikan menancapkan analisisnya tentang masyarakat pribumi dan hak-hak mereka dalam kerangka hak asasi manusia internasional, khususnya **UNDRIP** dan Konvensi ILO 169. Proses penerapan kerangka hukum internasional tentang masyarakat pribumi dalam konteks nasional ini sangat signifikan di Asia.
- Media, khususnya media lokal, berperan aktif selama proses berlangsung. Namun, penyensoran media sendiri menghasilkan liputan yang lebih rendah daripada yang diharapkan Komisi.
- Penyelidikan dipandang sebagai **platform** pemberdayaan utama bagi masyarakat pribumi, membantu mereka untuk memobilisasi untuk melindungi tanah adat mereka.
- Menerapkan rekomendasi tetap menjadi tantangan, dan masalah mendasar tentang pengakuan asli atas hak tanah ulayat di semua tingkat pemerintahan masih belum terselesaikan.
- SUHAKAM terus memasukkan hak-hak masyarakat pribumi sebagai bidang utama pekerjaannya.

Indonesia

Penyelidikan Nasional Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, oleh Komnas HAM

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Indonesia berpenduduk sekitar 260 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Diperkirakan ada 50-70 juta masyarakat adat di negara ini.

Berabad-abad sebelum orang Eropa tiba, kepulauan itu adalah rumah bagi masyarakat pedagang pesisir dan masyarakat agraris pedalaman. Orang Eropa pertama yang membangun diri di Indonesia adalah orang Portugis pada tahun 1512. Pada tahun 1590-an, para pedagang Belanda mulai melakukan perjalanan ke Nusantara, yang menyebabkan Perusahaan Hindia Belanda menguasai sebagian besar wilayah. Pemerintah Belanda menjajah wilayah itu sebagai Hindia Belanda langsung setelah tahun 1800. Negara kolonial Belanda memperluas praktek pertambangan dan pertanian besar, awalnya di Jawa dan dari paruh kedua abad kesembilan belas di “pulau-pulau terluar” juga. Pada awal abad kedua puluh muncul perjuangan nasionalis Indonesia, yang mengarah ke perjuangan diplomatik dan bersenjata untuk kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, dan diakui oleh Belanda empat tahun kemudian.

Gerakan hak-hak masyarakat pribumi dimulai pada 1970-an dan 80-an. Pada tahun 1999, setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan rezim

Orde Baru yang represif, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) didirikan dan saat ini memiliki 2.366 komunitas anggota.

Pemerintah mengakui 1.128 kelompok etnis. Namun, pada tahun 2012 ia mengatakan kepada PBB bahwa konsep masyarakat adat tidak berlaku di Indonesia. Posisi ini bertentangan dengan tindakan pengadilan, legislatif dan pemerintah yang signifikan. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan hak konstitusional masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka, termasuk hak kolektif mereka atas hutan adat. Pengadilan menggunakan UNDRIP dan berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk Konvensi ILO 169, sebagai referensi. Amandemen ketiga UUD Indonesia mengakui hak-hak Masyarakat Adat (pasal 18 B-2 dan 28 I-3).

Kementerian Sosial mengidentifikasi beberapa komunitas sebagai “komunitas adat terpencil” (“komunitas adat terpencil”), yang secara efektif mengidentifikasi mereka sebagai masyarakat adat. Dalam undang-undang yang lebih baru, ada pengakuan implisit dari beberapa hak masyarakat adat, di mana mereka disebut sebagai masyarakat adat atau masyarakat Hukum Adat. Indonesia telah mengesahkan **UNDRIP**, tetapi belum meratifikasi Konvensi ILO 169. Meskipun ada kemajuan, pengakuan penuh terhadap masyarakat adat tetap menjadi tantangan besar.

Kebijakan pertanahan negara modern secara signifikan mempengaruhi hak-hak masyarakat adat. Di beberapa daerah, pembagian tanah oleh negara menjadi zona “hutan” dan “non-hutan”, serta peruntukan penggunaan tanah, dibawa dari masa kolonial Belanda. Sejak tahun 1960-an, rezim Orde Baru Soeharto menegaskan hak tunggal atas semua tanah yang “tidak dimiliki” dan sumber daya di dalamnya. Antara awal 1970-an hingga awal 1980-an, hampir 70% lahan Indonesia ditetapkan sebagai kawasan hutan dan Pemerintah membagi kawasan menjadi kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Penunjukan ini memberikan sedikit pengakuan terhadap masyarakat pribumi dan hak teritorial mereka, yang mengakibatkan masuknya secara sewenang-wenang wilayah yang secara tradisional dihuni dan digunakan oleh masyarakat pribumi. Pemerintah mengeluarkan izin untuk konsesi penebangan, hutan tanaman, dan operasi pertambangan dan mengkonversi lahan hutan untuk usaha komersial lainnya. Ada juga pola yang meluas dari Pemerintah di berbagai tingkatan yang mengkriminalisasi masyarakat pribumi yang mempertahankan tanah dan wilayah mereka. Komnas HAM memperkirakan 20% pengaduan yang diterima terkait dengan sengketa tanah.

Komisi meluncurkan penyelidikan sebagai tanggapan atas keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Peninjauan kembali undang-undang kehutanan ini menciptakan momentum untuk memulihkan status hak masyarakat adat atas

wilayah adat. Komisi berpendapat bahwa keputusan ini menandai titik signifikan pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan hak-hak mereka, terutama atas wilayah adat, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Mandat

Komisi meluncurkan penyelidikan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka di kawasan hutan karena masalah tersebut tersebar luas di seluruh Indonesia; isu-isu yang kompleks dan multi-faceted; dan undang-undang dan peraturan baru-baru ini kondusif untuk pemulihan dan penguatan hak-hak masyarakat adat. Komisi juga menyatakan bahwa salah satu tujuan Penyelidikan adalah untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak masyarakat pribumi, melalui dengar pendapat publik dan kampanye media. Inkuiri Nasional dilaksanakan bekerjasama dengan Komnas Perempuan dan didukung oleh organisasi masyarakat sipil, termasuk AMAN.

Metodologi

Penyelidikan tersebut merupakan penyelidikan nasional pro-aktif pertama yang dilakukan oleh Komisi. Empat puluh kasus dipilih untuk audiensi publik di tujuh wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali - Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kasus-kasus tersebut dipilih berdasarkan wilayah dan jenis masalah kehutanan, seperti konservasi, produksi hutan, konversi ke produksi non-kehutanan dan pertambangan.

Inkuiri juga mengorganisir penelitian etnografi dan studi kebijakan, melakukan dengar pendapat publik regional dan nasional, dan kampanye pendidikan publik melalui berbagai media.

Temuan dan rekomendasi

Laporan akhir pada Maret 2016 diikuti oleh tiga buku: Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Hutan, Konflik Agraria dan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan, dan Penyelidikan Nasional Pengalaman Belajar Pembuka Jejak Penyelesaian Pelanggaran HAM.

Penyelidikan menemukan bahwa pelanggaran seringkali bersifat struktural yang sering diabaikan. Ditemukan bahwa konflik yang melibatkan masyarakat adat di kawasan yang diklaim sebagai hutan negara memiliki intensitas yang tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Hak individu dan kolektif masyarakat adat dilanggar, dengan perempuan dan anak-anak berada dalam kondisi yang paling rentan.

Komisi menemukan lima akar penyebab pelanggaran terhadap masyarakat adat, yang dimulai pada era kolonial dan berlanjut hingga saat ini:

- Kurangnya pengakuan dan status hukum sebagai masyarakat pribumi, yang membuat hak dan tuntutan hukum mereka tidak jelas atau tidak pasti.
- Penyederhanaan, di mana masalah yang dihadapi masyarakat adat terkait hak mereka atas wilayah dan sumber daya hutan dilihat oleh otoritas pemerintah hanya sebagai administratif atau legal.
- Kebijakan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi telah memprioritaskan perusahaan ekonomi besar di atas wilayah adat, dengan aparat negara dan aparat keamanan melindungi kepentingan perusahaan.
- Ketidaksetaraan hak-hak perempuan adat.
- Lowongan di lembaga yang berwenang menyelesaikan konflik, mandat untuk menyelesaikan konflik diberikan kepada pemegang izin yang memiliki konflik kepentingan.

Laporan tersebut mengusulkan tindakan segera dan membuat rekomendasi kebijakan kepada Presiden, DPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri dan instansi lainnya.

Laporan tersebut merekomendasikan agar Presiden membentuk lembaga independen di bawah kantornya untuk menangani pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat pribumi. Ia meminta Presiden untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa terkait hak-hak masyarakat adat di kawasan hutan. Laporan tersebut juga merekomendasikan agar parlemen meratifikasi RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Pribumi, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Rekomendasi rinci menargetkan kementerian, lembaga, dan aktor Pemerintah.

Menindaklanjuti

Hampir tidak ada implementasi rekomendasi. Pembela hak asasi manusia masyarakat pribumi terus ditangkap karena membela tanah ulayat mereka.

Pembelajaran dan dukungan

- Penyelidikan didirikan dan dilakukan dengan dukungan dari masyarakat adat melalui AMAN. Bermitra dengan Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil juga memperkuat proses tersebut. Penyelidikan bertujuan untuk membantu menjaga momentum untuk pengakuan

masyarakat pribumi dan hak-hak mereka, akar masalah di balik pelanggaran.

- Audiensi publik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan memberikan efek restoratif bagi masyarakat adat yang hak-haknya dilanggar. Ini adalah pendekatan inovatif untuk mempromosikan hak-hak masyarakat pribumi di Indonesia, dan secara lebih umum di Asia.
- Terlepas dari keyakinan Komisi bahwa ada iklim legislatif dan politik yang memungkinkan, rekomendasi sebagian besar diabaikan dan pelanggaran hak terhadap masyarakat adat terus berlanjut. Hasil ini menunjukkan skala tantangan, khususnya ketika kepentingan keuangan yang signifikan terlibat.

Papua

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Papua adalah sebuah wilayah di kawasan Asia-Pasifik yang berbatasan dengan Papua New Guinea, yang masyarakat pribuminya berlatar belakang Melanesia dalam lebih dari 250 kelompok bahasa pribumi.

Ketegangan antara penduduk asli Papua dan Republik Indonesia terkait dengan perjuangan masa lalu untuk dekolonisasi. Belanda menjajah wilayah itu pada tahun 1898, sebuah tambahan akhir dari wilayah Hindia Belanda yang mendahului Indonesia. Ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, status wilayah Papua tetap tidak terselesaikan. Di bawah Perjanjian New York 1962, wilayah itu akan ditransfer ke Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal sebagai UNTEA. Perjanjian tersebut juga mensyaratkan bahwa “Tindakan Pilihan Bebas” diadakan pada tahun 1969, dengan semua orang dewasa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam “tindakan penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktek internasional.”

Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan kekuasaan atas wilayah tersebut kepada Indonesia. Menjelang referendum, banyak pemimpin Papua ditahan, disiksa, diasingkan, atau dibunuh karena pasukan Indonesia menekan upaya untuk mengorganisir penentuan nasib sendiri. Pihak berwenang Indonesia membujuk pejabat PBB untuk menyetujui pemungutan suara di mana hanya 1.026 orang yang dipilih untuk mewakili rakyat Papua. Kelompok terpilih ini dengan suara bulat memilih berada di bawah kedaulatan Indonesia. Wilayah itu berganti nama menjadi Irian Barat (kemudian diubah menjadi Irian Jaya pada tahun 1973), menjadi provinsi ke-26 di Indonesia.

Penduduk asli Papua menentang status politik Papua sejak awal,

menyangkal telah ada tindakan penentuan nasib sendiri yang sebenarnya. Perlawanan berupa separatisme bersenjata, deklarasi politik, pengibaran bendera, demonstrasi damai, pengasingan ke luar negeri, perusakan properti dan penyanderaan. Penindasan militer digunakan untuk memadamkan perbedaan pendapat, menargetkan tidak hanya separatis bersenjata tetapi juga warga sipil di daerah konflik, demonstran damai dan pemimpin politik dan pribumi.

Migrasi massal dari dalam Indonesia menyebabkan persentase populasi pribumi menurun menjadi sekitar 50%. Wilayah ini juga kaya akan sumber daya mineral dan merupakan rumah bagi tambang emas terbesar dan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Tambang emas dan tembaga Grasberg milik multinasional yang sangat besar merupakan penghasil pendapatan utama bagi Indonesia, tetapi telah menjadi sumber keluhan bagi masyarakat pribumi. Masyarakat lokal telah terpinggirkan di tanah mereka sendiri dan hanya melihat sedikit manfaat dari tambang. Tambang telah menjadi sasaran konflik, dan dinas keamanan oleh militer dan polisi Indonesia semakin mempererat hubungan dengan masyarakat pribumi. Kegiatan sumber daya seperti penebangan dan perkebunan kelapa sawit juga telah mendorong migrasi dan mengambil lahan yang luas, merusak mata pencaharian berbasis hutan dari banyak penduduk asli Papua.

Sejak zaman kolonial, kebijakan dan undang-undang penggunaan lahan berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan pertanian skala besar. Sejak tahun 1960-an rezim Orde Baru memperluas kebijakan ini berdasarkan hak tunggal negara atas tanah yang “tidak dimiliki”. Hak atas tanah ulayat sebagian besar telah diabaikan. Terlepas dari kekayaan sumber daya, kemiskinan merupakan masalah utama bagi penduduk asli Papua.

Jatuhnya Presiden Soeharto yang otoriter pada tahun 1998 membawa perubahan politik yang besar di seluruh Indonesia. Sebagai upaya untuk mengatasi keluhan dan melemahkan dukungan untuk kemerdekaan, Undang-Undang Otonomi Khusus 2001 menawarkan kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar kepada orang Papua. Di atas kertas, undang-undang mengakui keluhan, seperti eksploitasi sumber daya alam dan ancaman terhadap identitas Papua, sambil tetap memastikan bahwa Papua tetap berada dalam wilayah Indonesia. Misalnya, undang-undang menetapkan bahwa 80% dari pendapatan provinsi tetap berada di provinsi, budaya Papua harus dilestarikan, dan pada tahun 2005 dibentuk Majelis Rakyat Papua. Namun, banyak orang Papua percaya bahwa janji reformasi di bawah hukum telah dilanggar. Komisi Kebenaran dan pengadilan hak asasi manusia yang direncanakan belum dibentuk di Papua; ada sedikit pengakuan atas pelanggaran di masa lalu; dan orang Papua terus merasa bahwa keberadaan, cara hidup, dan hubungan mereka dengan tanah terancam.

Dalam beberapa tahun terakhir gerakan kemerdekaan penduduk asli Papua telah meningkatkan profilnya, yang mengarah pada tindakan keras dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut. Sejarah masyarakat pribumi Papua dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka kurang dipahami di bagian lain Indonesia.

Inisiatif keadilan transisional

UU Otonomi Khusus 2001

Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 meminta Pemerintah Provinsi untuk memperkuat supremasi hukum dan keadilan dengan tiga langkah: Pengadilan HAM untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu; Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua, untuk membangun sejarah Papua dan menentukan langkah-langkah rekonsiliasi; dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia cabang Papua, yang akan memiliki fungsi pencarian kebenaran dan akuntabilitas peradilan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua tidak pernah dibentuk, begitu pula Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tanpa adanya tindakan negara, dalam dekade terakhir masyarakat sipil Papua, bersama dengan LSM internasional dan regional dan Komnas Perempuan telah melakukan berbagai inisiatif.

Empat proses pengungkapan kebenaran

01

Studi Kelompok Kerja Dokumentasi Bersama tentang kekerasan terhadap perempuan Papua sejak 1963 (2009–2010)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Perempuan pribumi Papua terus mengalami kekerasan yang meluas dan pelanggaran hak-hak mereka lainnya. Dari 2009 hingga 2010, koalisi organisasi melakukan studi tentang kekerasan terhadap perempuan Papua sejak 1963. Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan aktor-aktor kunci masyarakat sipil termasuk **International Center for Transitional Justice**/Pusat Keadilan Transisional .

Mandat

Lingkup pekerjaannya adalah:

- Melakukan pencarian fakta dan mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM berbasis gender yang dialami perempuan Papua dari tahun 1963 hingga 2009.
- Melakukan analisis kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua.
- Siapkan laporan dengan rekomendasi.

Metodologi

Lokasi dokumentasi mencakup dua provinsi yang membentuk Papua. Penelitian dimulai dengan identifikasi perempuan korban sebagai sumber informasi utama. Wawancara individu dengan perempuan difokuskan pada narasi yang menunjukkan jenis dan tingkat kekerasan, dampaknya terhadap kehidupan korban dan keluarga mereka, bagaimana korban melarikan diri dari atau mengatasi kekerasan dan dampaknya, kemampuan korban untuk bertahan hidup, dan harapan korban perempuan untuk masa depan mereka dan keluarga serta komunitas mereka. Tim mengumpulkan kesaksian dari 243 wanita dan 18 pria.

Wawancara individu dilengkapi dengan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan anggota masyarakat seperti tokoh adat, kepala desa, sesepuh di desa. Laporan hak asasi manusia dan publikasi penelitian juga dianalisis. Tim dokumentasi menganalisis informasi melalui perspektif gender dan hak asasi manusia, termasuk mengacu pada konstitusi, kebijakan dan hukum nasional, dan hukum internasional.

Pokja menghadapi tantangan penentuan prioritas mengingat jangka waktu yang panjang (1963-2009), luas dan kompleksnya masalah kekerasan terhadap perempuan Papua, wilayah geografis yang luas, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Ini memprioritaskan kasus-kasus yang: memenuhi kriteria tertentu (dampak besar; mampu menggambarkan peristiwa dalam konteks lain); dikaitkan dengan peristiwa besar; belum terungkap dalam laporan yang ada atau yang dapat melengkapi laporan ini. Kasus-kasus tersebut antara lain kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di ranah domestik (keluarga) dan publik dalam konteks industri ekstraktif, hiburan, militerisme, dan kebijakan pembangunan.

Temuan dan rekomendasi

Laporan yang berjudul *Cukup Sudah!*, memberikan catatan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan adat, serta kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan hubungan antara kekerasan berbasis gender di ruang publik dan pribadi. Laporan tersebut memiliki lima temuan utama:

- Pendekatan keamanan negara mengutamakan kekerasan untuk melumpuhkan lawan, tanpa sanksi berat bagi pelaku pelanggaran HAM, termasuk kekerasan terhadap perempuan.
- Diskriminasi terhadap perempuan di Papua melanggengkan kekerasan terhadap mereka.
- Konflik sumber daya alam, konflik politik, dan perebutan kekuasaan dari tingkat lokal hingga nasional meningkatkan kekerasan negara dan kekerasan dalam rumah tangga.

- Tidak ada respons atau kemauan politik yang serius dari Pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua, atau masalah kekerasan terhadap perempuan pada khususnya.
- Lapisan trauma dan ketidakberdayaan yang tumpang tindih tidak diatasi, sehingga menimbulkan siklus viktimisasi/korban yang berulang-ulang.

Laporan tersebut memberikan rekomendasi rinci kepada Pemerintah Pusat dan provinsi, militer dan polisi, Komnas Perempuan, Komnas HAM, DPR di tingkat provinsi, kabupaten dan lokal, MPR, lembaga agama, suku pemimpin, organisasi masyarakat sipil, media, dan perusahaan swasta dan investor.

Menindaklanjuti

Pada tahun 2011, Majelis Rakyat Papua dan parlemen Papua menanggapi laporan tersebut dengan pemungutan suara untuk membentuk komisi provinsi untuk mengakui pengalaman kekerasan perempuan Papua dan memberikan bantuan mendesak. Namun, undang-undang tersebut belum dilaksanakan.

Pembelajaran dan dukungan

- Terobosan proses pengungkapan kebenaran ini berfokus pada perempuan pribumi, yang seringkali terpinggirkan dan dibungkam secara efektif ketika hak-hak mereka dilanggar.
- Kemitraan penting termasuk perwakilan perempuan adat di Majelis Rakyat Papua, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan LSM keadilan transisional internasional terkemuka.
- Penelitian memanfaatkan keahlian gender yang kuat, terutama melalui Komisi Nasional, dan melihat secara luas akar penyebab dan implikasi kekerasan terhadap perempuan adat.
- Proses tersebut mengkaji kekerasan baik di ranah publik maupun domestik, mengakui keterkaitan antara keduanya - ini merupakan langkah lebih jauh dalam mengkaji kekerasan berbasis gender daripada yang dilakukan banyak komisi kebenaran pasca-konflik.
- Kelompok Kerja Dokumentasi menggambarkan temuan mereka sebagai “puncak gunung es” tetapi percaya bahwa temuan tersebut mewakili dampak kekerasan terhadap perempuan asli Papua.
- Mengamankan tindakan atas masalah yang telah lama disebabkan dan diabaikan oleh negara merupakan tantangan besar. Perempuan adat di Papua terus menghadapi masalah kekerasan.

02 Kemitraan pengungkapan kebenaran masyarakat sipil (2011)

Latar belakang

Pada tahun 2010, setelah laporan **Enough is Enough**, Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM), sebuah LSM hak asasi manusia Papua terkemuka, bermitra dengan Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi untuk melakukan pencarian kebenaran dalam kerangka keadilan transisional.

Mandat

Melihat gagalnya pelaksanaan komisi kebenaran sebagaimana diserukan dalam UU Otsus, muncul proses pencarian kebenaran oleh masyarakat sipil untuk mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran dari tahun 1960-an hingga pasca 1998.

Organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi ganda dalam perdebatan tersebut: pertama, menerapkan kerangka keadilan transisional untuk meninjau sejarah Papua baru-baru ini, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus dan prospek penyelesaian konflik yang berkelanjutan; kedua, untuk mengumpulkan kesaksian untuk menunjukkan realitas dan dampak dari pelanggaran masa lalu terhadap orang asli Papua dan untuk mempelajari keinginan mereka tentang cara mengatasinya.

Metodologi

Peneliti mengumpulkan kesaksian dari 108 orang selama tiga bulan proses pengambilan pernyataan di tingkat kabupaten. Empat lokasi dipilih karena tingkat konflik dan pelanggaran HAM yang relatif tinggi di masa lalu. Para peneliti berfokus pada pengumpulan kesaksian dari perempuan adat. Kesaksian ini merinci 749 pelanggaran terhadap 312 laki-laki dan 56 perempuan. Mereka juga mengumpulkan bukti, termasuk foto maupun catatan, dan mengumpulkan informasi sekunder (seperti laporan ELSHAM) untuk memberikan konteks dan pembuktian.

Tim peneliti menyadari bahwa jumlah korban yang diwawancarai tidak mencerminkan tingkat keparahan atau kuantitas pelanggaran, melainkan kombinasi faktor: keterampilan pewawancara, rasa aman dan risiko korban, dan medan geografis yang menantang.

Temuan dan rekomendasi

Laporan berjudul *Masa Lalu Yang Belum Berlalu: Pelanggaran HAM di Papua Sebelum dan Setelah Reformasi*, diterbitkan pada tahun 2012. Laporan tersebut mengorganisasikan temuan-temuannya ke dalam tiga periode:

- 1960–1969: sebelum referendum Undang-Undang Pilihan Bebas.
- 1969–1998: periode antara PEPERA dan berakhirnya rezim Soeharto.
- Setelah 1998: era reformasi yang dikenal dengan “Reformasi”.

Pencarian kebenaran sebagian besar terfokus pada pelanggaran hak-hak sipil dan politik, khususnya kekerasan serius terhadap tubuh. Laporan tersebut menemukan bahwa upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakpuasan orang Papua telah difokuskan hampir secara eksklusif pada pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial. Ini belum secara efektif menangani penyalahgunaan dan pelanggaran oleh pasukan militer Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Kemarahan dan kebencian yang dirasakan orang Papua tentang masa lalu telah diintensifkan oleh kurangnya minat dari lembaga-lembaga pemerintah.

Penelitian menunjukkan bahwa luka mendalam yang disebabkan oleh pelanggaran di masa lalu masih belum sembuh dan menunjukkan perlunya upaya keadilan transisional yang komprehensif, termasuk pencarian kebenaran, pertanggungjawaban pidana, reparasi, reformasi kelembagaan dan fokus pada hak-hak perempuan. Para korban jelas dan tegas bahwa mereka ingin mengetahui kebenaran dan mereka ingin pelaku bertanggung jawab. Laporan tersebut membuat rekomendasi luas untuk pengungkapan kebenaran lebih lanjut dan proses keadilan transisional lainnya.

Menindaklanjuti

Hanya ada sedikit tindak lanjut dari negara. Dalam satu dekade sejak laporan tersebut, organisasi masyarakat sipil asli Papua bersama dengan LSM HAM regional, Asia Justice and Rights, telah melakukan serangkaian program dan laporan pencarian kebenaran.

Pembelajaran dan dukungan

- Dengan tidak adanya tindakan dari pemerintah, kemitraan masyarakat sipil

- ini mempertahankan momentum dengan mengangkat suara para korban pribumi dan mengusulkan jalan ke depan.
- Kemitraan kreatif antara dua LSM terkemuka, satu lokal dan satu internasional, menerapkan kerangka keadilan transisional untuk krisis hak asasi manusia pribumi. Laporan akhir menekankan elemen keadilan transisional, dengan sedikit mengacu pada UNDRIP sebagai kerangka kerja.
 - Beberapa korban tidak dapat diwawancarai karena khawatir akan trauma atau ancaman emosional.
 - Daerah pegunungan di tiga kabupaten merupakan tantangan untuk terlibat dengan masyarakat pribumi.
 - Peneliti mengandalkan jaringan lokal pemimpin adat, gereja, dan kelompok korban untuk memperkenalkan dan meningkatkan perlindungan responden.

03

Pokja Perempuan Papua: penelitian aksi partisipatif kekerasan terhadap perempuan (2013–2018)

Latar belakang

Pada tahun 2013, Elsham membentuk Kelompok Kerja Perempuan Papua (**PWG**), yang beranggotakan lima LSM Papua. **PWG (Papuan Women's Working Group)** bermitra dengan LSM regional Asia Justice and Rights (AJAR) untuk melakukan penelitian tindakan partisipatif. Selama enam tahun, 249 perempuan Pribumi mengambil bagian dalam tiga siklus penelitian.

Peserta termasuk petani subsisten; pedagang kecil hasil kebun; penenun tas tradisional (noken); janda dan ibu tunggal; penyintas kekerasan; perempuan yang tinggal di daerah perbatasan, transmigrasi dan perkebunan; dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Di setiap lokasi, fasilitator membangun hubungan dan jaringan

yang sudah ada yang dibina oleh gereja dan LSM lokal.

Mandat

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Memperkuat suara perempuan korban kekerasan.
- Untuk melawan impunitas dengan tindakan lokal yang praktis.
- Memperkuat pemahaman tentang penyebab sosial-ekonomi dan dampak kekerasan yang dialami oleh perempuan adat.

Metodologi

Kelompok ini mengambil pendekatan bertahap untuk penelitian partisipatif selama enam tahun, menerapkan pelajaran dan mengembangkan pendekatan dengan perempuan Pribumi saat pekerjaan berlangsung. Proses ini dilengkapi dengan tinjauan literatur, pembuatan video dokumenter, dan konsultasi dengan para ahli. Tiga fase pekerjaan itu adalah:

- Mengembangkan perangkat penelitian tindakan partisipatif dengan para penyintas (2013–2014). Pada Juli 2013, AJAR dan ELSHAM Papua mengembangkan metodologi dengan 11 korban kekerasan selama enam bulan kerja lapangan.
- Memetakan tantangan sosial ekonomi perempuan pribumi (2015–2016). Untuk memperkuat data, **PWG** memetakan pelanggaran dan tantangan terkait hak sosial, ekonomi, dan budaya di lima lokasi.
- Mengorganisir aksi dan advokasi (2015–2018)

Setelah temuan pelanggaran sistematis dan meluas, **PWG** bekerja dengan perempuan Papua di empat wilayah untuk meneliti konflik sumber daya alam, migrasi internal, kekerasan negara dan rumah tangga, dan bentuk-bentuk kemiskinan perkotaan yang muncul. **PWG** kemudian memulai penelitian aksi dengan perempuan di sepanjang perbatasan dengan Papua New Guinea dan di dalam perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2018, PWG melakukan siklus penelitian tindakan lagi di empat wilayah lagi.

Dalam semua fase, penelitian ini mengadaptasi metode dari manual AJAR, Stone & Flower: **A Guide for Understanding and Action for Women**/Suatu Pedoman untuk Memahami dan Bertindak bagi Perempuan, untuk mengembangkan alat untuk bekerja dengan perempuan Papua. Inti dari metode ini adalah penciptaan ruang aman bagi perempuan adat untuk berkumpul dan berbagi pengalaman kekerasan, trauma, dan impunitas. Latihan bertujuan untuk memperkuat pemahaman para penyintas perempuan, memberdayakan mereka, memfasilitasi proses penyembuhan kolektif, dan membangun solidaritas dan jaringan di antara para

peserta. Karena topik bisa traumatis dan sensitif, alat yang menguatkan kehidupan membantu perempuan yang selamat berbagi satu sama lain, memberikan ruang untuk refleksi diri dan saling mendukung untuk bertindak.

PWG menggabungkan konteks Papua ke dalam pendekatan ini, menggunakan bahasa lokal, metafora, simbol alam, dan keterampilan. Contoh alat partisipatif meliputi:

- Batu dan bunga: Peserta diundang untuk memilih batu atau bunga untuk menggambarkan apakah ada hak atas kebenaran, keadilan, penyembuhan, dan kehidupan yang bebas dari kekerasan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat mereka. Alasan mereka memilih batu (jika negatif) atau bunga (jika positif) dibahas.
- Timeline: Menggunakan timeline untuk memahami kekerasan yang dialami perempuan sebelum, selama, dan setelah konflik, para peserta menyusun sejarah kolektif dengan perspektif yang lebih luas.
- Pemetaan komunitas: Peserta menggambar peta komunitas mereka, menyoroti rumah, infrastruktur, lokasi pelanggaran, dan fitur kelangsungan hidup mereka (sumber air dan makanan), kesehatan, dan pendidikan. Mereka juga mengidentifikasi hambatan untuk mengamankan kebutuhan dasar ini.
- Pemetaan sumber daya: Perempuan menggambarkan satu sama lain sumber mata pencaharian mereka dan bagaimana mereka telah berubah dari waktu ke waktu, mencerminkan bagaimana konflik telah mempengaruhi mata pencaharian mereka. Proses ini memperdalam pengetahuan perempuan tentang risiko dan kendala yang mereka hadapi serta cara untuk mengakses layanan saat ini dan mencari dukungan yang dibutuhkan.
- Pemetaan tubuh: Meminjam dari gerakan kesehatan perempuan, peta tubuh membantu perempuan mengidentifikasi masalah kesehatan yang mendesak dan mendiskusikan ketersediaan layanan kesehatan. Latihan ini juga memungkinkan perempuan untuk mendiskusikan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada selembar kertas besar, wanita menggunakan warna yang berbeda untuk menandai bagian tubuh yang sakit dan bahagia sebelum membahasnya.
- Foto bercerita: Fasilitator mengunjungi rumah perempuan untuk membuat cerita foto tentang kehidupan mereka, termasuk penjelasan tentang lokasi dan objek yang memiliki arti khusus bagi mereka.
- Kotak memori: Setiap peserta mengisi sebuah kotak dengan benda-benda yang mewakili kenangan manis atau pahit dan menulis sebuah cerita di kartu pos tentang hidupnya. Setelah seminggu atau lebih mengisi kotak, setiap peserta secara bergiliran membuka kotaknya dan menjelaskan isinya kepada kelompok.

Temuan dan rekomendasi

Pada tahun 2015, setelah tahap penelitian pertama, temuan tersebut disusun dalam

sebuah laporan berjudul **Enduring Impunity: Women Surviving Atrocities in the Absence of Justice**/Wanita yang Selamat dari Kekejaman Tanpa Keadilan. Diterbitkan bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, laporan ini menceritakan kisah 60 perempuan di seluruh Indonesia yang berfokus pada pelanggaran hak-hak sipil dan politik mereka. Selain Papua, wilayah konflik masa lalu yang dilaporkan adalah Aceh, Yogyakarta, Kupang dan Pulau Buru. Pada tahun 2017, kembali bersama Komnas Perempuan, PWC meluncurkan laporan naratif dan video berdasarkan cerita dari 170 perempuan adat.

Pada 2019, AJAR dan **PWC** menerbitkan laporan **This is Me. I Am Here**/Ini Saya, Saya Di Sini menyusun tema dan temuan setelah enam tahun penelitian tindakan partisipatif. Laporan tersebut menemukan bahwa meskipun 18 tahun otonomi khusus di Papua, banyak perempuan adat masih jauh dari manfaat pembangunan dan menghadapi berbagai bentuk kekerasan. Dampak pelanggaran telah meluas selama bertahun-tahun dan, selama beberapa dekade. Temuan utama adalah:

- Kekerasan terhadap perempuan Papua terus berlanjut; janji untuk tidak mengulangi kekerasan tidak terpenuhi. Kekerasan terhadap perempuan di Papua adalah masalah kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia yang kritis, seperti yang telah ditunjukkan oleh penyelidikan sebelumnya. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan negara (seperti konflik sumber daya alam dan tanah adat, dan kekerasan seksual terkait konflik politik), serta kekerasan dan diskriminasi yang dialami anak-anak. Perempuan berbicara tentang kekerasan di masa lalu, dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan dan kesejahteraan sosial ekonomi mereka, dan dampak dari kekerasan politik dan rumah tangga yang sedang berlangsung.
- Dampak jangka panjang dari penyangkalan, pengabaian, dan diskriminasi berbasis gender membuat perempuan semakin rentan terhadap marginalisasi, kesehatan yang buruk, dan kemiskinan ekstrem. Situasinya lebih buruk ketika mereka tidak memiliki akses ke tanah atau kepemilikan, sering hilang karena konflik. Stigma terhadap korban kekerasan berbasis gender bersifat lintas generasi, dengan anak-anak mengalami dampak negatifnya.
- Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya semakin menghambat kemampuan perempuan untuk mengakses keadilan. Sebagian besar peserta telah mengalami pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial yang menambah pengalaman kekerasan mereka. Penghancuran properti, kurangnya akses ke tanah dan mata pencaharian, dan pengucilan dari pendidikan, pekerjaan dan layanan dasar bergabung untuk melemahkan kesejahteraan mereka.
- Janda dan ibu tunggal sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Para janda seringkali ditolak oleh keluarga suaminya, sehingga

menyebabkan hilangnya tempat tinggal dan hak waris yang menjadi penghambat akses permodalan dan pelayanan sosial. Ibu tunggal juga sering dikucilkan oleh komunitas mereka dan anak-anak mereka menghadapi hambatan pendidikan, menjerat mereka dalam lingkaran kemiskinan.

- Perempuan korban membutuhkan program untuk menangani insiden kritis, serta dukungan trauma jangka panjang, untuk membangun kembali kehidupan yang bebas dari kekerasan. Perempuan korban kekerasan, baik oleh negara maupun pasangannya, menghadapi tantangan berat dalam upaya mengatasi dampak kekerasan. Kebutuhan perempuan korban tetap tidak terlihat dalam kebijakan dan perencanaan jangka panjang, dengan sedikit sumber daya yang diarahkan untuk mengatasi dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap perempuan. Pengabaian resmi terhadap perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia menandakan keengganan untuk membahas masa lalu.
- Kurangnya penguasaan atas sumber daya alam dan tanah tradisional menghambat pemberdayaan perempuan dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan yang berkelanjutan. Akses terhadap sumber daya alam dan lahan telah menyusut, mengurangi akses perempuan terhadap lahan, kebun atau hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ini adalah dampak dari konflik kekerasan, kebijakan penggunaan lahan negara, norma sosial yang merugikan, atau kombinasi dari semuanya. Hilangnya sumber daya alam dan tanah berdampak langsung pada kelangsungan hidup, dan memaksa banyak korban untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan sumber daya yang jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Para peserta menyebut akses dan pengelolaan lahan sebagai sumber utama kekuatan dan kelangsungan hidup. Konversi hutan menjadi perkebunan atau tujuan lain berdampak besar pada kondisi sosial masyarakat Adat Papua.
- Kesehatan perempuan Papua yang buruk, karena beban kerja yang berat dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan, menghambat upaya pemulihan dari kekerasan. Mereka harus bersaing tidak hanya dengan konsekuensi kesehatan dari kekerasan, tetapi dengan masalah kesehatan yang terkait dengan kemiskinan dan perjuangan untuk bertahan hidup. Kekerasan dari negara atau pasangan intim, dan masalah kesehatan yang terkait dengan pekerjaan, kemiskinan, dan ketidakberuntungan gender, diperparah dalam siklus berbahaya, yang semakin memperburuk hambatan untuk mengakses layanan.
- Perempuan Papua korban kekerasan menghadapi hambatan dukungan dan layanan. Tidak ada layanan atau program yang tersedia bagi perempuan yang trauma dengan kekerasan politik. Stigma sosial mempengaruhi korban kekerasan dalam rumah tangga, membuat beberapa orang terlalu malu untuk mencari bantuan. Ketika perempuan memang menginginkan akses

ke layanan kesehatan, dukungan psikososial, perlindungan, atau proses peradilan, hanya sedikit layanan yang tersedia.

- Perempuan Papua menghadapi hambatan dalam menuai manfaat dari pembangunan yang dapat membantu mereka membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan yang bebas dari kekerasan. Kerugian sosial ekonomi mereka meningkatkan kerentanan mereka dan melemahkan kemampuan mereka untuk sembuh setelah kekerasan dan konflik. Perempuan Papua kekurangan informasi dan jarang dapat berpartisipasi dalam konsultasi tingkat desa, pertemuan perencanaan dan diskusi tentang program pembangunan.
- Perempuan Papua tidak memiliki akses ke pasar dan tidak mendapatkan perlindungan untuk produk lokal mereka. Pedagang berjuang untuk bersaing dengan pedagang migran dari bagian lain Indonesia, dan semakin terpinggirkan di pasar, baik secara fisik maupun ekonomi. Mereka menghadapi tantangan dalam menemukan transportasi yang terjangkau dan andal, tidak dapat mengamankan tempat yang aman dan strategis untuk menjual barang mereka, dan menghadapi tantangan dalam mengakses permodalan dan kredit.
- Perempuan Papua bekerja keras untuk membayar uang sekolah, dan mereka yang berada di lokasi yang lebih terpencil mengeluhkan kurangnya sekolah di atau dekat desa mereka.

Pembelajaran dan dukungan

- PWC mengembangkan kerangka kerja untuk pemulihan dan penguatan perempuan adat. Kerangka kerja ini mengupayakan pemulihan perempuan Papua korban kekerasan, dan pembangunan kembali kehidupan dan komunitas mereka, tanpa hanya berfokus pada hasil peradilan. Ia menganggap perempuan adat secara holistik dan sebagai agen perubahan yang aktif.
- Metode penelitian partisipatif memberi perempuan cara untuk berbagi pengalaman dan cerita dalam kelompok kecil yang menawarkan solidaritas dan dukungan. Metodologi interaktif ini sangat berbeda dari pengambilan pernyataan di banyak komisi kebenaran. Pemulihan, penyembuhan, dan penguatan perempuan Pribumi dibangun ke dalam proses pengungkapan kebenaran. Meskipun pendekatan ini mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya, pendekatan ini juga dapat mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam dari perempuan pribumi yang terpinggirkan, dan memberi mereka manfaat yang tidak dimiliki oleh pengungkapan kebenaran itu sendiri.
- Pada saat yang sama, transformasi di tingkat komunitas tidak dapat menyelesaikan semua masalah dan tidak seharusnya bertujuan. Pemerintah, lembaga adat dan agama, komunitas internasional, dan

- masyarakat sipil harus membuat komitmen dan menyediakan sumber daya di setiap tingkat untuk membuat perubahan yang nyata dan langgeng.
- Diskusi di antara perempuan mendorong percakapan yang lebih luas dalam keluarga dan masyarakat, mendorong dan memungkinkan perubahan yang lebih luas.
 - Dengan membangun metodologi penelitian tindakan partisipatif selama periode enam tahun, metode, fokus penelitian dan hubungan dapat beradaptasi dan berkembang.
 - Kemitraan adalah kunci dari proses tersebut, dengan jaringan informal organisasi perempuan adat dan AJAR, serta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Di setiap lokasi, fasilitator juga membangun relasi dan jaringan yang dibina oleh gereja dan LSM lokal yang bekerja di daerah tersebut.

04 Penelitian dan laporan perempuan adat tentang tanah, hutan, dan sumber daya (2019–2020)

Latar belakang

Seperti dijelaskan, kekuatan luar telah lama mengeksploitasi sumber daya alam Papua. Pola ekstraksi sumber daya yang tidak berkelanjutan, termasuk konversi hutan menjadi perkebunan komersial, tidak hanya terjadi di Papua di seluruh Indonesia. Namun, di Papua, pendekatan militerisasi dan ekstraksi sumber daya Indonesia telah diterapkan dengan lapisan rasisme dan kekerasan yang bahkan melampaui yang dikenakan pada masyarakat adat di tempat lain di negara ini.

Dampak-dampak tersebut telah menempatkan beban yang sangat berat bagi perempuan Papua, yang telah disingkirkan dan menjadi korban oleh Pemerintah, perusahaan, migran, dan komunitas mereka sendiri. Skala pembebasan dan konversi lahan di Papua sangat masif. Organisasi masyarakat sipil telah mendokumentasikan setidaknya 21 perkebunan yang terlibat dalam deforestasi 2,6 juta hektar lahan. Namun, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan tentang dampak pengadaan tanah yang besar pada masyarakat adat Papua, khususnya perempuan.

Mandat

Meski banyak kelompok yang bergerak di bidang konservasi dan hak masyarakat adat atas sumber daya alam, suara perempuan Papua tetap tidak terdengar. Kelompok Kerja Perempuan Papua (**PWG**) dan **Asia Justice and Rights (AJAR)** menyusun proyek penelitian untuk mendengarkan dan mendukung perempuan adat yang terkena dampak pembebasan lahan besar-besaran di Papua. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas untuk memahami dan mengartikulasikan akar penyebab dan dampak akuisisi melalui penelitian tindakan partisipatif. Pengetahuan praktis yang mereka hasilkan akan membantu perempuan adat mengadvokasi perubahan.

Pengerjaan juga dilakukan untuk mempersiapkan berakhirnya UU Otsus. Perempuan pribumi tidak dilibatkan dalam negosiasi awal, dan penelitian bertujuan untuk membantu mereka berbicara tentang dampak negatif undang-undang tersebut, seperti dengan menyerukan penilaian terhadap pola rasisme, seksisme, dan kekerasan berbasis gender, yang meningkat di bawah 20 tahun Otonomi Khusus.

Metodologi

Tim peneliti mengadakan diskusi kelompok terfokus di lima komunitas, mengundang tokoh adat laki-laki dan perempuan, pemerintah daerah dan lain-lain. Tim menjelaskan tujuan penelitian, memperoleh wawasan tentang isu-isu sosial dan mengidentifikasi fasilitator dan peserta potensial untuk penelitian berbasis masyarakat.

Berdasarkan konsultasi ini, **PWG** mengadaptasi perangkat penelitian aksi partisipatif yang diuraikan dalam manual, Stone and Flower: Panduan untuk memahami dan bertindak bagi perempuan yang selamat. Tim mengembangkan tujuh kegiatan untuk terlibat dalam latihan mendengarkan secara mendalam tentang pengalaman perempuan adat yang terkena dampak konflik lahan dan sumber daya alam. Mereka berusaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan perempuan sebelum konflik, hubungan mereka

dengan dan pengetahuan tentang tanah, dan dampak konflik.

Di penghujung tahun 2019, **PWG** dan **AJAR** melakukan penelitian partisipatif selama beberapa bulan dengan 100 perempuan adat di lima lokasi di provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka memilih wilayah dengan konflik sumber daya alam, termasuk wilayah di mana perkebunan kelapa sawit telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun, serta wilayah dengan rencana pembebasan lahan untuk proyek pembangunan.

Penelitian berfokus pada dampak perampasan tanah dan hilangnya hutan, dan bagaimana perempuan adat mengatasi dan melawan ancaman ini. Tim menyelenggarakan lokakarya komunitas dengan para pemimpin dan perempuan lokal, sebagai videografer yang mendokumentasikan momen-momen penting dan wawancara lanjutan. Ketika pandemi melanda pada tahun 2020, pekerjaan diselesaikan dari jarak jauh.

Karena topiknya luas dan dipandang sebagai “bukan urusan perempuan”, **PWG** dan **AJAR** merancang penelitian menggunakan perangkat partisipatif antar generasi yang menyenangkan dan bermakna, memfasilitasi pembelajaran dan tindakan bersama perempuan. Melalui proses tersebut mereka mencoba mengubah kehidupan para wanita yang berbagi waktu dan cerita mereka. Penelitian dan pelaporan ini dibangun di atas enam tahun penelitian aksi partisipatif, yang dijelaskan di atas, berfokus pada kekerasan terhadap perempuan asli Papua.

Temuan dan rekomendasi

Pada Maret 2021, **PWG** dan **AJAR** menerbitkan laporan setebal 200 halaman, *Semua Burung Hilang: Perempuan Adat Berbicara Menentang Hilangnya Hutan di Papua*. PWG dan AJAR juga membuat buku saku untuk menginformasikan perempuan adat tentang peluang advokasi untuk melindungi tanah dan hutan mereka.

Di penghujung tahun 2019, **PWG** dan **AJAR** melakukan penelitian partisipatif selama beberapa bulan dengan 100 perempuan adat di lima lokasi di provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka memilih wilayah dengan konflik sumber daya alam, termasuk wilayah di mana perkebunan kelapa sawit telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun, serta wilayah dengan rencana pembebasan lahan untuk proyek pembangunan.

Penelitian berfokus pada dampak perampasan tanah dan hilangnya hutan, dan bagaimana perempuan adat mengatasi dan melawan ancaman ini. Tim menyelenggarakan lokakarya komunitas dengan para pemimpin dan perempuan lokal, sebagai videografer yang mendokumentasikan momen-momen penting

dan wawancara lanjutan. Ketika pandemi melanda pada tahun 2020, pekerjaan diselesaikan dari jarak jauh.

Karena topiknya luas dan dipandang sebagai “bukan urusan perempuan”, **PWG** dan **AJAR** merancang penelitian menggunakan perangkat partisipatif antar generasi yang menyenangkan dan bermakna, memfasilitasi pembelajaran dan tindakan bersama perempuan. Melalui proses tersebut mereka mencoba mengubah kehidupan para wanita yang berbagi waktu dan cerita mereka. Penelitian dan pelaporan ini dibangun di atas enam tahun penelitian aksi partisipatif, yang dijelaskan di atas, berfokus pada kekerasan terhadap perempuan asli Papua.

Pembelajaran dan dukungan

- Kemitraan antara organisasi Pribumi dan **AJAR** ini dibangun di atas penelitian dan advokasi pencarian kebenaran bersama selama bertahun-tahun, menerapkan dan mengadaptasi pelajaran tentang metodologi dan kerja bersama.
- Inisiatif ini mendokumentasikan penelitian dan kesaksian partisipatif tentang pelanggaran, sambil membangun kapasitas perempuan adat untuk mengadvokasi hak-hak mereka. Dibutuhkan pendekatan yang praktis dan strategis untuk memberdayakan korban.
- Aksi masyarakat sipil tentang pengungkapan kebenaran masyarakat pribumi ini sebagian besar terjadi tanpa adanya komitmen dan tindakan negara dan pemerintah. Meskipun penting dalam dirinya sendiri, kegiatan tersebut tidak dapat menggantikan tindakan resmi

Bougainville

Latar belakang

Bougainville terdiri dari dua pulau utama di wilayah Pasifik, dengan populasi sekitar 200.000 yang berbicara dalam 21 bahasa berbeda dan 39 dialek, dan dengan keragaman budaya yang cukup besar di dalam dan di antara kelompok bahasa.

Secara geografis, budaya, dan bahasa bagian dari rantai Kepulauan Solomon, Bougainville menjadi bagian dari Papua New Guinea sebagai kecelakaan pembuatan peta kolonial abad ke-19. Kontak dekat Bougainville dengan dunia luar dan integrasinya ke Papua New Guinea baru-baru ini. Pos administrasi kolonial permanen pertama didirikan pada tahun 1905. Hubungan sering bermasalah antara Bougainville dan otoritas kolonial pusat, dimulai dengan New Guinea Jerman hingga 1914, diikuti oleh New Guinea yang dikelola Australia dari 1914 hingga 1946, kontrol Angkatan Darat Jepang dari 1942 hingga 1945, dan Wilayah Papua dan New Guinea yang dikelola Australia sampai tahun 1975.

Ketika Papua New Guinea memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975, Bougainville mendeklarasikan kemerdekaan sebagai negara yang terpisah. Namun, ia tidak menerima pengakuan internasional dan tetap menjadi bagian dari Papua New Guinea dengan kekuasaan pemerintahan sendiri yang terbatas.

Pada tahun 1988, keluhan ini memicu kekerasan baik antara pemerintah Papua New Guinea dan Bougainville dan antara faksi-faksi bersenjata Bougainville, yang mengarah ke perang saudara hingga tahun 1997. Jumlah korban tewas mencapai 20.000, atau 10% dari populasi, dengan laporan pembantaian, pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, pemerkosaan massal dan penghilangan paksa. Pada tahun 2001, Perjanjian Perdamaian Bougainville memberi amnesti kepada para pejuang, dan tidak menerapkan

mekanisme penyelidikan atau keadilan transisi.

Dampak jangka panjang dari kejahatan terhadap masyarakat termasuk tingginya tingkat trauma yang tidak diobati, kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan zat, dan kerusakan nilai-nilai budaya, hubungan dan kesejahteraan pada generasi pascaperang.

Aksi sejak perjanjian damai

Tujuh tahun setelah perjanjian damai, pemerintah Bougainville menyerukan komisi kebenaran, tetapi rencana itu dibatalkan karena terlalu berisiko karena permusuhan dari mantan pejuang. Pada tahun 2014, pemerintah mulai memberikan bantuan kepada keluarga yang mencari mereka yang hilang selama konflik tetapi tidak mendukung tindakan keadilan atau kompensasi.

Dorongan untuk merdeka dari “daratan” berasal dari perbedaan budaya dan keluhan terkait pertambangan. Sebuah tambang tembaga yang dimiliki bersama oleh perusahaan multinasional Rio Tinto dan pemerintah Papua New Guinea mulai memproduksi pada tahun 1972, tetapi hanya 1% dari pendapatan yang diberikan kepada masyarakat Bougainville. Klaim diskriminasi rasial, penganiayaan pekerja dan degradasi lingkungan memperburuk kebencian. Selama konflik, banyak komunitas melakukan proses rekonsiliasi lokal, menggunakan campuran praktik adat dan Kristen. Upaya-upaya ini dipuji karena membantu masyarakat menciptakan “zona damai”, sambil membangun tekanan pada kombatan untuk bergabung dalam proses perdamaian. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivis perempuan dan pemuda dan Uskup Katolik Bougainville telah menyerukan proses pengungkapan kebenaran untuk membantu orang dan komunitas sembuh.

Pembelajaran dan dukungan

- Meskipun menuntut proses pengungkapan kebenaran, kondisi aman dapat memakan waktu lama setelah konflik bersenjata, seperti yang ditunjukkan oleh perlawanan mantan pejuang di Bougainville.
- Selama konflik, praktik rekonsiliasi lokal, berdasarkan praktik adat tradisional, terbukti lebih bermanfaat daripada inisiatif terpusat.
- Sebagian besar pemimpin Bougainville melihat membangun hubungan antara kekuatan adat dan negara sebagai hal yang penting untuk mengembangkan struktur negara yang berkelanjutan.

Filipina

Mindanao: Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi Transisi (2014–2016)

Latar belakang proses pencarian kebenaran

Filipina selatan adalah rumah bagi banyak suku etnolinguistik, 13 di antaranya diislamkan, sementara 32 lainnya diakui sebagai masyarakat adat Mindanao, atau Lumad. Masyarakat pribumi membentuk 5% dari populasi Filipina selatan.

Konflik muncul dari ketegangan historis antara kelompok minoritas Muslim dan Pribumi di pulau selatan Mindanao, dan mayoritas penduduk Kristen di Filipina secara keseluruhan. Islam tiba di Mindanao pada abad ke-14, 200 tahun sebelum penjajah Katolik Spanyol. Ketika Amerika Serikat mengambil alih kekuasaan kolonial pada tahun 1898, hal itu mendorong pemukiman orang-orang Kristen ke pulau yang subur dan kaya sumber daya, menggusur penduduk Muslim dan pribumi setempat sampai, pada tahun 1960-an, mereka menjadi minoritas di tanah air mereka sendiri.

Perjuangan bersenjata untuk sebuah negara merdeka dimulai pada tahun 1969. Konflik berkecamuk selama lebih dari 40 tahun sampai Perjanjian Perdamaian Komprehensif tentang Bangsamoro ditandatangani pada tahun 2014.

Selama konflik, diperkirakan 40.000 orang kehilangan nyawa mereka, dengan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan dampak yang sangat menghancurkan pada masyarakat adat Lumad. Banyak Lumad yang terjebak di tengah konflik, menjadi sasaran militerisasi

dalam komunitas mereka serta menjadi sasaran pembunuhan dan penyiksaan di luar proses hukum. Ribuan orang mengungsi saat melarikan diri dari kekerasan. Banyak penduduk asli yang menjadi korban pembunuhan ekstra-yudisial adalah penentang penting pertambangan, perkebunan kelapa sawit, korupsi, dan pelanggaran pemerintah.

Pada tahun 2016 pihak sepakat untuk gencatan senjata terbuka. Otoritas Transisi Bangsamoro (**The Bangsamoro Transition Authority**) didirikan pada tahun 2019 dengan tugas mengelola transisi tiga tahun. Kesepakatan damai bertumpu pada empat pilar pelengkap, yang seharusnya memiliki prioritas yang sama: pengaturan keamanan, pembangunan sosial-ekonomi, langkah-langkah membangun kepercayaan, dan keadilan transisional dan rekonsiliasi. Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi Transisi/ **The Transitional Justice and Reconciliation Commission (TJRC)** dibentuk, badan resmi pertama yang diberi mandat untuk memeriksa kebenaran dan mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi di antara komunitas Mindanao yang terpecah.

Mandat

TJRC diberi mandat untuk melakukan studi dan membuat rekomendasi untuk mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi masyarakat yang terkena dampak konflik. Itu ditugaskan untuk mengusulkan mekanisme yang tepat:

- Untuk mengatasi keluhan yang sah dari orang-orang Bangsamoro.
- Untuk mengoreksi ketidakadilan sejarah.
- Untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk marginalisasi melalui perampasan tanah.

TJRC dapat merekomendasikan intervensi segera untuk mendukung rekonsiliasi dan penyembuhan luka fisik, mental, dan spiritual. Ini juga dapat merekomendasikan langkah-langkah untuk mengatasi penyebab konflik dan untuk mencegah terulangnya konflik tersebut.

TJRC menekankan bahwa itu “bukan ‘komisi kebenaran’ atau badan pencari fakta resmi ad hoc; itu adalah komisi independen yang diberi mandat untuk membuat laporan dan mengusulkan langkah-langkah holistik untuk menangani warisan masa lalu.” Badan tersebut lebih memilih istilah “berurusan dengan masa lalu” daripada “keadilan transisional”, karena dilaporkan bahwa menangani masa lalu adalah pekerjaan semua masyarakat, bukan hanya profesional hukum.

Metodologi

TJRC mengembangkan proses multi-cabang dalam pencarian kebenarannya. Sebuah

“proses mendengarkan” mendukung pengungkapan kebenaran, upaya resmi pertama untuk menjangkau berbagai komunitas yang terkena dampak konflik di Mindanao. TJRC mendengar dari lebih dari 3.000 orang di lebih dari 200 komunitas. Selain itu, TJRC melakukan konsultasi ahli, wawancara kebijakan dan penelitian akademis.

Empat kelompok studi ahli menilai penelitian yang ada tentang isu-isu yang relevan. Pendekatan gender yang kuat diterapkan di semua metode, dan seorang penasihat gender senior adalah anggota kunci **TJRC**. Komunitas adat adalah salah satu di antara banyak konstituen **TJRC**. **TJRC** memang memasukkan komunitas Pribumi dalam keterlibatan publiknya dan dalam penelitiannya.

Temuan dan rekomendasi

Laporan **TJRC** diserahkan kepada pemerintah dan Panel Perdamaian pada Februari 2016. Laporan rinci tersebut mencakup sekitar 90 rekomendasi. Meskipun **TJRC** tidak secara terpisah mempertimbangkan pengalaman masyarakat adat, **TJRC** membuat temuan dan rekomendasi penting tentang hak-hak mereka di hampir semua bidang yang diperiksa:

- Penentuan nasib sendiri terletak di jantung keluhan historis baik orang Muslim Moro maupun masyarakat adat Mindanao. Pendekatan nasionalis dari mayoritas dominan telah merusak, meskipun Filipina sendiri pernah mengobarkan perjuangan anti-kolonial berdasarkan penentuan nasib sendiri.
- Sangat penting untuk menemukan titik temu antara wacana Bangsamoro dan Filipina. Titik awal akan menjadi elemen umum dari perjuangan mereka berdasarkan pemahaman tentang hak untuk menentukan nasib sendiri semua orang. Pada saat yang sama, masyarakat adat menghadapi tantangan lebih lanjut dari komunitas Muslim Moro untuk menghormati hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan klaim wilayah leluhur atas tanah dan wilayah.
- Ada keluhan yang sah, ketidakadilan sejarah, pelanggaran hak asasi manusia dan marginalisasi karena perampasan tanah. Pelanggaran ini muncul karena kekerasan sistematis oleh negara, budaya impunitas dan pengabaian negara. Akar penyebabnya adalah pengenaan identitas Filipina monolitik oleh negara.
- Kekerasan struktural terhadap masyarakat adat yang dimulai di bawah rezim kolonial terus berlanjut di bawah Republik Filipina untuk mencapai penyerapan paksa masyarakat pribumi (dan masyarakat Muslim Moro). Kekerasan struktural ini memprovokasi pencabutan hak, marginalisasi dan perampasan besar-besaran, yang kemudian dilihat sebagai hal yang normal dan bukan ketidakadilan historis.

- Perampasan tanah dan erosi pemerintahan adat memperkuat klaim pembangunan negara yang “beradab”. Kekerasan telah digunakan terhadap mereka yang menolak bentuk kekerasan struktural dan kultural.
- Wacana publik yang dominan di Filipina silih berganti meremehkan, mengabaikan dan menyangkal klaim sejarah dan sosial budaya masyarakat adat (dan Muslim Moro), dan tidak mengakui hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Secara budaya, kecenderungan ini diekspresikan sebagai prasangka, merendahkan masyarakat adat ke status warga negara kelas dua dengan mengecualikan narasi nasional, termasuk oleh media dan sistem pendidikan.
- Kolonialisme memaksakan model kepemilikan pribadi atas pengelolaan tradisional tanah, dengan efek yang menghancurkan pada kehidupan ekonomi, bentuk organisasi sosial dan identitas budaya masyarakat pribumi.
- Masyarakat adat menderita baik kekerasan langsung di tangan keamanan negara, maupun kekerasan “horizontal” oleh kelompok bersenjata Moro.
- Masyarakat adat mengalami marginalisasi ganda, pertama oleh budaya pemukim Filipina yang dominan, dan kemudian oleh minoritas Islam Moro yang juga berjuang melawan dominasi.
- Pengabaian terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kegagalan negara menyediakan layanan dasar publik seperti air bersih dan listrik hingga perampasan tanah. **TJRC** menyoroti pengabaian negara dalam melalaikan tugasnya untuk mempertahankan integritas wilayah leluhur. Pada saat yang sama, **TJRC** menemukan bahwa kebijakan pemerintah tentang pembangunan intensif, mempromosikan pemukiman kembali skala besar dan pertanian, mengakibatkan gelombang perampasan masyarakat adat. Migrasi internal yang besar semakin meningkatkan kerentanan Penduduk Asli terhadap diskriminasi oleh mayoritas Kristen yang dominan tidak toleran terhadap agama dan praktik budaya yang berbeda.
- Untuk mengatasi warisan budaya-ideologis dari konflik selama beberapa dekade, Filipina perlu mengakui bahwa keragaman adalah salah satu sumber daya yang paling berharga sebagai sebuah negara. Pengelolaan yang konstruktif dari identitas dan tradisi budaya yang beragam ini adalah kunci bagi perdamaian, demokrasi, keamanan, dan pembangunan di masa depan.

Dalam rekomendasinya, **TJRC** menyerukan upaya strategis semua pemerintah untuk menangani masa lalu. Hampir semua rekomendasi memiliki implikasi bagi masyarakat adat. Beberapa menyerukan untuk menemukan cara untuk mempromosikan budaya dan identitas Pribumi serta keragaman, termasuk perubahan kurikulum di semua tingkatan. Berbagai rekomendasi terkait dengan pemberdayaan perempuan, dan salah satu rekomendasi penting adalah untuk memastikan keterwakilan perempuan pribumi (dan Moro) di badan-badan

nasional, regional dan lokal, sebagai sarana untuk mendorong kejadian yang tidak berulang.

TJRC merekomendasikan pembentukan Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi Transisi **Nasional/ National Transitional Justice and Reconciliation Commission**, dengan mandat untuk beroperasi selama enam tahun dengan opsi tiga tahun lagi. Salah satu dari empat bidang fokus adalah perampasan tanah di daerah konflik, yang secara eksplisit mencakup klaim atas wilayah leluhur, dan dukungan untuk desain ulang layanan pertanahan dan kerangka hukumnya.

Menindaklanjuti

TJRC beroperasi dalam jangka waktu yang singkat, dari akhir 2014 hingga awal 2016. Yang terpenting, kendala ini membantu menciptakan dinamika **TJRC** yang memberi masukan ke dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung dengan proposal untuk tindakan jangka pendek, menengah dan panjang.

Namun, empat tahun setelah laporan **TJRC**, tindak lanjut masih simpang siur. Rekomendasi mendasar untuk komisi nasional lanjutan belum ditindaklanjuti. Bangsamoro tidak lagi berperang, tetapi belum mencapai perdamaian yang stabil dan momok konflik baru mengancam. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan seruan untuk memperpanjang masa transisi 3 tahun.

Sementara Hukum Organik yang dibentuk setelah perjanjian damai seharusnya melindungi hak-hak masyarakat adat, di banyak daerah kekerasan Moro terhadap masyarakat adat terus berlanjut, beberapa di antaranya terkait dengan konflik tanah.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, organisasi masyarakat sipil telah membentuk Kelompok Kerja Independen untuk Keadilan Transisi dan Menangani Masa Lalu. Ini difokuskan pada peningkatan kapasitas untuk anggota kementerian pemerintah sementara dan masyarakat. Populasi Filipina yang lebih besar belum terlibat dalam proses perdamaian dan mempertahankan kurangnya pemahaman tentang akar penyebab konflik di Mindanao.

Pembelajaran dan dukungan

Untuk beberapa alasan, ini adalah proses keadilan transisional yang langka di Asia, dan salah satu yang bisa menjadi pelajaran bagi negara lain. **TJRC**:

- Sangat menghargai hak-hak masyarakat adat.
- Meneliti konteks sejarah era kolonial berturut-turut dan negara modern.
- Memprioritaskan fakta dan dampak perampasan tanah dan pemindahan

- dan membuat rekomendasi yang jelas tentang wilayah leluhur adat.
- Mengatasi pengakuan penentuan nasib sendiri Pribumi dalam negara pasca-kolonial modern yang sendiri terlibat dalam perjuangan anti-kolonial, yang sangat relevan dengan negara-negara lain di Asia dan kawasan lain.
- Mengembangkan hubungan yang kuat dengan masyarakat sipil di Bangsamoro.
- Memastikan fokus gender yang kuat.

Pelajaran lainnya termasuk:

- Meskipun TJRC menekankan bahwa ini bukanlah komisi kebenaran, namun TJRC mengumpulkan banyak informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada pengungkapan kebenaran sebagai dasar untuk keadilan dan rekonsiliasi. Misalnya, pemerintah enggan membuka arsipnya karena takut berdampak pada pemerintahan atau keamanan nasional saat ini.
- Kurangnya tindak lanjut yang mengecewakan oleh pemerintah pusat, atau keterlibatan oleh media nasional dan penduduk Filipina yang lebih luas, menunjukkan tantangan yang dihadapi masyarakat adat, terutama di daerah yang dianggap jauh dari kekuasaan.

Nepal

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Nepal adalah negara Asia Selatan yang menyebarkan daerah pegunungan Himalaya yang tinggi hingga dataran yang berbatasan dengan India. Populasinya yang beragam mencakup 59 komunitas Pribumi (Janjati) yang diakui secara formal yang membentuk setidaknya 36% dari populasi (sensus 2011). Ada juga banyak etnis minoritas dan kasta Hindu. Masyarakat adat secara tradisional terpinggirkan dalam apa yang merupakan Kerajaan Hindu sampai tahun 2007.

Pada tahun 1996 pemberontakan Maois dimulai dan lebih dari sepuluh tahun menyebar ke seluruh negeri, bertemu dengan taktik kontra-pemberontakan oleh pasukan pemerintah. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius oleh kedua belah pihak dalam konflik menyebabkan sekitar 15.000 orang tewas, sebagian besar warga sipil, dan sekitar 1.300 orang hilang secara paksa. Beberapa komunitas pribumi menderita secara tidak proporsional, misalnya komunitas Tharu di dataran.

Konflik berakhir di tengah gerakan massa pada April 2006. Perjanjian Damai Komprehensif mengatur proses keadilan transisional, yang mencakup komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan komisi orang hilang. Setelah penundaan yang lama dan kontroversi, **TRC**/Komis Kebenaran dan Rekonsiliasi mulai bekerja pada tahun 2016 dan belum menyerahkan laporan akhirnya.

Masyarakat adat secara blak-blakan selama negosiasi damai dan kemudian penyusunan konstitusi baru. Mereka adalah pendukung kuat untuk sistem politik federal baru untuk mencerminkan keragaman dan mengurangi marginalisasi, seperti yang akhirnya ditetapkan dalam konstitusi baru pada tahun 2015.

Nepal telah mengesahkan **UNDRIP** dan, setelah perjanjian damai 2006, meratifikasi Konvensi ILO 169, satu-satunya negara di Asia yang

melakukannya. Nepal baru-baru ini membentuk komisi konstitusional yang berfokus pada komunitas minoritas, dengan Komisi Kebangsaan Adat dan Komisi Tharu yang berfokus pada masyarakat adat.

Mandat

Lima komisioner mengawasi KKR, yang memiliki mandat untuk menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia antara tahun 1996 hingga 2006 selama konflik bersenjata. **KKR** berfokus pada penculikan atau penyanderaan; pemukulan yang menyebabkan cacat fisik; penyiksaan fisik atau mental; pemerkosaan dan pelecehan seksual; dan kerusakan harta benda. **KKR** tidak secara khusus mengkaji dampak konflik terhadap masyarakat adat, tetapi menerima pengaduan dari individu.

Kontroversi utama seputar mandat **KKR**, dan komisi serupa untuk penghilangan paksa, adalah bahwa undang-undang yang menetapkan mereka mengizinkan amnesti untuk pelanggaran berat. Pada 2015, sebelum komisi mulai bekerja, Mahkamah Agung Nepal memutuskan bahwa undang-undang tersebut diubah. Mereka menemukan ketentuan tentang amnesti inkonstitusional dan bertentangan dengan kewajiban internasional Nepal. Namun, pemerintah tidak mengubah undang-undang tersebut. Asosiasi korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, LSM hak asasi manusia nasional dan internasional, dan PBB telah mengkritik aspek mandat ini dan menyerukan perubahan. Proses penunjukan komisaris juga dikritik karena dipolitisir, tidak transparan dan kurang konsultasi terutama dengan kelompok korban.

Mandat operasional kedua komisi telah diperpanjang beberapa kali mengingat kemajuan yang lambat, terakhir pada Juli 2021 oleh pemerintah baru.

Metodologi

KKR terutama menerima pengaduan dari korban pelanggaran, kemudian melakukan investigasi. **KKR** tidak melakukan dengar pendapat publik atau proyek penelitian. **KKR** mengumpulkan lebih dari 60.000 pengaduan (dan komisi penghilangan paksa lebih dari 3.000 pengaduan).

Namun, **KKR** hanya melakukan sangat sedikit investigasi, sebagian karena keterbatasan kapasitas teknis dan pendanaan. Komisi juga dikritik karena gagal membangun program dukungan korban dan perlindungan saksi. Pihaknya belum mengeluarkan laporan.

Pembelajaran dan dukungan

- Kredibilitas di mata para korban dan komunitas hak asasi manusia adalah

- dasar bagi operasi dan keberhasilan komisi kebenaran. **KKR** tidak memiliki hubungan yang baik dengan asosiasi korban atau masyarakat sipil, yang mengklaim tidak memiliki integritas.
- Proses penunjukan komisaris, elemen kunci kredibilitas, telah dikritik karena kurangnya konsultasi yang memadai dengan kelompok korban, kurangnya transparansi dan politisasi.
 - Konsultasi terbatas dengan masyarakat adat mungkin mencerminkan kurangnya keterlibatan dengan korban secara keseluruhan. Kegagalan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip **UNDRIP**, karena pekerjaan **KKR** mempengaruhi masyarakat adat.
 - Pendekatan terbatas pada metodologinya, dikombinasikan dengan periode penyelidikan sepuluh tahun yang terbatas, tidak mungkin memfasilitasi pencarian kebenaran yang akan mengatasi penyebab mendasar pelanggaran terhadap masyarakat adat.
 - Sebelum perpanjangan satu tahun terakhir, aliansi 49 kelompok korban, Nepal dan organisasi hak asasi manusia internasional mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa mereka tidak akan terlibat dengan **KKR** dalam bentuknya saat ini, khususnya pendekatannya terhadap amnesti. Mereka menyatakan, “Kami percaya bahwa kelanjutan dari komisi disfungsi ini adalah taktik untuk mencegah akses korban ke keadilan, menunda proses, membuat frustrasi korban, dan semakin memperkuat impunitas.”
 - Melihat banyaknya kritik ini, pelajaran penting adalah bahwa proses pengungkapan kebenaran nasional harus mengikuti standar hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan masyarakat adat, **UNDRIP** adalah panduan utama.

Taiwan

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Di Taiwan ada sekitar 570.000 penduduk asli yang diakui secara resmi, atau 2,4% dari populasi nasional, yang terdiri dari 16 kelompok yang diakui secara resmi. Namun, angka tersebut tidak termasuk sepuluh komunitas Pribumi Pingpu (“dataran rendah”), yang berjumlah sekitar 400.000 dan tidak diakui secara resmi.

Taiwan telah dijajah oleh Spanyol (1626-1642), Belanda (1624-1662), loyalis Dinasti Ming Koxinga (1662-1683), Dinasti Ching (1663-1895), dan Jepang (1895-1945). Menyusul kekalahan dalam perang saudara Tiongkok, Republik Tiongkok didirikan di sana, meskipun statusnya masih dipertanyakan dan bukan Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Taiwan diklaim oleh Republik Rakyat Tiongkok, Republik Tiongkok, dan nasionalis berbahasa Minnan Taiwan yang menginginkan kemerdekaan.

Periode pendudukan Jepang dan periode Kuomintang setelah perang dunia kedua menyaksikan kekerasan massal, pelanggaran berat dan marginalisasi masyarakat Pribumi, termasuk melalui kebijakan asimilasi paksa. Kuomintang yang berkuasa memberlakukan darurat militer hingga 1987. Saat dominasi Kuomintang surut pada 1980-an, masyarakat adat bergerak untuk menuntut hak mereka atas tanah dan budaya. Undang-undang dan inisiatif pemerintah sejak itu telah dirancang untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat, meskipun implementasinya sering tidak merata.

Pada tahun 1994 konstitusi diamandemen untuk mengakui masyarakat adat sebagai “penduduk asli.” Sejak tahun 1996 Dewan Urusan Masyarakat Pribumi, entitas tingkat kabinet, telah menjadi penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat adat. Pada tahun 2005, Undang-Undang Dasar Masyarakat Pribumi memberikan berbagai macam hak. Pada 2016, pemerintah baru memprakarsai

langkah-langkah keadilan transisional.

Karena Taiwan bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Taiwan belum dapat memberikan suara pada **UNDRIP** atau meratifikasi Konvensi ILO 169.

Langkah-langkah keadilan transisional

Komite Keadilan Sejarah dan Keadilan Transisional Masyarakat Pribumi

Pada bulan Agustus 2016 Presiden baru terpilih Tsai Ing-wen mengeluarkan permintaan maaf bersejarah kepada masyarakat pribumi di Taiwan. Pada tahun yang sama, Pemerintah membentuk Komite Keadilan Sejarah dan Keadilan Transisional Pribumi (**Indigenous Historical Justice and Transitional Justice Committee**) di Kantor Kepresidenan. Mandat tersebut tidak terikat waktu dan bertujuan untuk “membangun kembali perspektif sejarah Pribumi, secara progresif mempromosikan pemerintahan otonom Pribumi, memulihkan bahasa dan budaya Pribumi, dan meningkatkan mata pencaharian komunitas Pribumi serta untuk mengejar keadilan dan berfungsi sebagai platform untuk konsultasi antara pemerintah dan berbagai masyarakat pribumi pada pijakan yang sama.”

Komite tersebut terdiri dari satu perwakilan untuk masing-masing dari 16 masyarakat pribumi yang diakui secara resmi dan tiga perwakilan untuk semua masyarakat adat dataran (Pingpu), bersama dengan dua dari lembaga pemerintah terkait dan tujuh cendekiawan dan pakar. Komite telah bertemu 15 kali sejak awal. Ada beberapa kritik tentang bagaimana anggota Komite dipilih, serta pada kekuatan mandatnya.

Komisi Keadilan Transisi untuk penyelidikan tindakan yang diambil oleh Kuomintang

Tindakan keadilan transisional lain yang relevan bagi masyarakat adat adalah Komisi Keadilan Transisi untuk menyelidiki tindakan Kuomintang antara 15 Agustus 1945 dan 6 November 1992 dan untuk memperbaiki ketidakadilan. Komisi sejauh ini telah mengidentifikasi 38 korban politik masyarakat pribumi.

Beberapa pelajaran

- Dibandingkan dengan banyak negara Asia lainnya, Taiwan telah mengambil langkah signifikan dalam 30 tahun terakhir untuk mengakui, melindungi, dan mempromosikan hak-hak masyarakat adatnya, termasuk mekanisme berkelanjutan untuk pengungkapan kebenaran tentang ketidakadilan sejarah.
- Masyarakat pribumi telah memainkan peran utama dalam proses ini,

saat Taiwan keluar dari darurat militer. Bagi banyak aktivis Pribumi, kemajuannya lambat dan tidak merata dan tantangannya meliputi: pengakuan berdasarkan identifikasi diri untuk orang-orang dataran; pelaksanaan Undang-Undang Dasar dalam kaitannya dengan klaim atas tanah leluhur; hal-hal yang berkaitan dengan hak penambangan dan penyimpanan limbah nuklir; kebutuhan akan dukungan yang lebih besar untuk pelestarian bahasa; warisan budaya dan hak mata pencaharian ekonomi yang terkait dengan perburuan; tingkat pendidikan dan kesempatan ekonomi yang lebih rendah, dan tingkat bunuh diri yang lebih tinggi dari rata-rata.

- Kepemimpinan dan perwakilan masyarakat pribumi dalam proses keadilan transisional yang sedang berlangsung akan menjadi penting bagi kredibilitas dan kapasitas mereka untuk mempengaruhi perubahan.

Australia

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Ada lebih dari 250 negara Pribumi di seluruh benua dan pulau-pulau Australia. Masyarakat dan budaya yang beragam ini telah hidup terus menerus di daratan selama lebih dari 65.000 tahun, warisan budaya tertua di dunia yang berkelanjutan.

Diperkirakan ada 798.000 orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres di Australia, atau 3,3% dari total populasi negara itu (angka 2016). Penduduk asli di Australia sering disebut, baik oleh mereka sendiri maupun oleh pemerintah, sebagai suku Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres. Masyarakat adat juga menggunakan istilah **First Nations** atau **First Peoples** dan biasanya mengidentifikasi diri mereka dengan kebangsaan khusus mereka. Australia mengesahkan **UNDRIP** pada tahun 2009, setelah awalnya menjadi salah satu dari hanya empat negara yang menentang Deklarasi pada tahun 2007. Australia belum meratifikasi Konvensi ILO 169.

Kontak pertama dan kolonisasi awal

Penjelajah laut Eropa pertama kali melakukan perjalanan ke benua yang sekarang dikenal sebagai Australia dari awal abad ketujuh belas, khususnya dari Belanda, Prancis, dan Inggris. Pada tahun 1770, kapten laut Inggris Cook menyewa sebagian besar pantai timur benua, mendarat di beberapa tempat mengamati dan secara terbatas terlibat dengan masyarakat adat dan, menyatakan kedaulatan Inggris atas seluruh wilayah pantai timur.

Pada tahun 1788, Inggris mendaratkan armada di daerah Sydney modern dan mendirikan apa yang pada awalnya merupakan koloni hukuman dengan bentuk pemerintahan militer. Dalam mendirikan koloni, Inggris mengklaim kedaulatan tidak hanya atas wilayah pesisir

yang diklaim oleh Cook, tetapi juga wilayah yang luasnya kira-kira separuh bagian timur benua. Sementara mereka mengetahui keberadaan masyarakat pribumi, mereka tidak mencari atau menerima persetujuan mereka untuk menyelesaikan tanah apalagi membangun kedaulatan eksklusif. Penduduk pribumi tidak pernah menyerahkan kedaulatan mereka dan tidak ada upaya kesepakatan melalui perjanjian.

Masyarakat adat tinggal di seluruh benua di ratusan negara dengan bahasa dan budaya mereka sendiri. Inggris menerapkan konsep hukum *terra nullius*, mengingat wilayah tersebut merupakan tanah tak berpenghuni dan karenanya terbuka untuk dijajah di bawah kedaulatan Kerajaan Inggris. Terkait dengan ini adalah sikap Eropa yang mendalam tentang inferioritas rasial masyarakat pribumi, menganggap mereka sebagai “biadab” dan “primitif” dengan cara yang selanjutnya memungkinkan mereka untuk menolak hak-hak dasar mereka.

Ketika pemukiman kolonial diperluas mencari lebih banyak tanah, masyarakat pribumi di seluruh wilayah menolak dan periode perang perbatasan meletus. Penyakit yang dibawa oleh penjajah Eropa juga memporak-porandakan masyarakat pribumi. Setelah konflik perbatasan, periode panjang perampasan dengan kekerasan terjadi sepanjang abad ke-19 dan berlanjut di beberapa daerah hingga abad ke-20. Ekspansi kolonial di utara negara itu terjadi jauh lebih lambat daripada wilayah selatan, dan konflik perbatasan dan kekerasan berlanjut hingga awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan kekerasan mengerikan terhadap masyarakat adat, termasuk sejumlah besar pembantaian warga sipil, keracunan, pemindahan paksa dari tanah tradisional. Kekerasan ini juga menyebabkan kerusakan yang menghancurkan terhadap hak-hak budaya, sosial dan ekonomi masyarakat adat, baik secara individu maupun kolektif.

Negara Bagian Australia Modern: asimilasi

Dari 1788 Inggris memerintah wilayah kolonial dari London, melalui gubernur lokal. Pada tahun 1850-an, pemerintah Inggris menyerahkan kekuasaan untuk pemerintahan sendiri internal ke sebagian besar negara bagian Australia; dari tahun 1856 hingga 1900 wilayah kolonial diatur sebagai enam koloni, dan pemerintah kolonial lokal ini menerapkan kebijakan perampasan terhadap masyarakat pribumi.

Pada tahun 1890-an serangkaian konvensi ketatanegaraan dianggap membentuk negara kesatuan di bawah satu konstitusi. Masyarakat adat tidak diikutsertakan dalam proses ini, dan konstitusi yang dihasilkan tidak mengakui Penduduk Asli Australia. Pada abad ke-20, Persemakmuran Australia dan masing-masing Negara memberlakukan kebijakan asimilasi dengan efek yang lebih menghancurkan pada masyarakat Pribumi, termasuk pemindahan paksa anak-anak pribumi dari

keluarga mereka dan larangan bahasa.

Awal dari perlawanan dan aktivistas modern pribumi Australia

Perlawanan masyarakat pribumi terus berlanjut, dan dari tahun 1920-an dan 1930-an masyarakat pribumi membentuk organisasi untuk memajukan hak-hak mereka. Pada tahun 1932, William Cooper mendirikan Liga Aborigin Australia/ Australian Aborigines' League dan pada tahun 1938, menandai peringatan 150 tahun kedatangan Inggris, masyarakat pribumi menyelenggarakan konferensi nasional dan Hari Berkabung. Pencapaian ini menandai puncak dari upaya bertahun-tahun dan mengilhami aktivisme pribumi kedua puluh di masa depan.

Tahun 1960-an merupakan periode penting dengan perubahan mendasar. Aktivis masyarakat pribumi menjadikan hak atas tanah sebagai pusat perjuangan mereka. Pada tahun 1962, masyarakat pribumi diberikan hak untuk memilih. Dan pada tahun 1967, setelah bertahun-tahun aktivisme pribumi, warga Australia memilih untuk mengubah Konstitusi sehingga penduduk Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres akan dihitung dalam populasi dan Pemerintah Nasional akan dapat membuat undang-undang untuk mereka. Perubahan ini menandai dimulainya era baru hubungan masyarakat pribumi dengan Pemerintah dan kebijakan, pergeseran kewenangan dari negara bagian ke Pemerintah Nasional.

Pasca era modern 1967

Era pasca 1967 dapat digambarkan sebagai era modern dalam hubungan antara masyarakat pribumi dengan negara, serta penduduk mayoritas. Pada tahun 1972, Pemerintah Nasional mengadopsi penentuan nasib sendiri sebagai prinsip panduan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat pribumi. Hak atas tanah tetap menjadi isu sentral, terutama di wilayah yang luas di Utara. Undang-undang utama mengakui hak-hak ini di beberapa wilayah Utara. Pada tahun 1985 Uluru, sebuah situs suci bagi komunitas pribumi di pusat Australia, diserahkan kembali kepada masyarakat pribumi. Pada tahun 1988 Pemerintah Nasional berkomitmen untuk menyelesaikan perjanjian dengan masyarakat pribumi, suatu tindakan yang gagal dicapai.

Terlepas dari kemajuan ini, masyarakat pribumi terus mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak-hak mereka yang meluas. Pada tahun 1987, aktivitas oleh keluarga dan kelompok pribumi menyebabkan penyelidikan nasional besar-besaran terhadap kematian masyarakat pribumi dalam tahanan.

Pada tahun 1991 Pemerintah memprakarsai program sepuluh tahun rekonsiliasi, membentuk Dewan Rekonsiliasi Aborigin/ the Council for Aboriginal Reconciliation. Dalam kasus Mabo tahun 1992 yang bersejarah, pengadilan

tertinggi negara itu membatalkan konsep terra nullius era kolonial yang digunakan untuk membenarkan kedaulatan Inggris. Perundang-undangan nasional diikuti untuk mengakui Hak Asli/ Native Title dalam keadaan tertentu. Antara tahun 1995 dan 1997, proses pengungkapan kebenaran utama kedua tentang hak-hak pribumi terjadi, penyelidikan nasional tentang penghapusan sejarah anak-anak pribumi dari keluarga mereka.

Pada 1990-an dan 2000-an, “perang sejarah” mendominasi debat publik tentang penjajahan dan perlakuan terhadap masyarakat pribumi. Bahkan ketika proses rekonsiliasi berlanjut, ada reaksi penolakan terhadap pengakuan hak-hak masyarakat pribumi, khususnya hak atas tanah. Pada tahun 2010, pemerintah mulai mempertimbangkan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat pribumi. Proses tersebut mengarah pada konsultasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan masyarakat pribumi dan, pada tahun 2017, Pernyataan Uluru dari Hati sebagai cara yang direkomendasikan ke depan.

Proses pengungkapan kebenaran saat ini di Australia

Proses untuk mempertimbangkan pengakuan konstitusional yang dimulai pada tahun 2010 mengarah pada pembentukan bipartisan pada tahun 2015 dari Dewan Referendum, yang terdiri dari anggota Pribumi dan non-Pribumi. Dewan mengadakan konsultasi nasional dengan komunitas Pribumi, yang berpuncak pada Konvensi Konstitusi Negara Pertama (First Nations Constitutional Convention) yang belum pernah terjadi sebelumnya di Uluru di Australia tengah. Konvensi tersebut mengesahkan Pernyataan Uluru sebagai hasil konsultasi, dan menjadi rekomendasi Dewan Referendum untuk langkah ke depan di Australia.

Perwakilan masyarakat pribumi menyampaikan Pernyataan Uluru sebagai undangan dari First Nations kepada rakyat Australia untuk “berjalan bersama kami dalam gerakan rakyat Australia untuk masa depan yang lebih baik.” Pernyataan Uluru dari Hati 2017 menetapkan parameter diskusi tentang pengungkapan kebenaran di Australia hari ini.

Pernyataan tersebut menyerukan perubahan substantif dalam hubungan antara

masyarakat adat dan negara dan masyarakat non-pribumi. Ini menegaskan kedaulatan Pribumi yang berkelanjutan, yang “tidak pernah diserahkan atau dipadamkan.” Pernyataan itu menyerukan tiga untaian tindakan:

- **Suara:** Membangun suara kelembagaan masyarakat pribumi ke parlemen, yang diabadikan dalam Konstitusi, untuk memastikan penentuan nasib sendiri.
- **Perjanjian:** Membentuk Komisi Makarrata untuk melakukan proses kesepakatan atau pembuatan perjanjian.
- **Kebenaran:** Komisi Makarrata juga akan mengawasi proses pengungkapan kebenaran untuk menetapkan konteks proses pengakuan. “Makarrata” adalah kata Yolgnu dari timur laut tanah Arnhem, yang berarti “bersatu setelah perjuangan, menghadapi fakta kesalahan, dan hidup kembali dalam damai.”

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa masyarakat pribumi tidak akan puas dengan pengakuan simbolis dalam Konstitusi, suatu hasil yang didukung oleh beberapa pemimpin politik.

Pernyataan Uluru dari Hati tidak merinci model pengungkapan kebenaran seperti apa yang harus diadopsi. Debat yang berkelanjutan telah memasukkan proposal untuk proses pengungkapan kebenaran lokal serta komisi atau proses sejenis di bawah payung nasional.

Tindak lanjut Pernyataan Uluru dari Hati

Pemerintah nasional

Pemerintah dengan cepat menolak seruan utama dari Pernyataan Uluru, menggambarkan suara Pribumi yang diabadikan secara konstitusional ke parlemen sebagai ide yang terlalu radikal. Sebaliknya, Pemerintah telah meluncurkan serangkaian proses komite dan ahli untuk mempertimbangkan opsi. Pada tahun 2020, komite parlemen merekomendasikan agar Pemerintah Australia mendukung proses penyampaian kebenaran yang diusulkan, menyarankan kombinasi upaya lokal dan nasional, sebelum atau setelah pembentukan Suatu Lembaga Suara Masyarakat Pribumi.

Masyarakat sipil

Organisasi dan komunitas pribumi, dan banyak lembaga non-pribumi termasuk di sektor bisnis, terus mengadvokasi aksi Pernyataan Uluru dari Hati, yang telah menjadi titik pengorganisasian sentral untuk seruan aksi.

Pada tahun 2021, **Reconciliation Australia**, sebuah LSM yang melanjutkan pekerjaan **Council for Aboriginal Reconciliation**, menyatakan bahwa gerakan rekonsiliasi berada pada titik kritis. Untuk melihat tindakan yang lebih berani demi mencapai rekonsiliasi, ia menyerukan agar pengungkapan kebenaran menjadi inti dari cara negara bergerak maju. **Reconciliation Australia** melaporkan dukungan publik yang luas untuk pengungkapan kebenaran: 90% dari semua orang Australia percaya bahwa penting untuk belajar tentang isu-isu masa lalu, hampir sama dengan 93% orang Aborigin dan Torres Strait Islander.

Namun, belum jelas apakah non-Pribumi Australia secara luas mendukung strategi Pribumi bahwa pengungkapan kebenaran harus mengarah pada perubahan substantif, termasuk perjanjian yang mengakui kedaulatan pribumi dan suara pribumi yang diabadikan secara konstitusional ke parlemen.

Perjanjian tingkat negara bagian dan proses pengungkapan kebenaran

Pada saat yang sama, langkah-langkah baru untuk proses perjanjian dan pengungkapan kebenaran terus muncul di tingkat negara bagian. Dalam setiap contoh, pengungkapan kebenaran dipandang sebagai persiapan yang diperlukan untuk mengembangkan perjanjian. Satu komisi kebenaran negara bagian telah dibentuk tetapi belum memulai pekerjaan umum (Victoria), sementara yang lain sedang dalam pembahasan (Northern Territory, Queensland). Inisiatif lokal lainnya tentang pengungkapan kebenaran dan pengakuan telah dimulai, dan proses perjanjian sedang diujicoba di Tasmania. Sebuah gambaran singkat berikut.

Victoria: Komisi Keadilan Yoo-rook (2021)

“**Yoo-rook**” adalah kata Wemba Wemba/Wamba Wamba untuk kebenaran. Pada tahun 2019, setelah lebih dari dua tahun berkonsultasi dengan masyarakat adat di seluruh negara bagian, Victoria membentuk Majelis Rakyat Pertama/ **First Peoples’ Assembly**, sebuah badan yang dipilih dan ditunjuk dari 32 orang pribumi untuk memimpin proses pembuatan perjanjian. Sependapat dengan Majelis bahwa proses pengungkapan kebenaran dan keadilan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk sebuah perjanjian, Pemerintah Negara Bagian membentuk Komisi Keadilan Yoo-rook/ **Yoo-rook Justice Commission** pada Mei 2021. Pekerjaan persiapan sedang berlangsung.

Northern Territory

Komisi Perjanjian Northern Territory/ **The Northern Territory Treaty Commission** adalah kantor independen yang didirikan pada tahun 2019 untuk mengembangkan kerangka kerja bagi negosiasi perjanjian di masa depan. Ini menyampaikan laporan sementara pada Maret 2020, dan akan menyampaikan laporan akhirnya

pada 2022.

Nota Kesepahaman yang menghasilkan Komisi mengakui bahwa masyarakat pribumi di wilayah tersebut, sebagai **First Nations**/Bangsa Pertama, adalah pemilik dan penghuni sebelumnya dari daratan, laut dan perairan, mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum dan adat istiadat tradisional mereka, dan tidak pernah menyerahkan kedaulatan. Juga disepakati bahwa ketidakadilan yang mendalam telah dilakukan terhadap orang-orang Aborigin di **Northern Territory**, termasuk perampasan dengan kekerasan, penindasan terhadap bahasa dan budaya mereka, dan pemindahan paksa anak-anak dari keluarga mereka, meninggalkan warisan trauma dan kehilangan yang harus ditanggung, ditangani dan disembuhkan.

Komisi Perjanjian menyarankan bahwa proses pengungkapan kebenaran harus dilakukan sebelum negosiasi perjanjian. Dalam makalah diskusi terperinci yang menguraikan isu-isu dan pilihan-pilihan utama pada Februari 2021, **Towards Truth Telling**, Komisi meminta komisi kebenaran untuk mulai bekerja sesegera mungkin.

Queensland

Pada tahun 2019, Pemerintah Queensland membentuk **Tracks to Treaty**, sebuah inisiatif untuk membingkai ulang hubungannya dengan penduduk Queensland Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres. Pada awal 2021, Pemerintah berkomitmen untuk membangun proses pengungkapan kebenaran sebagai langkah menuju kesepakatan. Ini membentuk sebuah komite untuk mempersiapkan proses.

Australia Selatan

Pada tahun 2016, Pemerintah Australia Selatan mulai mempersiapkan proses perjanjian, sebelum perubahan pemerintahan menghentikan proses tersebut. Mantan Komisaris Perjanjian melaporkan kepada pemerintah yang akan datang dan Komite Pemilihan Bersama Parlemen Australia untuk Pengakuan Konstitusi terkait dengan Penduduk Asli dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, menyoroti bahwa masyarakat pribumi ingin memulai pembicaraan tentang sebuah perjanjian, tetapi lebih suka bernegosiasi secara terpisah sebagai negara daripada secara kolektif.

Tasmania

Pada Juni 2021, Perdana Menteri Negara Bagian menunjuk seorang mantan gubernur dan seorang profesor hukum untuk memimpin pembicaraan dengan

komunitas pribumi guna menemukan jalan menuju rekonsiliasi dan sebuah perjanjian. Mereka diharapkan untuk melaporkan kembali pada akhir tahun dengan proposal. Beberapa pemimpin pribumi telah menyerukan proses pengungkapan kebenaran.

Australia Barat

Belum ada tindakan Pemerintah pada perjanjian atau inisiatif pengungkapan kebenaran yang mengikuti Pernyataan Uluru dari Hati. Namun, beberapa komentator, termasuk para pemimpin pribumi, menganggap Australia Barat telah berkomitmen pada perjanjian pertama Australia. **The South West Native Title Settlement**, kesepakatan yang dinegosiasikan tahun 2015 antara orang Noongar dan Pemerintah Australia Barat, menyelesaikan klaim hak milik penduduk asli untuk selama-lamanya dengan imbalan paket manfaat. Ini termasuk pengakuan melalui Undang-Undang Parlemen, Perwalian Noongar Boodja yang permanen, akses ke tanah kerajaan/negara untuk kegiatan adat, pengelolaan bersama Taman Nasional dan kawasan konservasi, dan pengembangan pusat budaya. Pemukiman memungkinkan orang Noongar untuk “mengendalikan nasib mereka sendiri, dan membangun masa depan yang solid untuk generasi mendatang.”

Proses pengungkapan kebenaran di masa lalu di Australia: dua proses nasional resmi

Dua tonggak utama dalam pengungkapan kebenaran masyarakat pribumi terjadi pada 1980-an dan 90-an. Mereka adalah penyelidikan tematik resmi yang spesifik, bukan penyelidikan atas pengalaman sejarah penuh masyarakat pribumi sejak penjajahan.

01

Komisi Kerajaan/Negara untuk Kematian Aborigin dalam Penahanan (1987-1991)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Aktivis masyarakat pribumi mendorong pembentukan komisi menyusul sejumlah besar kematian penduduk pribumi dalam tahanan pada 1980-an. Segera setelah kampanye tersebut menarik perhatian internasional ketika masyarakat pribumi mengajukan kasus mereka ke PBB pada tahun 1987, Pemerintah Australia mengumumkan sebuah komisi kerajaan/pemerintah.

Awalnya hanya satu komisar yang diangkat, tetapi karena lebih banyak kematian dalam tahanan ditemukan, empat komisar ditambahkan. Empat dari lima komisar terlatih secara hukum, satu komisar pribumi, dan semuanya laki-laki.

Mandat

Komisi Kerajaan/Pemerintah sering digunakan di Australia untuk menyelidiki kesalahan politik atau masalah sosial yang signifikan dan membuat rekomendasi kebijakan. Komisi Kerajaan/Pemerintah, tingkat penyelidikan resmi tertinggi di Australia, adalah badan

hukum formal yang beroperasi secara yudisial. Komisi memeriksa semua kematian dalam tahanan antara Januari 1980 dan Mei 1989, di setiap negara bagian dan teritori di mana kematian tsb. terjadi.

Komisi ini mendahului Komisi Kebenaran yang multidisiplin seperti sekarang ini. Namun, tak lama setelah mulai bekerja, mandat awal kemudian diubah sehingga, selain penyelidikan kasus yang lebih legalistik, ia juga dapat mempertimbangkan masalah sosial, budaya, dan hukum yang mendasari terkaitnya kematian tersebut. Itu bisa menanyakan bukan hanya bagaimana orang meninggal, tetapi mengapa:



“Mengapa orang Aborigin, yang membentuk sekitar 1,5% dari populasi Australia, memiliki dua puluh kali risiko kematian dalam tahanan polisi dan sepuluh kali risiko kematian di penjara? Mengapa begitu banyak yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel dan penjara? Apakah mereka diperlakukan secara adil oleh hukum? Mengapa begitu banyak orang Aborigin yang menganggur, bertempat tinggal buruk, berpendidikan rendah? Mengapa kesehatan mereka buruk? Mengapa harapan hidup mereka lebih pendek daripada orang Australia lainnya?”

Metodologi

Ketika sidang dimulai pada tahun 1988, komisi tersebut mulai memeriksa 44 kasus, angka yang akhirnya berkembang menjadi 99 kasus. Komisi melakukan wawancara dengan dan menerima masukan dari anggota keluarga, Pemerintah, lembaga pemerintah, organisasi adat dan anggota masyarakat. Audiensi publik untuk setiap kematian diadakan dengan cara kuasi-yudisial, baik di kota asal almarhum, kota tempat kematian terjadi, atau ibu kota. Komisi menghindari penggunaan ruang sidang lokal untuk dengar pendapat di kota-kota pedesaan dan regional karena asosiasi negatif mereka untuk masyarakat adat.

Menyelidiki masalah mendasar, komisi mengandalkan penelitian sosiologis dan kriminologis, pertemuan publik, dan pengajuan untuk memahami bagaimana masyarakat adat hidup dan untuk menghargai cara penjajahan telah mempengaruhi mereka. Satu setengah tahun setelah Komisi dimulai, Unit Masalah Aborigin khusus dibentuk di enam negara bagian dan wilayah Utara untuk meningkatkan akses penelitian terhadap masalah mendasar.

Temuan dan rekomendasi

Laporan Nasional 5 jilid diajukan di parlemen nasional pada bulan April 1991.

Temuan utama adalah bahwa penduduk asli sangat terwakili dalam tahanan, yang menyebabkan sejumlah besar kematian. Komisi juga menemukan bahwa hampir separuh dari mereka yang meninggal telah dipisahkan dari keluarga mereka sebagai anak-anak. Laporan tersebut membuat 339 rekomendasi mengenai isu-isu mendasar, yang difokuskan terutama pada:

- Kecukupan penyelidikan polisi dan petugas lembaga atas kematian dalam tahanan.
- Penentuan nasib sendiri dan pemberdayaan.
- Layanan sosial, pendidikan, kejuruan dan hukum untuk pemuda pribumi.
- Keragaman budaya dan kebutuhan akan praktek yang peka terhadap budaya dalam sistem peradilan pidana dan hukum yang dominan.
- Mengelola penyalahgunaan alkohol dan zat.
- Meningkatkan hubungan polisi dengan, dan perlakuan terhadap, masyarakat adat.
- Meningkatkan perawatan kustodian.
- Sesuai dengan kewajiban internasional.
- Mengatasi kebutuhan lahan.
- Pentingnya rekonsiliasi.

Menindaklanjuti

Pada tahun 1991, parlemen Australia membentuk Dewan Rekonsiliasi Aborigin, yang dipimpin oleh mantan Komisariss Kerajaan Pribumi, Pat Dodson. Ketika Dewan dibubarkan pada tahun 2000, organisasi Rekonsiliasi Australia dibentuk untuk terus bekerja. Pada tahun 2015, Dodson mengatakan,



“Pada umumnya masalah dibentuknya Komisi Kerajaan/Pemerintah untuk memeriksa dan memberi saran kepada Pemerintah telah menjadi lebih buruk. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif rekomendasi Komisi telah dilaksanakan ... dan apakah masalah yang diidentifikasi oleh Komisi dipahami atau bahkan dianggap penting ... Bagi sebagian besar rakyat kita, sistem hukum bukanlah instrumen keadilan yang dapat dipercaya — ini adalah pabrik pengolahan yang ditakuti dan dibenci yang mendorong orang-orang kita yang paling rentan dan cacat menuju masa depan yang rusak dan suram.”⁴

4. Pidato Pat Dodson's bisa diakses lewat 'the National Press Club': <http://www5.austlii.edu.au/au/journals/IndigLawB/2016/12.pdf>

Tiga puluh tahun setelah Komisi Kerajaan/Pemerintah, kritik terus berlanjut tentang kegagalan untuk menerapkan rekomendasinya, representasi berlebihan yang berkelanjutan dari orang-orang Pribumi, termasuk anak-anak, dalam tahanan, dan krisis kematian penduduk asli yang sedang berlangsung dalam tahanan.

Pada April 2021, 474 kematian Penduduk Asli lainnya dalam tahanan telah terjadi sejak penutupan Komisi. Pada tahun 2020, protes Black Lives Matter yang meluas terjadi di seluruh negeri, dipimpin oleh aktivis Pribumi yang menyerukan tindakan segera terhadap penahanan penduduk asli dan kematian dalam tahanan.

Pembelajaran dan dukungan

- Salah satu pelajaran penting dari Komisi adalah bahwa mendidik orang-orang yang paling terpengaruh oleh hasil tentang alasan penyelidikan dan kekuatannya adalah penting untuk lingkungan yang mendukung dan saling percaya guna memungkinkan pengumpulan informasi. Membangun dan mempertahankan dukungan publik adalah unsur utama keberhasilan yang harus dimulai sebelum komisi memulai pekerjaannya.
- Mengembangkan pemahaman yang jelas tentang masalah sebelumnya akan membantu komisi menetapkan metodologinya sejak awal, daripada harus menambahkan penelitian sosiologis dengan baik ke dalam pekerjaannya.
- Beberapa pengamat menganggap pekerjaan penelitian sosial kekurangan sumber daya dibandingkan dengan penyelidikan yang lebih legalistik, dan menemukan fokus pada pencegahan kematian dalam tahanan terlalu sempit, teknis dan legalistik. Sebaliknya, beberapa orang percaya, studi yang lebih mendalam tentang isu-isu mendasar melalui penelitian sosiologis mungkin akan lebih bermanfaat bagi masyarakat pribumi.
- Komisi yang semuanya laki-laki telah dikritik karena meminggirkan perempuan pribumi. Misalnya, komisi tersebut dikatakan kurang mempertimbangkan risiko utama terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan pribumi, seperti kekerasan dalam keluarga dan perlakuan polisi.
- Kurangnya waktu dan sumber daya, termasuk jumlah dan jenis staf yang dikerahkan di setiap kantor, merupakan kendala.
- Beberapa orang pribumi sangat kecewa dengan kegagalan Komisi untuk menyalahkan polisi dan petugas penjagaan secara individu.
- Ada pemantauan yang tidak memadai atas pelaksanaan rekomendasi Komisi, dan kurangnya keterlibatan masyarakat pribumi. Pada peringatan 30 tahun laporan tersebut, laporan pemantauan yang bersaing membawa momok politik ke perdebatan daripada fokus pada dampak pada masyarakat pribumi.

02 Penyelidikan Nasional tentang Pemisahan Anak-anak Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres dari Keluarga mereka (1995–1997), oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Nasional Australia.

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Undang-undang, kebijakan, dan praktek Pemerintah mengakibatkan pemindahan paksa anak-anak Aborigin dan Torres Strait Islander dari keluarga dan komunitas mereka di seluruh Australia. Praktek ini dimulai pada akhir abad ke-19 dan menjadi bagian sistematis dari kebijakan asimilasi yang diadopsi oleh semua pemerintah Australia pada abad ke-20.

Ribuan anak dipindahkan oleh Pemerintah, gereja, dan badan kesejahteraan. Mereka dipindahkan ke institusi yang dijalankan oleh gereja dan organisasi non-pemerintah, diadopsi oleh keluarga non-pribumi, atau dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan buruh tani. Banyak anak mengalami perlakuan yang sangat kejam dan merendahkan, termasuk pelecehan seksual. Mereka memiliki kontak terbatas atau tidak sama sekali dengan keluarga mereka, dan sering kali diindoktrinasi untuk percaya pada inferioritas masyarakat dan budaya mereka. Mereka sekarang dikenal sebagai Generasi yang Dicuri/ **the Stolen Generations**.

Undang-undang tentang pemindahan anak masyarakat pribumi masih berlaku pada awal tahun 1970-an. Pemindahan anak-anak memutuskan ikatan budaya, spiritual, dan keluarga yang penting, meninggalkan dampak yang langgeng dan antargenerasi pada kehidupan, kesejahteraan, dan komunitas mereka. Trauma yang dihasilkan telah diturunkan ke anak dan cucu, berkontribusi pada kekerasan keluarga, penyalahgunaan obat-obat terlarang, menyakiti diri sendiri, dan masalah lain yang dihadapi masyarakat pribumi. Aktivis dan organisasi masyarakat pribumi berkampanye untuk penyelidikan nasional terhadap kebijakan pemindahan anak-anak pribumi dari keluarga mereka. Mereka khawatir bahwa ketidaktahuan

publik tentang sejarah pemindahan paksa menghalangi pengakuan kebutuhan para korban dan keluarga mereka serta penyediaan layanan. Pada tahun 1995 pemerintah pusat merujuk masalah ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Persamaan Kesempatan (**Human Rights and Equal Opportunity Commission/HREOC**), yang memprakarsai penyelidikan nasional resmi.

Mandat

Kerangka acuan penyelidikan adalah untuk:

- Periksa efek perpisahan di masa lalu dan yang berkelanjutan pada individu, keluarga, dan komunitas.
- Identifikasi tanggapan, termasuk rekomendasi untuk mengubah undang-undang, kebijakan, dan praktek, menyatukan kembali keluarga, dan mengatasi kerugian yang disebabkan oleh perpisahan.
- Identifikasi pembenaran untuk, dan sifat, kompensasi bagi mereka yang terkena dampak.
- Tinjau undang-undang, kebijakan, dan praktek saat ini yang memengaruhi penempatan dan pengasuhan anak-anak pribumi.

Metodologi

Meskipun bukan Komisi Kebenaran, penyelidikan telah digambarkan sebagai Komisi Kebenaran pertama di Australia. Mick Dodson, Komisar Keadilan Sosial Aborigin dan Kepulauan Selat Torres/ **the Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner**, mengambil tanggung jawab utama bersama dengan Presiden Komisi untuk melakukan dengar pendapat penyelidikan. Di setiap daerah yang dikunjungi, Komisi mengangkat seorang perempuan pribumi sebagai Wakil Komisioner.

Penyelidikan menunjuk perwakilan Dewan Penasihat Pribumi/**Indigenous Advisory Council** untuk memberi nasihat tentang proses tersebut, yang terdiri dari anggota dari semua wilayah utama negara tersebut. Sebuah tim dibentuk untuk mempublikasikan Penyelidikan, mendorong kesaksian dan pengajuan, dan mengatur dengar pendapat. Materi penjangkauan termasuk video penjelasan, **booklet**/panduan informasi dan poster.

Penyelidikan mengadakan dengar pendapat di setiap ibu kota dan di banyak kota regional dan kecil. Waktu dan sumber daya yang terbatas menghalangi kunjungan ke setiap tempat orang ingin memberikan bukti. Penyelidikan mengambil bukti baik secara publik maupun secara pribadi, dan mengambil kesaksian secara tertulis atau lisan serta menerima pengajuan tertulis.

Karena sifat ingatan yang traumatis dan kesulitan yang terkait dengan memberikan

kesaksian, seorang pekerja sosial pribumi mendukung para saksi sebelum dan selama kesaksian mereka. Dukungan psikologis ekstra diberikan oleh layanan kesehatan pribumi setempat. Penyelidikan menerima 777 pengajuan, termasuk 535 dari individu dan organisasi pribumi, 49 dari organisasi gereja dan tujuh dari Pemerintah.

Temuan dan rekomendasi

Ketika laporan berjudul “Membawa Mereka Pulang”/ **Bringing Them Home** diajukan ke parlemen nasional pada Mei 1997, terungkap bahwa:

- Kebijakan pemindahan paksa menyebabkan pemindahan antara satu dari tiga dan satu dari sepuluh anak Pribumi antara tahun 1910 dan 1970.
- Efek dari pemindahan tersebut biasanya negatif, multipel, dan sangat melumpuhkan.
- Anak-anak pribumi ditempatkan di lembaga-lembaga, misi gereja, diadopsi atau diasuh dan berisiko mengalami kekerasan fisik dan seksual. Banyak yang tidak pernah menerima upah untuk kerja mereka.
- Pejabat kesejahteraan gagal dalam tugas mereka untuk melindungi lingkungan adat dari penyalahgunaan.
- Undang-undang penghapusan bersifat diskriminatif rasial dan genosida secara niat, karena tujuan utamanya adalah penghapusan identitas khas masyarakat pribumi.
- Banyak kasus yang melibatkan pelanggaran kewajiban menggadai dan tugas kehati-hatian, serta tindakan kriminal.

Penyelidikan juga melaporkan bahwa banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk menceritakan kisah mereka, tidak siap, atau memilih untuk tidak hadir di forum ini. Dikatakan bahwa penyembuhan dan rekonsiliasi mengharuskan kesaksian terus diterima dan dicatat. Sejalan dengan pengajuan oleh organisasi pribumi, Inkuiri mendukung panggilan untuk arsip nasional guna pengumpulan dan penyajian cerita. Namun, prioritas pertama adalah memungkinkan orang untuk menceritakan kisah mereka dan menerima konseling serta kompensasi.

Penyelidikan juga mengakui pentingnya pelaporan dengan cara yang langsung dan dapat diakses oleh masyarakat pribumi, terutama mereka yang memberikan bukti atau membuat pengajuan. Laporan ini memberikan ringkasan laporan dan video kepada setiap saksi dan organisasi pribumi yang terlibat. *Membawa Mereka Pulang* termasuk 54 rekomendasi dan seperangkat prinsip untuk mendasari tanggapan Pemerintah terhadap mereka yang terkena dampak pemindahan paksa anak-anak:

- Penentuan nasib sendiri: Hak orang Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres, anggota Generasi yang Dicuri, dan keluarga mereka untuk menjalankan

- otonomi dalam urusan mereka dan membuat keputusan sendiri.
- Non-diskriminasi: Hak untuk bebas dari diskriminasi rasial dan untuk mengakses layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Pembaruan budaya: Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, mengakui keragaman budaya dan kebutuhan untuk memperbaiki ikatan keluarga dan budaya yang rusak karena pemindahan anak-anak.
- Basis kebijakan yang jelas: Kebutuhan akan serangkaian layanan yang disepakati untuk memulai proses penyembuhan dan pemulihan, dengan tujuan dan sasaran yang disepakati.
- Sumber daya yang memadai: Pendanaan untuk memungkinkan layanan mengatasi beragam dampak pemindahan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.

Menunjuk jalan menuju tindakan di masa depan oleh seluruh negara, laporan tersebut menyatakan, “Masa lalu sangat dekat dengan kita hari ini, dalam kehancuran yang berkelanjutan dari kehidupan penduduk pribumi Australia. Kehancuran itu tidak dapat diatasi kecuali seluruh komunitas mendengarkan dengan hati dan pikiran terbuka cerita-cerita tentang apa yang telah terjadi di masa lalu dan, setelah mendengarkan dan memahami, berkomitmen pada rekonsiliasi.” Salah satu rekomendasi kuncinya adalah perlunya pengakuan resmi, dan permintaan maaf atas pemindahan paksa anak-anak.

Menindaklanjuti

Tindak lanjut atas laporan itu sarat politik. Pemerintah menanggapi laporan tersebut pada bulan Desember 1997, menyediakan paket \$43 juta untuk penelusuran dan konseling keluarga, proyek sejarah lisan, dan upaya lain untuk mengatasi rekomendasi tersebut. Pemerintah menolak beberapa rekomendasi, termasuk semua yang berhubungan dengan bentuk penghapusan kontemporer, seperti standar nasional, kerangka undang-undang, dan paket keadilan sosial. Itu juga menolak rekomendasi untuk kompensasi uang kepada para korban atau keluarga mereka. Pemerintah juga tidak mengeluarkan permintaan maaf.

Dalam penyelidikan Senat tahun 1999 tentang penerapan rekomendasi tersebut, Pemerintah saat itu menyangkal ada generasi anak-anak Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres yang terpisah dari keluarga mereka. Dikatakan bahwa jumlah anak yang dipisahkan tidak melebihi sepuluh persen.

Bisa dibilang publik Australia menanggapi dengan cara yang lebih terbuka daripada Pemerintah Nasional. Hari Maaf pertama diselenggarakan satu tahun setelah laporan, dengan puluhan ribu orang berkumpul. Pada tahun 2000, 300.000 orang berbaris melintasi jembatan Sydney Harbour untuk mendukung Generasi yang Dicuri, dengan “Maaf” tertulis di langit di atas. Pawai jembatan rekonsiliasi serupa

terjadi di seluruh negeri.

Pada tahun 2008, lebih dari satu dekade setelah laporan tersebut, Perdana Menteri mengajukan permintaan maaf resmi, dan Parlemen menyampaikan Permintaan Maaf kepada Penduduk Asli Australia, menerapkan rekomendasi penting dari laporan tersebut. Yayasan Penyembuhan Penduduk Aborigin dan Selat Torres didirikan pada tahun 2009, mengikuti Permintaan Maaf.

Organisasi adat mencatat bahwa pemerintah Australia berturut-turut menentang proses nasional untuk kompensasi. Pemerintah terus merespons dengan mendanai layanan untuk komunitas Aborigin dan Torres Strait Islander yang lebih luas, daripada Generasi yang Dicuri pada khususnya. Pada Agustus 2021, beberapa negara bagian setuju untuk membayar kompensasi kepada para korban. Namun, Pemerintah Nasional menegaskan ini adalah tanggung jawab negara, dan tidak semua negara bagian telah setuju untuk bertindak - bahkan di negara bagian yang telah bertindak, ada kekhawatiran besar bahwa kriteria dan ketergantungan pada catatan resmi yang buruk akan mengecualikan banyak Generasi yang Dicuri.

Belum ada pemantauan formal atas pelaksanaan rekomendasi. Dua puluh tahun setelah laporan, dua LSM Pribumi melakukan penilaian, dan menemukan kurang dari satu dari sepuluh rekomendasi telah dilaksanakan sepenuhnya. Mereka melaporkan bahwa meskipun ada kemajuan di beberapa bidang, tidak pernah ada upaya kolaboratif dan sistematis untuk mengatasi rekomendasi tersebut.

Selanjutnya, praktek modern untuk mengeluarkan anak-anak pribumi dari keluarga mereka terus berlanjut. Pada tahun 2020, sebuah LSM Pribumi terkemuka tentang anak-anak dan hak-hak keluarga melaporkan bahwa anak-anak pribumi lebih dari sepuluh kali lebih mungkin untuk dipindahkan oleh layanan Pemerintah dari keluarga mereka daripada anak-anak non-pribumi.

Pembelajaran dan dukungan

- Masyarakat pribumi yang diminta untuk memberikan kesaksian tentang pengalaman traumatis membutuhkan dukungan psikososial, yang seringkali kurang, terutama di daerah terpencil. Penyelidikan membangun dukungan ke dalam prosesnya, dan The Healing Foundation yang muncul kemudian telah menjadi langkah penting menuju pengungkapan kebenaran yang lebih berkelanjutan dengan masyarakat pribumi di Australia.
- Seperti yang didokumentasikan dalam pengalaman masyarakat adat di seluruh dunia, trauma seringkali bersifat antargenerasi. Penting untuk mengingat fakta ini saat merancang dan menerapkan proses pengungkapan kebenaran.

- Bahkan lembaga dengan sumber daya yang cukup baik di negara kaya, seperti Komisi Hak Asasi Manusia dan Persamaan Kesempatan Australia/ Australia's Human Rights and Equal Opportunity Commission, tidak memiliki waktu dan sumber daya untuk menjangkau semua komunitas dan orang yang ingin bersaksi.
- Penyelidikan mengakui bahwa bagi sebagian orang waktu atau forum penyelidikan mungkin tidak tepat bagi mereka untuk bersaksi. Penyelidikan menyoroti kebutuhan untuk terus merekam kesaksian di luar masa berlakunya.
- Banyak masyarakat pribumi yang tidak berbagi cerita tentang pengalaman traumatis mereka di luar keluarga dekat dan komunitas. Banyak yang bahkan tidak memiliki jaringan dukungan ini karena pengalaman kolonial. Bagi banyak orang pribumi di seluruh dunia, secara fisik tidak aman untuk berbagi cerita ketika mereka masih menjadi sasaran kekerasan. Bahkan tanpa bahaya fisik, warisan hubungan yang mengancam dengan pihak berwenang membuat proses mempercayai proses resmi menjadi sulit. Kepemimpinan memainkan peran penting, termasuk kepemimpinan masyarakat pribumi.
- Sistem pemantauan yang disepakati dan kredibel untuk pelaksanaan rekomendasi harus dibuat, dengan partisipasi yang signifikan oleh masyarakat pribumi.
- Laporan Generasi yang Dicuri memiliki dampak besar dan tahan lama pada populasi non-pribumi Australia yang lebih luas; itu menggeser narasi nasional dan membuka diskusi dengan cara yang signifikan. Ini menunjukkan kekuatan masyarakat adat berbagi cerita mereka.
- Pada saat yang sama, dibutuhkan lebih dari satu dekade untuk permintaan maaf resmi, dan banyak rekomendasi Penyelidikan yang belum ditindaklanjuti.
- Pemindahan anak-anak pribumi dari keluarga mereka tetap menjadi masalah utama di Australia, jika di bawah kebijakan yang berbeda. Para pemimpin dan aktivis pribumi terus menyerukan aksi.

Inisiatif masyarakat sipil

Untuk mendemonstrasikan berbagai kemungkinan pengungkapan kebenaran, sejumlah kecil inisiatif masyarakat sipil di Australia pada tingkat nasional dan lokal dijelaskan di bawah ini.

Kontra narasi dalam gerakan seni Kimberley Timur: Pengungkapan kebenaran asli melalui budaya dan seni tradisional dan kontemporer

Latar belakang

Masyarakat pribumi dan komunitas tentunya memiliki cara tersendiri untuk mewariskan informasi, pengetahuan, budaya dan hukum secara lintas generasi. Media pribumi dan proses artistik semakin memasukkan pengungkapan kebenaran tentang peristiwa dan pengalaman bersejarah, seperti konfrontasi dengan penjajah yang datang dan pembantaian perbatasan selama 50 tahun di wilayah barat laut terpencil Australia. Sebuah gerakan seni rupa pribumi modern di masyarakat telah menghadirkan kontra-narasi yang kuat selama “perang sejarah” yang kontroversial tentang periode pemukim kolonial awal.

Wilayah Kimberley Timur adalah wilayah yang luas di barat laut Australia yang terpencil. Ini adalah rumah bagi masyarakat adat Gija, yang menyebut periode 1880-1927 sebagai “The Killing Time”. Pemerintah kolonial menyebutnya sebagai masa “pasifikasi”.

Dari akhir 1880-an hingga 1940-an, pemerintah kolonial mendorong para penggembala untuk berekspansi ke wilayah Kimberley Timur, dengan sedikit memperhatikan komunitas pribumi. Pembunuhan massal, pemindahan paksa dan pelanggaran lainnya terhadap masyarakat pribumi menyusul. Komunitas pribumi, yang mengingat setidaknya sepuluh pembantaian selama periode ini, melawan, terkadang dengan kekerasan. Pembunuhan itu berlangsung sekitar 50 tahun. Pada tahun 1927, pemerintah negara bagian memanggil Komisi Kerajaan setelah

satu pembantaian yang terkenal kejam. Ditemukan 20 orang Pribumi dibunuh dengan partisipasi oleh petugas polisi, meskipun yang lain mengatakan lebih banyak lagi yang terbunuh.

Seni dan budaya sebagai pengungkapan kebenaran pribumi di masa sejarah yang diperebutkan

Masyarakat Gija memiliki warisan seni visual dan budaya pertunjukan yang kaya, seperti lagu dan tarian. Seni cadas di seluruh area sudah ada sejak hampir 20.000 tahun yang lalu. Pada 1970-an dan 80-an, gerakan seni kontemporer yang terkenal secara internasional dimulai dengan karya Rover Thomas, yang mendorong orang lain untuk mengambil lukisan. Baris lagu, tarian dan lukisan mengacu pada peristiwa kontemporer atau sejarah, termasuk **The Killing Times**.

Pada 1990-an dan awal 2000-an, kebijakan rekonsiliasi pemerintah yang terkadang kontroversial terungkap bersamaan dengan “perang sejarah” tentang kebenaran kekerasan pemukim pada periode awal kolonialisme. Tradisi lisan Gija telah menghidupkan sejarah **The Killing Times**, tetapi beberapa sejarawan tetap sangat skeptis bahwa pembantaian semacam itu terjadi. Pada awal 2000-an, seniman Gija memutuskan untuk membawa karya mereka ke publik yang lebih luas.

“Blood on the Spinifex”, sebuah pameran seni visual tahun 2002 di Melbourne, menampilkan lukisan oleh sepuluh seniman yang menggambarkan pembantaian. Pameran dibuka oleh Gubernur Jenderal. Kurator menulis bahwa para tetua Gija mengetahui penolakan pembantaian, dan memutuskan untuk memasuki debat menggunakan budaya mereka melalui lukisan.

“Fire Fire Burning Bright” adalah pertunjukan yang didasarkan pada joonba tradisional yang diasosiasikan dengan satu lukisan dalam pameran, **“Bedford Downs Massacre”** oleh Timmy Timmes. Grup Pertunjukan Neminuwarlin, yang dipimpin oleh saudara perempuan seniman, seorang wanita Miriwoong/Gija bernama Peggy Patrick, menggabungkan lagu dan tarian tradisional dengan unsur-unsur tradisi teater barat. Mereka membawa pertunjukan ke Darwin, Perth, dan Melbourne, seperti yang dikatakan Patrick, “untuk membuat orang kulit putih mengerti tentang hal-hal ini.”

Serangkaian karya ini merupakan kontra-narasi oleh orang-orang Pribumi selama periode sejarah yang diperebutkan dengan panas, sebuah kebenaran pribumi yang menceritakan tentang masa lalu, menggabungkan seni, pertunjukan, dan sejarah. Hingga akhir tahun 2020, karya seni seniman Kimberley Timur terkenal Queenie McKenzie ditampilkan di depan umum untuk pertama kalinya. Museum Nasional Australia membeli lukisan itu pada tahun 2005 tetapi tidak pernah dipamerkan karena perbedaan pendapat tentang pembantaian yang digambarkannya. **“Mistake Creek Massacre”** akhirnya ditampilkan dalam pameran **“Talking Blak to History”** di National Art Gallery, yang bertujuan untuk menambahkan suara-suara pribumi ke dalam narasi sejarah Australia.

Proyek Pembantaian Kolonial di Garis Depan 1788-1930, Universitas Newcastle

Latar belakang

Proyek University of Newcastle adalah rekor pembantaian perbatasan pertama di seluruh Australia, Pekerjaan dimulai pada tahun 2014, sebagian besar sebagai tanggapan terhadap “perang sejarah” tahun 1990-an tentang praktek dan kekerasan pemukim kolonial, di mana akademisi memainkan peran utama. Akademisi yang memprakarsai proyek ini juga dipengaruhi oleh beasiswa internasional dan studi tentang pembantaian dalam konteks konflik yang berbeda.

Mandat

Proyek ini menetapkan lima tujuan:

- Lebih dari 4 tahap mengidentifikasi dan mencatat lokasi pembantaian di perbatasan terhadap orang Aborigin dan non-Aborigin di seluruh Australia dari tahun 1788 hingga 1930.
- Tetapkan metodologi yang jelas untuk menginterogasi beragam sumber.
- Menyediakan sumber yang dapat diandalkan bagi para peneliti.
- Menginformasikan debat publik tentang kekerasan perbatasan di garis depan pada masa kolonial.
- Memberikan pengetahuan akses terbuka kepada publik dan mengundang kontribusi.

Metodologi

Sejalan dengan praktik internasional, proyek tersebut mendefinisikan pembantaian di perbatasan kolonial sebagai pembunuhan yang disengaja dan melanggar hukum terhadap enam orang atau lebih dalam satu operasi.

Proyek ini memanfaatkan sumber-sumber arsip kolonial seperti catatan Pemerintah seperti laporan polisi dan pengadilan, surat kabar dan surat. Secara signifikan, akademisi juga membuka proyek untuk menerima informasi dari individu dan komunitas di seluruh negeri - termasuk keturunan penyintas. Dari informasi yang dikumpulkan dan dikuatkan, tim akademik membuat peta digital langsung yang menggambarkan

situs-situs pembantaian masyarakat pribumi di seluruh Australia di era kolonial.

Mulai tahun 2014, final dari empat tahap proyek selesai pada tahun 2021.

Temuan

Dalam menyajikan temuan awal, proyek secara eksplisit melaporkan bahwa “informasi di situs ini merupakan bukti terbaik yang tersedia untuk tim peneliti. Ini tetap dapat berubah dari umpan balik yang sedang berlangsung, konsultasi masyarakat dan penelitian. Tim peneliti mengundang saran dan koreksi.”

Proyek ini merinci berbagai karakteristik pembantaian kolonial dari informasi yang dikumpulkannya. Statistik proyek dan garis waktu peta menunjukkan bahwa pembantaian terus menyebar di seluruh perbatasan kolonial Australia dengan puncak yang mencolok dalam jumlah pembantaian dari tahun 1820-an hingga 1840-an di tenggara benua, tahun 1860-an dan 1870-an di Queensland dan pada tahun 1890-an di Northern Territory dan wilayah Kimberley di Australia Barat. Analisis awal menunjukkan bahwa agen negara terlibat dalam setidaknya 50% pembantaian.

Proyek ini mendokumentasikan 304 pembantaian yang dikuatkan, semua kecuali 12 di antaranya adalah pembantaian kelompok masyarakat pribumi. Temuan awal menunjukkan lebih dari 8.140 penduduk asli tewas dalam laporan yang dikuatkan ini, dan 146 pemukim (orang kulit putih).

Pembelajaran dan dukungan

Beberapa pelajaran dari proyek ini meliputi:

- Penggunaan teknologi digital yang inovatif untuk merekam dan menampilkan data historis dengan cara yang mudah diakses dan interaktif.
- Sifat proyek yang open source, memungkinkan publik untuk menambahkan informasi ke upaya penelitian sangat memperluas kumpulan informasi dan pengetahuan.
- Skala penelitian dan data, memberikan proses pengungkapan kebenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang pembantaian di kolonisasi Australia - khususnya tidak biasa sebagai proses pengungkapan kebenaran yang berfokus pada tahun-tahun awal kontak antara penjajah dan masyarakat pribumi, di luar kehidupan saat ini.
- Kemitraan kreatifnya dengan surat kabar Guardian Australia untuk membawa proyek ini ke khalayak nasional dan internasional.
- Konsultasi dengan institusi pendidikan pribumi Wollotuka Institute dan Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIATSIS) merupakan landasan penting untuk penelitian oleh institusi akademik non-pribumi.

Pembantaian Myall Creek: pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi lokal

Latar belakang

Pembantaian Myall Creek adalah salah satu pembantaian periode garis depan yang paling terkenal. Pada tahun 1838, peternak kulit putih memburu dan membunuh 28 pria, wanita, dan anak-anak Aborigin di Myall Creek di pedesaan New South Wales. Itu adalah satu-satunya saat beberapa pelaku pembantaian masyarakat pribumi dibawa ke pengadilan, dengan pengadilan kolonial menjatuhkan hukuman gantung kepada tujuh orang.

Pada tahun 1998, Gereja Uniting mengadakan konferensi rekonsiliasi di Myall Creek. Acara tersebut mengarah pada pembentukan **Friends of Myall Creek Memorial Committee**, sekelompok penduduk asli dan non-pribumi Australia, beberapa di antaranya adalah keturunan dari para korban dan pelaku pembantaian.

Metodologi

Pada tahun 2000, Komite mengatur agar sebuah tugu peringatan ditempatkan di lokasi tersebut. Setiap tahun upacara peringatan menarik ratusan orang dari seluruh negeri, termasuk keturunan, anggota masyarakat setempat, dan anak-anak sekolah. Situs ini telah terdaftar sebagai warisan, dan sekarang dianggap penting dalam narasi sejarah nasional. Ada rencana untuk pusat pendidikan bagi pengunjung, banyak dari mereka berasal dari sekolah-sekolah.

Pembelajaran dan dukungan

Dalam sebuah wawancara tahun 2013, Penatua Gamilaraay Auntie Sue Blacklock, keturunan korban dan korban pembantaian, dan pendiri situs peringatan dan peringatan tahunan mengatakan, “Ini telah mengangkat beban dari hati dan pundak saya untuk mengetahui bahwa kita dapat bersatu dalam persatuan, berkumpul dan berbicara dalam rekonsiliasi satu sama lain dan menunjukkan bahwa itu dapat berhasil, bahwa kita dapat hidup bersama dan bahwa kita dapat memaafkan. Dan itu benar-benar membuatku

merasa ringan. Saya tidak menemukan lagi beban di jiwa saya.”⁵

Selama konsultasi tentang pengungkapan kebenaran setelah Pernyataan Uluru dari Hati, para pemimpin masyarakat pribumi nasional berbicara tentang proses Myall Creek sebagai model untuk kegiatan pengungkapan kebenaran lokal yang dibutuhkan di seluruh negeri.

Simposium dan Laporan Kebenaran 2018

Pada Oktober 2018, **Reconciliation Australia** dan **The Healing Foundation** mengumpulkan para ahli dari seluruh negeri untuk sebuah Simposium pengungkapan kebenaran. Temuan, refleksi, dan rekomendasi dari Simposium dikumpulkan dalam sebuah laporan yang secara khusus diberikan komitmen untuk proses pengungkapan kebenaran di seluruh negeri.

Pekerjaan Yayasan Penyembuhan telah menguraikan perlunya pengungkapan kebenaran untuk mengatasi trauma dan rasisme yang dihadapi oleh masyarakat Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres. Yayasan - yang merupakan organisasi non-pemerintah Pribumi yang didirikan setelah laporan **Bringing Them Home** dari HREOC (lihat di atas) - menelusuri asal-usul trauma yang sedang berlangsung ini pada sejarah awal kekerasan Australia dan kebijakan genosida yang mengikutinya, termasuk pemindahan paksa anak-anak .

Dikatakan bahwa kurangnya pemahaman bersama tentang sejarah adalah sumber trauma yang berkelanjutan dan penghalang jalan menuju rekonsiliasi.

Rekonsiliasi Penelitian Australia menunjukkan bahwa sekitar sepertiga orang Australia tidak mengetahui atau menerima beberapa aspek mendasar dari sejarah bersama Australia, termasuk pembunuhan massal, penahanan, pemindahan paksa dari tanah dan pembatasan

5. Bagian wawancara Aunty Sue Blacklock bisa diakses online lewat 'the Australian Association of Social Workers': <https://www.aasw.asn.au/document/item/6227>

pergerakan.

The Truth Telling Symposium atau Simposium untuk Menceritakan Kebenaran bertujuan untuk menyelidiki, mendorong, dan berbagi cara agar pengungkapan kebenaran dapat mendukung penyembuhan dan rekonsiliasi di Australia. Ini berfokus pada:

- Pentingnya pengungkapan kebenaran.
- Kebenaran yang perlu diberitahukan.
- Berbagai praktik pengungkapan kebenaran yang mungkin berlaku di Australia.
- Prinsip panduan untuk proses masa depan.

Para peserta mengembangkan daftar sepuluh prinsip untuk memandu proses pengungkapan kebenaran di Australia:

1. Hak untuk mengetahui banyak kebenaran kita: Pengungkapan kebenaran harus mencakup ketidakadilan masa lalu dan kontemporer, memberdayakan banyak narasi, dan merangkul kompleksitas.
2. Keselamatan adalah yang terpenting: Waktu dan upaya harus dikerahkan untuk menciptakan ruang yang aman, termasuk cara untuk memastikan pengungkapan kebenaran dilakukan dengan cara yang aman secara budaya.
3. Pengakuan dan kontrol Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres: Masyarakat dan komunitas adat harus memimpin desain proses pengungkapan kebenaran dan narasi yang mereka buat, termasuk bagaimana keterlibatan terjadi, cerita apa yang diceritakan, dan catatan apa yang disimpan.
4. Dengarkan, saksikan, dan catat: Audiens harus dapat mendengarkan dan menerima kebenaran yang dibagikan. Catatan yang akurat harus disimpan dan masyarakat adat harus mempertahankan kepemilikan catatan yang berkaitan dengan kisah pribadi mereka.
5. Membangun dokumen kebenaran: Pengungkapan kebenaran harus diinformasikan oleh pekerjaan sebelumnya, khususnya UNDRIP dan Pernyataan Uluru dari Hati.
6. Inklusivitas dan timbal balik: Penduduk Non-Pribumi Australia, termasuk pendatang baru, memiliki peran penting dalam pengungkapan kebenaran.
7. Kepekaan waktu: Urgensi untuk mengatakan yang sebenarnya harus diimbangi dengan memberikan waktu untuk partisipasi luas dalam proses yang sulit.
8. Tanggung jawab, tindakan, dan akuntabilitas: Pengungkapan kebenaran membutuhkan tanggung jawab dan tindakan untuk memastikan

- ketidakadilan di masa lalu tidak terulang. Sumber daya diperlukan dan harus ada akuntabilitas untuk hasil.
9. Penyembuhan, keadilan, dan pembangunan bangsa: Pengungkapan kebenaran adalah proses yang tidak nyaman yang bukan tentang rasa malu atau bersalah, tetapi mendorong perubahan dan penerimaan yang positif.
 10. Pemberitaan kebenaran adalah anugerah: Pemberitaan kebenaran bermanfaat bagi bangsa, dan masyarakat harus didukung untuk menceritakan kisah yang ingin mereka ceritakan dengan cara yang ingin mereka sampaikan.

Selandia Baru

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Masyarakat pribumi membentuk sekitar 15% dari populasi Selandia Baru (Aotearoa). Suku Māori, orang-orang asal Polinesia, datang ke Selandia Baru dalam serangkaian perjalanan laut yang panjang sekitar abad ke-13. Orang Eropa pertama kali tiba pada awal abad ke-17, dan sejak akhir abad ke-18 ada kontak reguler dengan para pedagang, misionaris, dan pelaut. Seorang penduduk Inggris mendirikan kehadirannya pada tahun 1830-an, melapor kepada gubernur koloni Inggris di New South Wales. Pada tahun 1841, Selandia Baru menjadi koloni Inggris dengan sendirinya.

Perjanjian Waitangi ditandatangani pada 6 Februari 1840 antara Inggris dan sekitar 40 kepala suku Māori. Lebih dari 500 ratus kepala suku, semuanya kecuali 39, menandatangani dalam upacara di seluruh negeri tahun itu. Terlepas dari Perjanjian tsb., ketika pemukiman kolonial meluas, konflik pun terjadi. Tahun 1840-an hingga 1870-an adalah periode kekerasan yang dikenal sebagai Perang Selandia Baru, diikuti oleh perampasan tanah dan marginalisasi hukum, ekonomi dan sosial suku Māori melalui dominasi budaya dan kebijakan asimilasi selama abad ke-20.

Dianggap sebagai dokumen pendirian Selandia Baru, Perjanjian tersebut telah menjadi sumber perdebatan dan kontroversi yang konstan. Perjanjian adalah pernyataan prinsip yang luas, bukan konstitusi atau undang-undang, yang menetapkan kesepakatan umum antara Inggris dan Māori untuk mendirikan negara-bangsa dan membangun pemerintahan.

Dari penandatanganannya, Perjanjian telah dipahami secara berbeda oleh para pihak, sebagian besar karena berbagai versi bahasa Inggris dan Māori. Dalam versi bahasa Inggris, Māori menyerahkan kedaulatan mereka ke Inggris dengan imbalan perlindungan hak

milik mereka atas tanah dan sumber daya alam. Namun, dalam versi Māori, yang diserahkan adalah otoritas pemerintahan daripada kedaulatan.

Status Perjanjian telah berkembang dan sekarang dianggap sebagai dokumen konstitusional. Selandia Baru tidak memiliki konstitusi tertulis tunggal, melainkan kumpulan hukum umum, kebiasaan, dan undang-undang. Namun, sebagai perjanjian internasional, status Perjanjian dalam hukum Selandia Baru kurang diselesaikan. Hak perjanjian hanya dapat ditegakkan di pengadilan ketika undang-undang atau undang-undang secara eksplisit mengacu pada Perjanjian. Pada tahun 1975, Pengadilan Waitangi membantu mengatasi masalah ini.

Pengadilan Waitangi

Latar belakang

Selama lebih dari satu abad, Māori mencoba menyelesaikan keluhan dengan Mahkota melalui jalur hukum seperti petisi dan kasus pengadilan, dengan sedikit keberhasilan. Dari tahun 1960-an dan 70-an muncul gerakan Māori yang menyerukan kesetaraan yang lebih besar dan penghentian penjualan tanah suku Māori. Seiring waktu, protes Māori bergeser dari mencela Perjanjian menjadi menyerukan Pemerintah untuk menghormati kewajibannya berdasarkan perjanjian tsb. Pada tahun 1975, pawai tanah Māori di Parlemen adalah momen yang menentukan.

Mandat

Pada tahun 1975 Pengadilan Waitangi didirikan oleh tindakan parlemen dengan hak eksklusif untuk menentukan arti dari Perjanjian tsb. dan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran-pelanggarannya. Pengadilan Waitangi adalah komisi penyelidikan tetap, bukan pengadilan atau lembaga sementara. Ini adalah lembaga unik yang dikembangkan untuk memfasilitasi hubungan negara-masyarakat pribumi.

Pengadilan mempertimbangkan klaim yang diajukan oleh orang Māori, mengklaim pelanggaran Perjanjian Waitangi yang berkaitan

dengan undang-undang, kebijakan, tindakan atau kelalaian oleh Pemerintah. Peranan Tribunal meliputi:

- Menanyakan dan membuat rekomendasi tentang klaim yang beralasan.
- Meneliti dan melaporkan undang-undang yang diusulkan.
- Membuat rekomendasi atau penetapan tentang lahan untuk hutan Kerajaan (Inggris), perkeretaapian, badan usaha milik negara, dan lembaga pendidikan.

Ketika mempertimbangkan Perjanjian, Pengadilan berfokus pada prinsip-prinsipnya, yang meliputi:

- Kemitraan: Māori dan negara, sebagai mitra Perjanjian, memiliki kewajiban untuk bertindak secara wajar terhadap satu sama lain dan sepenuhnya dengan itikad baik.
- Perlindungan aktif: Traktat menetapkan jaminan yang membebaskan kewajiban positif pada negara.
- Ganti rugi: Dimana kewajiban Perjanjian dilanggar, ganti rugi harus diberikan.

Pengadilan tidak memiliki kekuatan wajib tetapi dapat melaporkan klaim dan membuat rekomendasi. Dua pengecualian adalah bahwa Pengadilan dapat mengarahkan tanah Perusahaan Negara dan Hutan Mahkota untuk dikembalikan ke Māori, meskipun kekuasaan ini jarang digunakan.

Metodologi

Pengadilan telah berkembang selama lebih dari 40 tahun. Mandat dan prosesnya lebih luas daripada pengadilan, karena ia mengambil pendekatan multi-disiplin untuk menyelidikannya.

Saat memeriksa klaim, Pengadilan melakukan penelitian sejarah yang terperinci, di luar proses persidangan yang mendengarkan bukti dari para pihak. Pengadilan secara proaktif mencari kebenaran, tidak terbatas pada mendengarkan pengajuan dari penggugat dan pemerintah Māori.

Pengadilan berusaha untuk menjadi bikultural dan bilingual. Sekitar setengah dari anggotanya adalah Māori, dan setidaknya satu Māori harus duduk di setiap panel. Anggota yang bertambah dari tiga menjadi 20, belum tentu berlatar belakang hukum. Mereka mungkin memiliki kualifikasi dalam sejarah, atau sebagai penatua, pebisnis, atau orang lain yang memiliki kedudukan. Banyak bukti diambil dalam bahasa Māori.

Pengadilan mengadakan dengar pendapat di “kainga”, di rumah pertemuan adat

di desa-desa, di depan masyarakat yang mengajukan gugatan. Dengar pendapat diadakan sebanyak mungkin sesuai dengan adat Māori setempat. Upacara penyambutan membuka setiap dengar pendapat, dan dimulai dengan diakhiri dengan doa setiap hari.

Temuan dan rekomendasi

- Pada tahun-tahun awalnya, Pengadilan tidak memberikan dampak yang signifikan dan hanya sedikit saja yang diketahui. Hingga awal 1980-an, Pengadilan hanya mempertimbangkan beberapa hal saja.
- Pada 1980-an, Pengadilan mulai mendengar lebih banyak klaim di bawah proses bikultural, kurang formal dalam penggunaan hukum barat dan lebih relevan secara budaya dengan orang Māori. Audiensi sering diadakan di tanah penggugat, di kompleks tradisional mereka, dan bukti dapat diberikan dalam bahasa Māori.
- Ketika dibentuk pada tahun 1975, Pengadilan hanya berwenang untuk menangani hal-hal yang timbul setelah tanggal Undang-Undang. Namun, keluhan utama Māori berasal dari abad ke-19 dan khususnya periode perampasan tanah. Satu argumen adalah bahwa tidak ada bukti sejarah yang cukup untuk mendengar keluhan sebelumnya. Sebuah undang-undang tahun 1985 memungkinkan Pengadilan untuk mempertimbangkan keluhan historis sejak tahun 1840, dan ada peningkatan besar dalam klaim. Lonjakan ini mempengaruhi cara Pengadilan mempertimbangkan klaim tsb. Untuk mengelola arus masuk yang besar, sejak tahun 1996 Pengadilan meluncurkan apa yang dikenal sebagai sistem penyelidikan distrik. Penelitian rinci di tingkat kabupaten disusun ke dalam buku kasus kabupaten, dan dengar pendapat tingkat kabupaten dilakukan. Proses ini telah menjadi fokus utama Pengadilan selama dua dekade terakhir, dan pada tahun 2021 sebagian besar penyelidikan tingkat distrik telah diselesaikan, 37 seluruhnya. Namun, pada tahun 2008 parlemen mencabut kewenangan Pengadilan untuk mempertimbangkan klaim sejarah baru.
- Pemerintah membentuk Office of Treaty Settlements untuk mengembangkan kebijakan tentang klaim sejarah yang kompleks. Setelah rekomendasi Pengadilan, kantor ini merundingkan penyelesaian dengan pihak Māori.
- Sebagai komisi penyelidikan tetap, Pengadilan menggunakan metodologi pencarian kebenaran yang proaktif. Pendekatan ini telah mempromosikan sebuah proses yang didasarkan pada itikad baik, pembangunan kepercayaan dan kemitraan lebih dari yang akan dilakukan oleh sistem peradilan yang bermusuhan.
- Pengadilan telah melakukan penyelidikan, mendengar bukti, dan mengeluarkan laporan dan rekomendasi kepada pemerintah atas berbagai klaim, termasuk yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam, hak

penangkapan ikan, perlindungan bahasa dan kebijakan penyiaran, dan penyampaian layanan sosial, serta hukum dan kebijakan mempengaruhi pengetahuan tradisional dan budaya Māori.

Pembelajaran dan dukungan

Keberhasilan:

- Pengadilan Waitangi adalah mekanisme dan proses tanpa perbandingan yang nyata. Ini adalah penyelidikan nasional berdiri dengan pengaruh langsung pada kasus dan kebijakan nasional mengenai hubungan antara masyarakat pribumi dan non-pribumi.
- Aktivisme Māori yang berkelanjutan pada tahun 1960-an dan 1970-an yang menuntut tindakan atas warisan kolonial yang tidak adil menciptakan kondisi untuk pembentukan Pengadilan.
- Perjanjian Waitangi tahun 1840 memberikan fokus dan struktur yang jelas pada investigasi Pengadilan, bahkan saat Pengadilan membantu menghidupkan Perjanjian di Selandia Baru modern. Di negara-negara tanpa Perjanjian antara masyarakat pribumi dan non-pribumi, proses seperti itu akan lebih sulit.
- Mandat awal, operasi dan dampak Pengadilan terbatas. Menjadi komisi penyelidikan tetap daripada komisi kebenaran jangka pendek atau penyelidikan memungkinkan badan tersebut untuk berkembang dan memperkuat relevansinya dengan tantangan historis dan kontemporer.
- Jangka waktu terbuka ini juga membantu Pengadilan mengembangkan cara baru untuk mengelola klaim. Pada awal 1990-an, dengan tumpukan ratusan klaim historis, Pengadilan mengembangkan sistem penyelidikan distrik untuk merampingkan penelitian tentang isu-isu utama di setiap distrik dan isu-isu penting secara nasional. Pada tahun 2000-an, Pengadilan mengembangkan “Pendekatan Baru” untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian lebih cepat. Ini membantu Māori dan partai-partai pemerintah mengidentifikasi bidang-bidang kesepakatan, memungkinkan identifikasi cepat atas isu-isu yang lebih kontroversial.
- Pengadilan tidak selalu populer, dan telah bertahan dari periode kontroversi dan seruan untuk penghapusannya. Sebagai komisi penyelidikan yang berdiri, Pengadilan berjalan di garis antara menjadi badan hukum yang mempertimbangkan klaim, sementara juga memainkan peran penting dalam kebijakan dan keputusan sosial dan politik.
- Pengadilan sering berjalan di atas tali, menegaskan otoritasnya namun bertindak secara terkendali pada isu-isu yang menyebabkan reaksi publik. Misalnya, masalah pengembalian tanah dan reparasi tanah sering menjadi kontroversi. Sementara undang-undang memberikan kekuasaan kepada Pengadilan untuk mengarahkan agar tanah Perusahaan Negara dan

Hutan Kerajaan dikembalikan ke Māori, kekuasaan ini jarang digunakan. Dalam Laporan Te Roroa tahun 1992, Pengadilan merekomendasikan pengembalian tanah pribadi, menyebabkan kemarahan publik dan undang-undang membatasi pengembalian ke tanah Kerajaan.

- Pengadilan telah mengambil pendekatan bahwa ganti rugi finansial untuk kehilangan tanah akan terlalu rumit dan di luar kemampuan negara. Ia juga menemukan bahwa keluhan masyarakat adat tidak dapat diatasi dengan kompensasi uang saja. Pengadilan mendukung penyelesaian berwawasan ke depan untuk memulihkan basis ekonomi yang hilang bagi masyarakat sambil menangani masalah mendasar hilangnya otonomi suku atau kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri melalui adat. Pada tahun 2000-an, selain paket keuangan, penyelesaian biasanya mencakup permintaan maaf resmi dan pengakuan asosiasi budaya dengan tanah, termasuk penggantian nama tempat secara resmi.
- Langkah Pengadilan untuk menjadi relatif informal dalam hal prosedur hukum barat, dan memusatkan prosesnya dalam budaya dan bahasa Māori, telah membantu membuatnya relevan dan kredibel bagi komunitas Māori.
- Pemerintah telah mempromosikan rute yang lebih cepat, bernegosiasi langsung dengan pemerintah. Namun, orang Māori telah menunjukkan bahwa mereka lebih suka proses yang lebih lambat dan lebih mahal untuk bekerja melalui Pengadilan, sebagai tanda kredibilitasnya.
- Mandat Pengadilan memungkinkan rekomendasi di luar apa yang bisa dilakukan pengadilan ketika mempertimbangkan kasus individu. Pengadilan mempengaruhi kebijakan dan undang-undang sosial utama, membawa perubahan luas seperti menjadikan Māori sebagai bahasa resmi negara tersebut. Badan seperti Pengadilan mungkin lebih cocok untuk menangani keluhan historis mendasar dari masyarakat adat yang mencakup, tetapi lebih dari itu, legalitas untuk memasukkan faktor sosial dan politik sebagai inti dari kontrak sosial koeksistensi dengan masyarakat non-pribumi.
- Meskipun Pengadilan membuat sebagian besar rekomendasi yang tidak mengikat, sebagian besar keputusan telah dilaksanakan secara penuh atau sebagian oleh pemerintah.
- Pengadilan telah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan Pribumi-non-Pribumi sepanjang sejarah Selandia Baru, warisan pendidikan yang mungkin melampaui negara lain dengan sejarah kolonial. Pengadilan memberikan kontribusi besar bagi kesadaran publik tentang keluhan sejarah Māori dan masalah serta budaya kontemporer.
- Menggabungkan dampak-dampak ini, Pengadilan Waitangi dapat dianggap sebagai faktor utama dalam pergeseran paradigma dalam wacana resmi dan publik yang berkaitan dengan hak-hak Māori.
- Orang Māori berperan aktif dalam mengembangkan Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat. Sejak itu, Tribunal mengacu pada standar internasional

dalam laporannya, menunjukkan bagaimana Deklarasi dapat memperkuat pendekatan nasional.

Kendala:

- Kendala sumber daya keuangan telah menghambat Pengadilan di banyak kesempatan.
- Proses Pengadilan bisa sangat lambat, dengan jarak yang panjang antara proses penelitian dan sidang dan laporan. Ini sebagian tidak dapat dihindari, karena klaim historis, terutama klaim tanah, bersifat kompleks dan sensitif, melibatkan banyak perspektif.
- Pengadilan bergantung pada undang-undang untuk keberadaan dan kekuasaannya, dan pada pemerintah untuk pelaksanaan sebagian besar temuan dan rekomendasi. Pengadilan mendekati pekerjaannya melalui lensa kemitraan antara Māori dan non-Māori, dan penyelesaian bergantung pada pemerintah yang mengadopsi semangat kemitraan yang sama ini. Semangat ini bervariasi antara pemerintah yang berubah, dan ada kritik yang signifikan terhadap pendekatan pemerintah terhadap penyelesaian berdasarkan kekuatan yang tidak setara di antara para pihak.





B A B

05

EROPA

*Bendera Sami berkibar di kawasan
eksplorasi Kallak dekat desa
Randijaur, 40 km barat laut
Jokkmokk di Lappland Swedia.
November, 2013.*

*(Photo oleh Jonathan Nackstrand/
AFP, lewat Getty Images).*

Greenland

Komisi Rekonsiliasi Greenland (2014–17)

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

50.000 yang mencolok dari populasi 56.000 Greenland adalah orang-orang Inuit Asli. Greenland, juga dikenal sebagai Kalaallit Nunaat, secara bertahap mencapai lebih banyak kedaulatan. Dijajah oleh Denmark pada tahun 1700-an, pada tahun 1953 tidak lagi menjadi koloni, dan sejak 1979 telah menjadi negara yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam Kerajaan Denmark. Undang-Undang tentang Pemerintahan Sendiri Greenland tahun 2009 mengakui penduduk Greenland sebagai rakyat berdasarkan hukum internasional dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Setelah pemilihan pemerintahan baru pada tahun 2013, kepemimpinan politik Greenland bertujuan untuk bergerak menuju kemerdekaan.

Percaya dekolonisasi mental akan mempersiapkan Greenlanders untuk memutuskan hubungan dengan Denmark, Pemerintah membentuk komisi rekonsiliasi. Badan semacam itu dapat mengatasi kurangnya kesadaran sejarah di antara penduduk Greenland, dan kebutuhan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, karena kontrol Denmark atas narasi dan sejarah mereka. Denmark meratifikasi Konvensi ILO 169 pada tahun 1996, dan telah mengesahkan **UNDRIP**.

Mandat

Komisi Rekonsiliasi Greenland didirikan pada tahun 2014. Enam komisioner mewakili wilayah, etnis dan kelompok bahasa Greenland, dengan pergantian yang cukup besar selama melaksanakan tugas.

Komisi melihat kebijakan kolonial, seperti membayar pekerja Inuit lebih sedikit, memindahkan keluarga dari tanah tradisional mereka ke pemukiman, dan mengirim anak-anak ke Denmark untuk sekolah.

Metodologi

Para komisaris sejak awal memutuskan untuk tidak fokus pada 250 tahun pertama penjajahan Denmark, melainkan dampak merugikan dari kebijakan pada periode 1953–1979, setelah Greenland secara resmi berhenti menjadi koloni. Salah satu alasannya adalah Komisi dapat mengakses informan yang hidup selama periode ini. Periode ini dikenal sebagai periode modernisasi, di mana kebijakan asimilasi — kadang disebut Danifikasi — berusaha menghilangkan budaya Greenland.

Denmark menolak untuk berpartisipasi dalam Komisi, dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Komisi kemudian merumuskan definisi empat sisi yang hanya berurusan dengan rekonsiliasi di Greenland:

1. Rekonsiliasi pribadi dengan diri sendiri dan latar belakang;
2. Rekonsiliasi dengan masa lalu;
3. Rekonsiliasi antar kelompok dalam masyarakat; dan
4. Rekonsiliasi antar generasi.

Komisi melibatkan masyarakat dengan memberikan kesaksian, melakukan dengar pendapat, dan mengembangkan proyek artistik untuk mempromosikan inklusi/ keterlibatan semua pihak. Sebuah konferensi menandai berakhirnya Komisi, saat laporan akhir disampaikan ke parlemen. Komisi tidak mengambil pendekatan yang sangat legalistik untuk pekerjaan ini.

Temuan dan rekomendasi

Laporan akhir dirilis pada Desember 2017, dalam bahasa Denmark dan Kalaallisut, dialek bahasa Greenland. Di antara 11 rekomendasi, laporan tersebut mendesak Pemerintah Greenland untuk mengembangkan rencana aksi nasional guna menceritakan kisah Greenland dari sudut pandang Greenland; mendirikan pusat pengetahuan untuk mengumpulkan dan mempromosikan sejarah Greenland yang berpusat pada Inuit; membuat dana rekonsiliasi untuk mendukung penyembuhan, rekonsiliasi dan pemulihan; dan untuk memperkuat penggunaan bahasa Greenland di semua jenjang masyarakat. Ini menyerukan debat nasional tentang permintaan maaf publik untuk gerakan paksa, eksperimen sosial, dan perasaan menjadi warga negara peringkat kedua.

Pembelajaran dan dukungan

- Greenland adalah contoh langka dari sebuah wilayah yang melakukan

proses pengungkapan kebenaran tanpa dukungan dari Pemerintah Pusat, dan maksud dari proses tersebut adalah untuk membuka jalan menuju kemerdekaan.

- Para kritikus menilai bahwa Komisi memiliki keberhasilan yang terbatas dalam berhubungan dengan publik, kesadaran publik yang terbatas tentang pekerjaannya, dan sedikit bukti tentang dampak yang bertahan lama.

Norway, Finland, Sweden

Norwegia, Finlandia, Swedia: Suku Sámi di Skandinavia Utara

Latar belakang proses pengungkapan kebenaran

Sámi adalah penduduk pribumi di bagian Utara Semenanjung Skandinavia dan sebagian besar Semenanjung Kola, di Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Rusia. Ada informasi terbatas tentang populasi pasti orang Sámi, tetapi diperkirakan antara 50.000 hingga 100.000, dengan jumlah terbesar di Norwegia dan paling sedikit di Rusia.

Orang-orang Sámi diwakili oleh tiga parlemen Sámi, di Swedia, Norwegia dan Finlandia. Di Rusia, komunitas Sámi diorganisir melalui organisasi non-pemerintah. Pada tahun 2000, tiga parlemen membentuk dewan bersama yang disebut Dewan Parlemen Sámi. Setidaknya sejak abad ke-19, Pemerintah-pemerintah di Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Rusia menerapkan kebijakan asimilasi yang agresif. Sistem pendidikan dan gereja-gereja Kristen mengecilkan atau menekan bahasa dan budaya Sámi dan secara paksa mengasimilasi anak-anak ke dalam budaya yang dominan.

Saat ini, orang Sámi sebagian besar tinggal di kota-kota, meskipun sejumlah besar tetap berada di desa-desa di Kutub Utara. Mereka masih menghadapi hilangnya bahasa dan budaya yang disebabkan oleh generasi anak-anak Sámi yang dibawa ke sekolah-sekolah misionaris dan sekolah berasrama yang dikelola negara. Mereka juga menentang warisan hukum untuk menolak hak Sámi atas kepercayaan, bahasa, tanah, dan mata pencaharian tradisional

mereka. Ancaman budaya dan lingkungan lebih lanjut datang dari eksplorasi minyak, pertambangan, pembangunan bendungan, penebangan hutan, daerah pengeboman militer, pariwisata, pengembangan komersial dan dampak perubahan iklim.

Parlemen Sámi telah mengusulkan Komisi Kebenaran untuk menangani diskriminasi sistemik. Mereka sebagian terinspirasi oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Kanada, sebuah negara kaya dan stabil yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap masyarakat pribumi Arktik. Beberapa pemimpin Sámi menginginkan Komisi Kebenaran yang sama di seluruh wilayah mereka, tetapi ini terlalu menantang secara politis bagi empat negara yang terlibat.

Norwegia: Komisi untuk menyelidiki kebijakan dan ketidakadilan norwegianisasi terhadap masyarakat Sámi dan Kven/Norwegia Finlandia (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: 2017– sekarang)

Latar belakang proses pencarian kebenaran

Norwegia adalah rumah bagi populasi terbesar orang Sámi, yaitu sekitar 40.000 orang.

Sampai akhir abad ke-20, Penguasa Norwegia memberlakukan kebijakan asimilasi terhadap Sámi dan Kvens (atau Finlandia Norwegia). Kebijakan tersebut memiliki konsekuensi serius bagi budaya, bahasa, identitas dan kondisi kehidupan mereka, dan terus mempengaruhi hubungan mereka dengan mayoritas penduduk. Juga disebut kebijakan Norwegianisasi, itu meminggirkan dan menindas komunitas masyarakat pribumi.

Pada tahun 1988, konstitusi Norwegia diubah untuk membuat Pemerintah bertanggung jawab menjaga hak-hak masyarakat Sámi dalam mengembangkan budaya, bahasa, dan masyarakat mereka sendiri. Parlemen Sámi dibentuk pada tahun 1989, dan Norwegia adalah negara pertama yang meratifikasi Konvensi ILO 169, pada tahun 1990. Norwegia telah mengesahkan **UNDRIP**.

Pada bulan September 2017, dengan Parlemen Sámi sebagai kekuatan pendorong, Parlemen Norwegia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) untuk menyelidiki kebijakan negara yang represif selama berabad-abad terhadap Penduduk Asli Sámi dan minoritas Kven.

Mandat

Komisi ini memiliki 3 bagian mandat:

- Untuk menghasilkan survei historis kebijakan dan kegiatan Norwegia terhadap Sámi dan Kven, secara lokal, regional dan nasional.
- Untuk menyelidiki dampak dari kebijakan Norwegianisasi, termasuk bagaimana hal itu memengaruhi pandangan mayoritas penduduk, dan signifikansinya hingga hari ini.
- Untuk menyarankan langkah-langkah bagi rekonsiliasi lebih lanjut.

Mandat komisi terutama untuk mendokumentasikan dan menganalisis sejarah. Tugas utamanya adalah melakukan “pemetaan sejarah” terhadap kebijakan tiga masyarakat pribumi di Utara Norwegia — Sámi, Kven, dan Skogfinn (Norwegia untuk “Finns of the forest”) — dari sekitar 1800 hingga saat ini.

Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bersama tentang bagaimana penguasa dan masyarakat Norwegia memberlakukan penduduk pribumi dan budaya mereka, meletakkan dasar untuk rekonsiliasi antara penduduk pribumi dan mayoritas.

Metodologi

Ke-12 komisaris memimpin upaya untuk mengumpulkan cerita dari individu dan kelompok dalam pertemuan, wawancara, dan pengajuan secara tertulis atau rekaman. Komisi juga berencana untuk memeriksa penelitian yang ada, mengisi kesenjangan yang diperlukan melalui kemitraan dengan lembaga penelitian.

Komisi berkomitmen untuk terlibat dengan upaya terkait penduduk Sámi yang terjadi di negara lain selama proses berlangsung.

Komisi dijadwalkan untuk menyelesaikan pekerjaannya pada September 2022, ketika akan menyerahkan laporannya ke Parlemen.

| Swedia

Latar belakang proses pencarian kebenaran

Sekitar 20.000 orang Sámi tinggal di Swedia. Pada tahun 2015, Parlemen Sámi di Swedia, bersama dengan Ombudsman Kesetaraan, mulai menjajaki kondisi untuk memulai proses kebenaran dan rekonsiliasi. Orang Sámi dan Gereja Swedia telah mengerjakan Buku Putih untuk menyelidiki tindakan historis Gereja terhadap orang Sámi.

Pada tahun 2019 pemerintah mengumumkan Komisi Kebenaran Sámi untuk menjelaskan ketidakadilan terhadap masyarakat pribumi oleh negara Swedia. Pekerjaan persiapan dimulai pada tahun 2020. Swedia telah mengesahkan **UNDRIP**, tetapi belum meratifikasi Konvensi ILO 169.

Metodologi

Pekerjaan Komisi akan dilakukan oleh Samediggi, yaitu suatu majelis 31 kursi masyarakat pribumi terpilih yang melindungi hak-hak orang Swedia Utara dari warisan Sámi. The Samediggi juga bertindak sebagai lembaga otonomi budaya.

| Finlandia

Latar belakang proses pencarian kebenaran

Finlandia adalah rumah bagi sekitar 10.500 orang Sámi. Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Parlemen Sámi dan Parlemen Sámi di Finlandia termasuk diskusi tentang transmisi trauma antargenerasi, hilangnya bahasa dan budaya, dampak dari sekolah berpola asrama, kebijakan asimilasi dari empat negara dan kebijakan kolonisasi.

Mengikuti proposal dari Parlemen Sámi pada Oktober 2017, pemerintah dan Sámi meluncurkan persiapan untuk proses kebenaran dan rekonsiliasi. Pada tahun 2018 konsultasi luas berlangsung di tanah air Sámi dan kota-kota terbesar di Finlandia. Pada tahun 2019, Perdana Menteri menyetujui proposal untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Orang Sámi, dan Parlemen Sámi menyetujuinya pada akhir tahun.

Finlandia telah mengesahkan **UNDRIP** tetapi belum meratifikasi Konvensi ILO 169.

Mandat

Selama negosiasi mandat, Sámi bersikeras bahwa proses pencarian fakta dan kebenaran diperlukan sebelum berfokus pada rekonsiliasi. Sámi juga bersikeras untuk mengakui sejarah mereka.

Amanat komisi tersebut diperkirakan akan dimulai sejak Finlandia merdeka dari penjajahan Rusia pada tahun 1917. Karena pandemi Covid membuat komisi tersebut tertunda, dan batas waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang hingga akhir tahun 2023. Komisi tsb. diharapkan akan diangkat pada tahun 2021.



PEMBELAJARAN & PERTIMBANGAN



Papan pengumuman yang dibuat oleh masyarakat pribumi di Boven Digoel dengan pesan 'Tanah Adat.' Masyarakat pribumi di daerah ini sedang terlibat dalam perjuangan untuk mempertahankan tanah mereka dari perkebunan kelapa sawit.

(Foto oleh AJAR/PWG, 2019).

Beberapa pembelajaran dan pertimbangan umum muncul dari studi kasus. Ini relevan untuk para pendukung dan komunitas masyarakat pribumi dan non-pribumi, apakah proses pengungkapan kebenaran yang diusulkan akan mencakup masyarakat pribumi di antara korban lainnya, atau apakah itu akan secara eksklusif berfokus pada pelanggaran hak-hak masyarakat pribumi.

Pembelajaran dapat dibagi menjadi pembelajaran yang akan diterapkan sebelum, selama dan setelah Komisi Kebenaran. Namun demikian, secara menyeluruh semua tahapan adalah kepentingan mendasar dari penerapan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi (UNDRIP) untuk memandu pengungkapan kebenaran dari tahap awal mempertimbangkan proses pengungkapan kebenaran hingga pekerjaan tindak lanjut telah selesai. Sebagian besar negara telah mendukung deklarasi tersebut, dan deklarasi tersebut dapat memastikan proses pengungkapan kebenaran didasarkan pada kerangka kerja hak asasi manusia internasional.

Sebelum

Apakah akan membangun proses pengungkapan kebenaran

Apakah masyarakat pribumi menginginkan proses pengungkapan kebenaran? Setiap proses yang berimplikasi pada masyarakat adat harus didasarkan pada persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka. Persetujuan ini memerlukan proses konsultasi yang mendalam sebelum keputusan untuk membentuk Komisi Kebenaran. Organisasi dan kepemimpinan masyarakat pribumi harus menjadi mitra sejak awal dan harus mewakili keragaman dalam komunitas masyarakat pribumi.

Badan seperti apa yang harus melakukan proses pengungkapan kebenaran: status dan komposisinya

Studi kasus menunjukkan banyak format yang dapat diambil oleh suatu proses. Setiap konteks memiliki peluang dan hambatan yang mungkin membuat beberapa format lebih menarik dan memungkinkan daripada yang lain. Pertimbangan-pertimbangannya meliputi:

- Proses pengungkapan kebenaran dapat dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau keputusan. Badan ini dapat berupa lembaga hak asasi manusia nasional yang ada atau lembaga yang telah dibentuk untuk melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat pribumi. Lembaga atau badan penyidik dapat berada di tingkat nasional dengan mandat nasional, atau di tingkat wilayah dengan fokus yang lebih lokal. Apapun bentuknya, badan tersebut harus kredibel di mata masyarakat pribumi, sekaligus memiliki status untuk mempengaruhi pengambil keputusan.
- Di negara-negara di mana tindakan resmi belum memungkinkan, mungkin ada ruang bagi masyarakat sipil — Pribumi dan non-Pribumi — untuk berkolaborasi dalam proses pengungkapan kebenaran, yang dapat menjadi penting untuk advokasi berkelanjutan. Pendekatan ini mungkin lebih dapat dicapai di tingkat lokal dalam banyak kasus.
- Komposisi badan yang melakukan penyelidikan adalah penting, dengan jumlah dan keragaman komisariss masyarakat pribumi yang memadai untuk membentuk proses kepemimpinan yang kredibel. Komisioner perempuan yang memadai penting untuk mempromosikan partisipasi dan perspektif perempuan dalam proses pengungkapan kebenaran.

- Struktur tata kelola dan penasihat dengan perwakilan masyarakat pribumi dapat memandu pekerjaan komisi dan memberikan integritas proses.

Mandat

Apa yang masyarakat pribumi ingin fokuskan pada proses pengungkapan kebenaran, periode waktu apa yang mereka inginkan untuk diperiksa oleh investigasi, dan proses seperti apa yang mereka inginkan?

Proses pengungkapan kebenaran dapat:

- Fokus pada tema khusus yang mempengaruhi komunitas masyarakat pribumi seperti pemindahan anak-anak, wanita yang dibunuh dan hilang, atau kematian dalam tahanan.
- Fokus pada pengalaman sejarah penuh masyarakat pribumi dari penjajahan hingga zaman modern, termasuk memeriksa kehidupan pra-kolonial.
- Memeriksa pelanggaran terhadap masyarakat pribumi di antara korban lainnya, sebagai bagian dari Komisi Kebenaran pasca-konflik atau pasca rezim otoriter.

Masyarakat pribumi harus diajak berkonsultasi tentang apa yang mereka yakini sebagai fokus mandat, dan melalui proses seperti apa. Proses pengungkapan kebenaran telah secara konsisten menunjukkan bahwa untuk memeriksa pelanggaran hak-hak masyarakat pribumi bahkan yang relatif kontemporer, penting untuk memeriksa penyebab yang mendasarinya, kembali ke kontak pertama dan periode kolonial awal. Mandat harus dirancang untuk memungkinkan pemeriksaan penyebab mendasar ini, bahkan jika fokus spesifiknya adalah masalah tematik tunggal atau pelanggaran selama konflik baru-baru ini.

Dalam komisi kebenaran pasca-konflik, bagaimana suatu proses dapat memastikan keterlibatan masyarakat pribumi dan pemeriksaan yang memadai atas penyebab-penyebab yang mendasarinya dan berbagai hak-hak yang luas?

- Ada risiko bahwa Komisi Kebenaran pasca-konflik yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap masyarakat pribumi di antara korban lainnya gagal menangani pengalaman dan harapan masyarakat pribumi secara memadai. Masyarakat pribumi tidak boleh terpinggirkan lebih jauh oleh komisi semacam itu. Dalam melibatkan pemangku kepentingan pribumi, sebuah komisi harus dipandu di semua tahap oleh **UNDRIP**.
- Bahkan jika mandat terbatas pada kerangka waktu kontemporer, komisi harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan masyarakat pribumi untuk memastikan interpretasi mandat dan metodologi memungkinkan

- pemeriksaan yang memadai dari penyebab yang mendasarinya.
- Pada tahap pembuatan mandat, pengambil keputusan harus berkonsultasi dengan masyarakat adat untuk menentukan apakah masalah hak sosial, ekonomi dan budaya tercakup, termasuk hak kolektif masyarakat pribumi atas tanah, wilayah dan sumber daya. Sebagian besar mandat Komisi Kebenaran pasca-konflik berfokus pada hak-hak sipil dan politik, khususnya kekerasan serius terhadap tubuh seperti pembunuhan, penyiksaan, penghilangan, dan kekerasan seksual.

Pertanyaan tematik sebagai cara yang dapat diakses untuk menceritakan kebenaran masyarakat pribumi.

Di Australia dan Kanada, proses awal pengungkapan kebenaran berfokus pada tema-tema tertentu, seperti kematian dalam tahanan dan pemindahan anak-anak. Sementara investigasi tematik seperti itu mungkin tidak mengungkapkan semua aspek kebenaran pelanggaran terhadap masyarakat adat, mereka dapat masuk lebih dalam ke isu-isu spesifik sambil menjelaskan penyebab yang mendasarinya. Penyelidikan tematik mungkin lebih dapat dicapai di mana masyarakat adat berjuang untuk mendapatkan pengakuan.

Penyelidikan tematik juga dapat dilakukan oleh lembaga yang sudah ada seperti komisi hak asasi manusia nasional, atau lembaga hak masyarakat adat, yang mungkin lebih dapat dicapai daripada membentuk entitas baru yang berdiri sendiri.

Gelombang baru pengungkapan kebenaran masyarakat pribumi

Gelombang baru komisi kebenaran sedang muncul, berfokus pada pengalaman masyarakat pribumi dengan mandat luas untuk pengungkapan kebenaran. Di tiga Komisi Kebenaran Skandinavia, Kalifornia, dan Australia, proses pengungkapan kebenaran saat ini dan yang direncanakan berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman sejarah penuh masyarakat pribumi. Dalam beberapa konteks, seperti Australia, masyarakat pribumi melihat ini sebagai langkah yang diperlukan dalam membangun kembali hubungan antara masyarakat pribumi dan negara, serta hubungan antar masyarakat.

Komisi-komisi ini memiliki kerangka kerja yang lebih luas daripada fokus tematik penyelidikan sebelumnya dan tertanam dalam kerangka kerja internasional untuk hak-hak masyarakat pribumi yang diwakili oleh **UNDRIP**. Mereka kemungkinan akan memperluas cakrawala Komisi Kebenaran tradisional pasca-konflik, termasuk jenis kebenaran apa yang diperiksa dan cara-cara menceritakan dan memeriksa kebenaran sejarah.

Selama

Menafsirkan mandat

Sebagian besar mekanisme pengungkapan kebenaran memerlukan interpretasi mandat resmi untuk memutuskan di mana harus memfokuskan waktu dan sumber daya yang terbatas. Pelajaran dari hampir semua Komisi Kebenaran adalah bahwa ruang lingkup pencarian kebenaran jauh lebih besar daripada yang dapat dicapai dalam upaya yang terikat waktu dan sumber daya. Prioritas diperlukan. Keputusan kritis awal ini harus diinformasikan melalui konsultasi dengan masyarakat pribumi.

Mekanisme konsultasi yang sedang berlangsung

Jika sebuah Komisi Kebenaran telah dibentuk dan diberi mandat tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat yang terkena dampak, sebuah Komisi harus segera bertindak untuk berkonsultasi dengan masyarakat. Kurangnya konsultasi awal ini terjadi di sejumlah Komisi Kebenaran pasca-konflik yang dibentuk melalui kesepakatan damai. Ada beberapa yang bertindak untuk memperbaiki masalah ini setelah mereka terbentuk, seperti di Guatemala dan Kolombia.

Sebuah komisi dapat memutuskan untuk membentuk badan penasihat atau badan pengarah yang terdiri dari badan-badan dan individu-individu Pribumi yang representatif untuk memandu semua tahapan proses. Mekanisme ini dapat membantu memastikan konsultasi yang berarti tentang keputusan penting selama operasinya; membantu dalam rekomendasi akhir; dan membantu memastikan integritas komisi.

Metodologi

Komisi Kebenaran telah berkembang selama 40 tahun, masing-masing belajar dari pengalaman sebelumnya. Meskipun Komisi Kebenaran adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh undang-undang, mereka dapat fleksibel dan kreatif dalam cara kerjanya. Keterlibatan masyarakat pribumi yang lebih besar akan memperluas apa yang perlu dan mungkin dilakukan dalam sebuah Komisi Kebenaran.

Dalam merancang dan menjalankan Komisi Kebenaran, para pemangku kepentingan harus melihat metodologi yang paling cocok untuk peserta masyarakat pribumi, yang akan ditentukan melalui konsultasi. Beberapa pembelajaran antara lain:

- **Keamanan masyarakat pribumi menjadi pertimbangan pertama.** Sumber daya yang memadai harus memastikan keamanan fisik, psikologis dan budaya peserta. Proses yang bermakna tidak dapat berjalan tanpa melakukannya, dan bahaya nyata dapat terjadi.
- **Metode penelitian dan pemeriksaan multidisiplin** dapat digunakan bersamaan dengan metode legalistik dan pengambilan pernyataan individu. Ini termasuk metode pengungkapan kebenaran masyarakat pribumi tradisional; ekspresi artistik; dan berkolaborasi dengan sejarawan, antropolog, psikolog, dan spesialis data.
- **Cara kolektif bersaksi** dapat bekerja dengan baik untuk banyak komunitas terpencil. Mereka juga sangat relevan untuk memeriksa kebenaran mengenai pelanggaran hak kolektif, sangat relevan untuk masyarakat pribumi.
- **Meneliti sejarah panjang masyarakat pribumi dan kolonial menimbulkan tantangan yang berbeda** dari Komisi Kebenaran pasca-konflik yang berfokus pada periode yang lebih pendek dan lebih baru. Metodologi penelitian harus mempertimbangkan hal ini, menggunakan sejarah lisan yang diambil dari komunitas maupun individu dan bermitra dengan penduduk pribumi dan pakar lainnya dalam sejarah, antropologi, studi gender, forensik, dan disiplin ilmu lainnya.
- **Praktek budaya tradisional** dan metode berbagi informasi dan pengungkapan kebenaran dapat digunakan, termasuk melalui seni ekspresif dan pertunjukan, terkadang menghubungkan seni tradisional dan kontemporer. Pendekatan ini dapat bersifat seremonial dan simbolis dengan cara yang penting, dan dapat menjadi elemen kunci dari pengungkapan dan validasi kebenaran substantif. Karya ini juga dapat menciptakan seni memorial yang dapat hidup di luar komisi.
- **Membawa proses pengungkapan kebenaran kepada komunitas lokal** penting bagi komunitas masyarakat pribumi, terutama mereka yang berada di komunitas terpencil.
- **Program harus dirancang dengan perempuan masyarakat pribumi** untuk memastikan kepemimpinan dan partisipasi mereka yang efektif.

- **Metode khusus untuk pengungkapan kebenaran oleh kelompok** terpinggirkan harus dipertimbangkan, misalnya masyarakat adat LBGTQI dan penyandang disabilitas.
- **Sebuah komisi harus memiliki kapasitas bahasa yang sesuai** untuk terlibat dengan komunitas masyarakat pribumi yang beragam.
- **Dukungan psikososial diperlukan** di semua tahap keterlibatan dengan komunitas masyarakat pribumi — penjangkauan, persiapan, kesaksian, dan setelahnya. Di mana sumber daya psikososial terbatas, kemitraan dengan komunitas dan lembaga spesialis atau layanan Pemerintah diperlukan
- **Sebuah komisi harus memutuskan lebih awal seberapa banyak keterlibatan dengan masyarakat luas yang diinginkannya.** Komisi Kebenaran semakin berupaya untuk melibatkan masyarakat melalui proses pencarian kebenaran itu sendiri sebagai bagian dari pendidikan publik, menggunakan audiensi publik, liputan media, dan keterlibatan media sosial. Sumber daya diperlukan untuk menjadikan pekerjaan ini sebagai prioritas, dimulai dengan tim spesialis komunikasi di dalam komisi.
- **Aspek antargenerasi dalam menyampaikan kebenaran dan mendengarkan dapat menjadi manfaat yang kuat** dari proses tersebut. Sebagai sarana untuk bekerja menuju perubahan sosial, program dapat mempromosikan keterlibatan pemuda dalam seluruh proses.

Staf/Personalia

- Jumlah dan keragaman staf Pribumi yang memadai sangat penting untuk berhasil terlibat dengan komunitas Pribumi.
- Komisariss dan staf mendapat manfaat dari pelatihan untuk terlibat secara terhormat dan efektif dengan masyarakat pribumi yang beragam.

Kemitraan

- Kemitraan sangat penting untuk berfungsinya Komisi Kebenaran dan untuk membangun jaringan dukungan. Mereka dapat berkontribusi pada penjangkauan dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas, serta advokasi politik, selama dan setelah komisi.
- Kemitraan dengan organisasi masyarakat pribumi sangat penting untuk keberhasilan, termasuk seputar advokasi untuk tindak lanjut

yang efektif:

- * Organisasi masyarakat pribumi setempat dapat bertindak sebagai jembatan antara Komisi Kebenaran dan komunitas lokal.
- * Pakar pribumi dan organisasi spesialis dapat membawa keahlian ke komisi, termasuk pengetahuan tentang budaya, gender dan dukungan psikososial.
- * Organisasi masyarakat pribumi dapat melakukan tugas-tugas khusus untuk sebuah komisi, mengarahkan pengambil pernyataan, peneliti atau pekerja lokal.
- * Kemitraan dengan komisi kebenaran juga dapat membantu membangun kapasitas organisasi masyarakat sipil adat setempat.
- * Kemitraan media dengan masyarakat pribumi dan media lainnya dapat memperkuat penjangkauan dan keterlibatan dalam bahasa lokal.
- Kemitraan dengan industri kreatif — pribumi dan lainnya — dapat meningkatkan akses dan dukungan untuk pekerjaan komisi, terutama dengan kaum muda..

Membuat temuan dan rekomendasi:

- Konsultasi dengan perwakilan penduduk pribumi penting dalam membentuk rekomendasi yang membahas pengalaman dan prioritas mereka.
- Sementara sebagian besar Komisi Kebenaran pasca-konflik belum mengambil pendekatan mendalam terhadap hak-hak penduduk pribumi, beberapa telah menghasilkan temuan dan visibilitas penting tentang hak-hak mereka: temuan genosida di Guatemala dan di Peru; temuan tentang tanah dan wilayah masyarakat adat di Filipina; dan fokus pada beberapa komunitas dan hak penduduk pribumi di Kenya.
- Dalam menyiapkan laporan akhirnya, komisi juga harus membuat versi dan produk yang dapat diakses, dalam bahasa yang sesuai. Ini mungkin termasuk video, produk audio, versi laporan anak dan remaja, serta versi ringkasan. Bahasa adalah masalah penting, yang membutuhkan waktu dan sumber daya.
- Sebuah komisi harus mempertimbangkan perlunya lembaga tindak lanjut dan mekanisme pemantauan untuk rekomendasi, dengan berkonsultasi dengan masyarakat pribumi.

Setelah

- Pelajaran utama dari hampir semua Komisi Kebenaran dan proses pengungkapan kebenaran adalah bahwa penerapan rekomendasi sangat menantang. Advokasi berkelanjutan diperlukan selama bertahun-tahun. Penting untuk mengakui dan mempersiapkan kenyataan ini selama umur komisi.
- Kemitraan dan aliansi yang dibentuk sebelum dan selama komisi sangat penting untuk advokasi berkelanjutan guna implementasi rekomendasi. Dukungan berbasis luas penting untuk mengatasi oposisi politik terhadap rekomendasi.
- Badan penasihat pribumi dapat menjadi suara kritis untuk menerapkan rekomendasi, membantu mempertahankan konsultasi dan advokasi.
- Mekanisme untuk memantau pelaksanaan rekomendasi adalah penting. Banyak proses pengungkapan kebenaran yang tidak memiliki mekanisme pemantauan resmi untuk meminta pertanggungjawaban pengambil keputusan dan pihak lain atas pelaksanaan rekomendasi.
- Rekomendasi biasanya menargetkan berbagai pelaku dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat sipil, komunitas agama, media, sektor bisnis, sekolah dan organisasi pemuda. Sementara beberapa rekomendasi sangat menantang, yang lain dapat dikembangkan lebih cepat untuk membangun momentum, mempertahankan dukungan publik, dan menjaga tekanan untuk implementasi yang lebih luas.
- Penting untuk memberikan umpan balik kepada individu dan komunitas yang berpartisipasi dalam proses pengungkapan kebenaran saat komisi menyelesaikan laporan dan rekomendasinya. Upaya ini dapat mencakup memastikan mereka menerima laporan akhir serta produk lain yang lebih mudah diakses, seperti program radio dan film.
- Banyak Komisi Kebenaran merekomendasikan lembaga tindak lanjut untuk menampung arsip; melakukan pendidikan publik atas temuan; mendukung advokasi atas rekomendasi; dan mendorong pengungkapan kebenaran yang berkelanjutan. Lembaga tindak lanjut harus memelihara hubungan yang kuat dengan masyarakat pribumi dan komunitas yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran yang asli.



Daftar Referensi berdasarkan Bab

Amerika Latin

- Menjamin hak-hak masyarakat pribumi di Amerika Latin: kemajuan pada dekade yang lampau dan tantangan yang masih ada. United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 2014.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37051/4/S1420782_en.pdf

Guatemala

- International Work Group on Indigenous Peoples, Guatemala
<https://www.iwgia.org/en/guatemala.html>
- Studi tentang hak-hak masyarakat pribumi dan Komisi Kebenaran serta mekanisme pencarian kebenaran di benua Amerika, United Nations Economic and Social Council E/C.19/2013/13, 14 February 2013
https://digitallibrary.un.org/record/747558?ln=zh_CN
- Komisi Kebenaran dan Hak-hak masyarakat pribumi : Apa yang dipengaruhi? Hak-hak masyarakat pribumi dan Pencarian Kebenaran pada masa awal wilayah kolonisasi. International Center for Transitional Justice, report on Strengthening Indigenous Rights through Truth Commissions, New York 2011.
<https://www.ictj.org/truth-commissions-and-Indigenous-rights-what-stake>

Chili

- “Chile: Truth, Reparation and Justice: The Past Living in the Present” by Elizabeth Lira, published in Contribution of Truth, Justice, and Reparation Policies to Latin American Democracies (pp 79-118). Inter-American Institute of Human Rights.
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/28004.pdf>
- Chile, International Work Group on Indigenous Peoples.
<https://www.iwgia.org/en/chile.html>
- Indigenous people find voice in Chile’s constitution rewrite. Christian Science Monitor 17 May 2021
<https://www.csmonitor.com/World/Americas/2021/0517/Indigenous-people-find-voice-in-Chile-s-constitution-rewrite>
- Studi tentang hak-hak masyarakat pribumi dan komisi kebenaran serta mekanisme pencarian kebenaran lainnya di benua Amerika. United Nations

Economic and Social Council E/C.19/2013/13, 14 February 2013
https://digitallibrary.un.org/record/747558?ln=zh_CN

Peru

- International Work Group on Indigenous Peoples, Peru
<https://www.iwgia.org/en/peru.html>
- Truth and Reconciliation Commission, official website
<https://www.cverdad.org.pe/ingles/pagina01.php>
- “Truth, Justice and Reparations, The Case of Peru: Schedule and Difficulties of a Transitional Agenda”, by Rolando Ames and Félix Reátegui. Published in Contribution of Truth, Justice, and Reparation Policies to Latin American Democracies (pp231-56). Inter-American Institute of Human Rights.
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/28004.pdf>
- Is reconciliation possible in a country that seeks homogeneity among its citizens? Ricardo Cuenca 15 March 2009. Published in Series: Transitional Justice and Reconciliation in Peru. University of Oxford, Faculty of Law.
<https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/cuenca1.pdf>
- Truth commissions and Indigenous rights: what is at stake?: Indigenous Rights & Truth-Seeking in Early Colonization Regions. International Center for Transitional Justice, report on Strengthening Indigenous Rights through Truth Commissions, New York 2011.
<https://www.ictj.org/truth-commissions-and-Indigenous-rights-what-stake>
- “Making the Case for Genocide, the Forced Sterilization of Indigenous Peoples of Peru,” Genocide Studies and Prevention: An International Journal: Vol. 14: Iss. 2: 90-103. Carranza Ko, Nusta P. (2020)
<https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1740&context=gsp>
- Study on the rights of Indigenous peoples and truth commissions and other truth-seeking mechanisms on the American continent, United Nations Economic and Social Council E/C.19/2013/13, 14 February 2013
https://digitallibrary.un.org/record/747558?ln=zh_CN

Paraguay

- Study on the rights of Indigenous peoples and truth commissions and other truth-seeking mechanisms on the American continent, United Nations Economic and Social Council E/C.19/2013/13, 14 February 2013
https://digitallibrary.un.org/record/747558?ln=zh_CN

Kolumbia

- The Indigenous World 2020: Colombia. International Work Group on Indigenous (IWGIA) Peoples, 11 May 2020.
<https://www.iwgia.org/en/colombia/3618-iw-2020-colombia.html>
- The end of the illusion for Indigenous Peoples in Colombia. IWGIA November 2020.

- <https://www.iwgia.org/en/colombia/3909-the-end-of-the-illusion-for-Indigenous-peoples-in-colombia.html>
- The Right to Free, Prior, and Informed Consultation in Colombia: Advances and Setbacks By: César Rodríguez Garavito and Carlos Andrés Baquero Díaz. <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/FPIC/GaravitoAndDiaz.pdf>
 - Colombia's Indigenous Peoples and the Peace Accords. Cultural Survival Quarterly Magazine, Jean Jackson December 2016. <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/colombias-Indigenous-peoples-and-peace-accords>
 - Beyond Victims: Acknowledging the Indigenous Truth. Truth Commission Snapshot 17. Rodeemos el Dialogo (Embrace Dialogue). <https://uk.rodeemosel dialogo.org/2020/11/beyond-victims-acknowledging-the-Indigenous-truth/>
 - Peace and Justice: The Colombian Experience with Transitional Justice. Brookings Institute 2019. Ted Piccione. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/06/FP_20190708_colombia.pdf
 - A Review of How Colombia's Truth Commission is Advancing. Colombia Peace. Washington Office on Latin America. 2020 <https://colombiapeace.org/advancing-truth-commission/>
 - Interview with Patricia Tobon Yagari, (Indigenous) Commissioner in Colombia's Truth and Reconciliation Commission. Interviewed by Andrés Bermúdez Liévano JusticeInfo.net. April 2021 <https://www.justiceinfo.net/en/75613-patricia-tobon-yagari-legacy-colombias-trc-active-participation-ethnic-peoples.html>
 - How Colombia's Truth Commission Navigated a Pandemic Year. JusticeInfo.net, 7 January 2021, Andres Bermudez Lievano. <https://www.justiceinfo.net/en/46412-how-colombia-truth-commission-navigated-pandemic-year.html>

Amerika Utara

Kanada

Latar Belakang

- First Nations in Canada. Government of Canada website <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1307460755710/1536862806124>
- Government of Canada, Indigenous peoples and communities <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100013785/1529102490303>
- A History of Treaty Making in Canada, Government of Canada website <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1314977704533/1544620451420>
- Agreements Treaties and Negotiated Settlements, Canada page <https://www.atns.net.au/treaty-canada>

- Dismantling the Doctrine of Discovery. Assembly of First Nations, Canada. January 2018.
<https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2018/02/18-01-22-Dismantling-the-Doctrine-of-Discovery-EN.pdf>

Komisi Kerajaan untuk Masyarakat Aborigin (1991-1996)

- Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples, 5 vols, Government of Canada, Ottawa, 1996. Also available at
<https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/aboriginal-heritage/royal-commission-aboriginal-peoples/Pages/final-report.aspx>.
- Highlights from the Royal Commission on Aboriginal Peoples: People to People, Nation to Nation. Official one volume summary.
<https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100014597/1572547985018>
- The Royal Commission on Aboriginal Peoples. The Age of Inquiry: A global mapping of institutional abuse inquiries. LaTrobe University
<https://www.lib.latrobe.edu.au/research/ageofinquiry/biogs/E000242b.htm>
- Royal Commission on Aboriginal Peoples. The Canadian Encyclopedia.
<https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/royal-commission-on-aboriginal-peoples>

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada (2008–2015)

- Official website of the Truth and Reconciliation Commission
<http://www.trc.ca/>
- National Centre for Truth and Reconciliation, Canada official website:
<https://nctr.ca/>
- Indian Residential School Truth and Reconciliation Commission of Canada, Cultural Survival Quarterly Magazine 35-1. Joana Rice, March 2011
<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/indian-residential-school-truth-and-reconciliation>
- Statement of Prime Minister Trudeau, 15 December 2020
<https://pm.gc.ca/en/news/statements/2020/12/15/statement-prime-minister-fifth-anniversary-final-report-truth-and>
- Statement by former Commissioners of the TRC, 15 December 2020
<https://news.nctr.ca/articles/trc-commissioners-statement>
- Assembly of First Nations, TRC Report Card 2020
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2020/12/2020_TRC-Report-Card_ENG.pdf
- Canadian Broadcasting Corporation, Beyond 94
<https://newsinteractives.cbc.ca/longform-single/beyond-94?&cta=1>

Penyelidikan Nasional terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Pribumi yang Hilang dan Dibunuh (2016–2019)

- National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls

<https://www.mmiwg-ffada.ca/>

- Sisters in Spirit Project
<http://www5.austlii.edu.au/au/journals/IndigLawB/2017/27.pdf>
- Lost and Broken. Macleans, by Nancy Macdonald and Meagan Campbell. 13 September 2017. <https://www.macleans.ca/lost-and-broken/>
- National Action Plan 2021. <https://mmiwg2splus-nationalactionplan.ca/>

Amerika Serikat

Latar-belakang

- The Indians' War of Independence. Colin G. Calloway. Essay. Institute of American History.
<https://ap.gilderlehrman.org/essay/indians%27-war-independence>
- National Congress of American Indians. <https://www.ncai.org/about-tribes/>
- US National Archive, on treaties
<https://www.archives.gov/research/native-americans/treaties>
- Board of Indian Affairs. US Federal Government. Frequently Asked Questions
<https://www.bia.gov/frequently-asked-questions>
- U.S. Treaty Making with American Indians: Institutional Change and Relative Power, 1784–1911. Arthur Spirling, Harvard University. American Journal of Political Science. Vol 56 No 1 (January 2012), pp84–97.
<https://www.jstor.org/stable/23075145>
- A Short History of Indian Law in the Supreme Court. Matthew L.M. Fletcher American Bar Association. 2014
https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/2014_vol_40/vol--40--no--1--tribal-sovereignty/short_history_of_indian_law/
- Federal Indian Law for Alaska Tribes. University of Alaska Fairbanks.
https://www.uaf.edu/tribal/112/unit_1/marshalltrilogy.php
- Self-determination and Activism Among American Indians in the United States 1972-1997. Cultural Survival Quarterly Magazine. June 1997.
<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/self-determination-and-activism-among-american-indians>
- Invisible Tribes: Urban Indians and their Health in a Changing World. Urban Indian Health Commission 2015.
<https://www2.census.gov/cac/nac/meetings/2015-10-13/invisible-tribes.pdf>
- Majority of Native Americans Live in Rural Areas and Small Towns, Not in Urban Areas as Commonly Reported, According to New “Twice Invisible” Report. Global Newswire. 20 April 2017.
<https://www.globenewswire.com/news-release/2017/04/20/962599/0/en/Majority-of-Native-Americans-Live-in-Rural-Areas-and-Small-Towns-Not-in-Urban-Areas-as-Commonly-Reported-According-to-New-Twice-Invisible-Report.html>
- “It’s Called a Genocide” The Strength of Language in US Government

Apologies to Native Americans. Cultural Survival. 2 July 2019.
<https://www.culturalsurvival.org/news/its-called-genocide-strength-language-us-government-apologies-native-americans>

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kesejahteraan Anak Negara Bagian Maine Wabanaki (2013–2015)

- Beyond the Mandate Continuing the Conversation: Report of the Maine Wabanaki-State Child Welfare Truth & Reconciliation Commission. Present Hermon, Maine June 2015.
https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/mainewabanakireach/pages/17/attachments/original/1468974047/TRC-Report-Expanded_July2015.pdf?1468974047
- Truth, Healing and Systems Change: The Maine Wabanaki-State Truth and Reconciliation Commission Process
https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/mainewabanakireach/pages/17/attachments/original/1468975303/Truth_Healing_and_Systems_Change_CWLA_Special_Issue_2013_.pdf?1468975303
- The Maine Wabanaki Truth and Reconciliation Commission: Perceptions and Understandings. Bennet Collins, Siobhan McEvoy-Levy, Alison Watson. Chapter published in Indigenous People's Access to Justice, Including Truth and Reconciliation Processes 2014.
https://d3n8a8pro7vhm.cloudfront.net/mainewabanakireach/pages/17/attachments/original/1468975300/Chapter_by_Collins_McEvoy_Watson.pdf?1468975300
- Wabanaki REACH web page on the Truth and Reconciliation Commission
https://www.mainewabanakireach.org/maine_wabanaki_state_child_welfare_truth_and_reconciliation_commission
- https://www.uvm.edu/sites/default/files/Department-of-Political-Science/vlrs/Other/Truth_and_Reconciliation_Commissions_2-26-2021.pdf

Dewan Kebenaran & Penyembuhan California (2019–sekarang)

- <https://tribalaffairs.ca.gov/cthc/>
- Data commons.
https://datacommons.org/place/geoid/06?utm_medium=explore&m-prop=count&popt=Person&cpv=race%2CAmericanIndianAndAlaskaNativeAlone&hl=en
- “It’s Called Genocide”: Gavin Newsom apologizes to California’s Native Americans. San Francisco Chronicle, 18 June 2019.
<https://www.sfchronicle.com/politics/amp/lt-s-called-a-genocide-Gavin-Newsom-14016400.php>

Gerakan nasional Kellogg Foundation untuk Kebenaran, Penyembuhan Rasial, dan Transformasi

- Kellogg Foundation
<https://www.wkkf.org/resource-directory/resources/2020/08/truth--racial-healing---transformation--resources---lessons-from-three-years-of-community-collaborat>

Komisi Kebenaran, Penyembuhan Rasial dan Transformasi Nasional

- Full text of the resolution
https://lee.house.gov/imo/media/doc/LEE_103_xml%20TRHT%20117th%20v2.pdf
- Congressional Press Release on reintroduction of the Bill in 2021
<HTTPS://LEE.HOUSE.GOV/NEWS/PRESS-RELEASES/REPRESENTATIVE-BARBARA-LEE-AND-SENATOR-CORY-BOOKER-REINTRODUCE-LEGISLATION-TO-FORM-TRUTH-RACIAL-HEALING-AND-TRANSFORMATION-COMMISSION>
- “No Healing Without the Truth:” How a Federal Commission Could Help America Understand Systemic Racism. Vox, 4 March 2021.
<https://www.vox.com/22308043/truth-healing-commission-systemic-racism-barbara-lee>

Hawai’i

- Hawai’i State Concurrent Resolution 37, Requesting the Governor to establish a Blue Ribbon commission to examine and formulate a reconciliation process relating to issues of the past, present and future importance to the Native Hawai’i people, the State of Hawaii, and the United States of America. February 2020.
https://www.capitol.hawaii.gov/session2020/bills/SCR37_.HTM
- Hawaii Lawmakers Want State To Reconcile With Native Hawai’ians. By Blaze Lovell, Honolulu Civil Beat. 4 February 2020.
<https://www.civilbeat.org/2020/02/hawaii-lawmakers-want-state-to-reconcile-with-native-hawaiians/>
- US Senate Report 112-251, 112th Congress, 17 December, 2012: To express the policy of the United States regarding the United States relationship with Native Hawai’ins and to provide parity and a process for the recognition by the United States of the Native Hawai’ian governing entity.
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-112srpt251/html/CRPT-112srpt251.htm>
- Ka Lahui Hawaii, a native initiative for self-determination
<https://kalahuihawaii.com/>
- Hawai’ian Sovereignty, Cultural Survival Quarterly Magazine, March 2000.
<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/hawaiian-sovereignty>
- Native Hawai’ians Divided on Federal Recognition. Voice of America News. 7 February 2019.
<https://www.voanews.com/usa/native-hawaiians-divided-federal-recognition>

Afrika

Maroko

- Truth and Reconciliation in Morocco, International Center for Transitional Justice
<https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Morocco-TRC-2009-English.pdf>
- Morocco/Western Sahara - Broken Promises: The Equity and Reconciliation Commission and its Follow Up. Amnesty International. 6 January 2010.
<https://www.amnesty.org/fr/documents/MDE29/001/2010/en/>

Kenya

- Transitional Justice in Africa: The Experience with Truth Commissions. Charles Manga Fombad, Professor of Law in the Institute of International and Comparative Law, University of Pretoria
https://www.nyulawglobal.org/globalex/Africa_Truth_Commissions1.html
- Volume IIC of the Report of the Truth Justice and Reconciliation Commission includes Chapter Three: Minority Groups, Indigenous People and Gross Violations of Human Rights, full text <http://citizenshiprightsafrika.org/wp-content/uploads/2013/03/TJRC-Final-Report-Volume-IIC.compressed.pdf>
- The Indigenous World 2021. IWGIA.
<https://www.iwgia.org/en/kenya/4228-iw-2021-kenya.html>
- Lessons to be Learned: An Analysis of the Final Report of Kenya's Truth, Justice and Reconciliation Commission. International Center for Transitional Justice, 2014.
<https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Kenya-TJRC-2014.pdf>
- International Work Group for Indigenous Affairs. Kenya update 2011.
<https://www.iwgia.org/en/kenya/875-update-2011-kenya>

Asia-Pasifik

Latar-belakang Sumber-sumber Referens tentang Asia-Pasifik

- The Concept of Indigenous Peoples in Asia: A Resource Book. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) and Asia Indigenous Peoples Pact Foundation (AIPP). 2008.
https://www.iwgia.org/images/publications/Concept_of_Indigenous_Peoples_in_Asia_-_Digital.pdf
- The Rights of Indigenous Peoples in Asia: Human rights-based overview of national legal and policy frameworks against the backdrop of country strategies for development and poverty reduction. International Labour Organisation, Stefania Errico, 2017.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_545484.pdf
- Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, on rights of Indigenous peoples.

- <https://www.asiapacificforum.net/human-rights/Indigenous-peoples/>
- Indigenous Peoples and National Human Rights Institutions in Asia: Good Practices and Challenges, Asian Indigenous Peoples Pact 2014
https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/02/16.-High-NHRIs-for-IPs_edited-low.pdf
- Overview of Indigenous Peoples in Asia. Asia Indigenous Peoples Pact. May 2014.
<http://www.gapeinternational.org/wp-content/uploads/2011/08/asia-ip-overview-final.pdf>
- Asian Indigenous People's Pact. <https://aippnet.org/>
- Asia Justice and Rights. <https://asia-ajar.org/>

Timor-Leste

- CAVR Final Report, Chapter 9 Community Reconciliation
<http://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/09-Community-Reconciliation.pdf>
- Early modern human lithic technology from Jerimalai, East Timor. Marwick, B., Clarkson, C., O'Connor, S. & Collins, S. (2016). Early modern human lithic technology from Jerimalai, East Timor. *Journal of Human Evolution*, 101 45-64.
<https://ro.uow.edu.au/smhpapers/4268/>
- Visit to Timor-Leste Report of the UN Special Rapporteur on the rights of Indigenous peoples. United Nations Human Rights Council. Forty-second session 9–27 September 2019. A/HRC/42/37/Add.2.
<https://undocs.org/A/HRC/42/37/Add.2>

Kepualuan Salomon

- Observations on the State of Indigenous Human Rights in the Solomon Islands Prepared for United Nations Human Rights Council: Universal Periodic Review October 2020. Cultural Survival.
<https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/Solomon-Islands-UPR-2020-Final.pdf>
- Translating transitional justice: the Solomon Islands Truth and Reconciliation Commission. Louise Vella. Analysis and Policy Observatory. 2 July 2014.
<https://apo.org.au/node/40302>
- History of the Solomon Islands. Britannica.
<https://www.britannica.com/place/Solomon-Islands/History>

Malaysia

- Full text of Report of the National Inquiry into the Land Rights of Indigenous Peoples National Human Rights Commission of Malaysia (SHUKAM). April 2013.
<https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/07/suhakam-enquiry-full-text2013.pdf>
- SUHAKAM's input for the study of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples - promotion and protection of the rights of Indigenous peoples with respect to their cultural heritage.

- <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/CulturalHeritage/SuhakamHRCMalaysia.pdf>
- SHUKAM's response to UN Permanent Forum on Indigenous Issues: Questionnaire to National Human Rights Institutions 2018.
<https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/02/Malaysia.pdf>
 - International Work Group on Indigenous Affairs, Malaysia
<https://www.iwgia.org/en/malaysia.html>
 - Observations on the State of Indigenous Human Rights in Malaysia Prepared for the 31st Session of the United Nations Human Rights Council Universal Periodic Review 5 November 2018 - 16 November 2018. Cultural Survival.
<https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/Malaysia%202018%20UPR%20Report.pdf>
 - The Orang Asli of Malaysia. Alberto Gomes. IIAS Newsletter #35. November 2004. International Institute of Asian Studies.
https://www.iias.asia/sites/default/files/2020-11/IIAS_NL35_10.pdf

Indonesia

- National Inquiry on the Right of Indigenous Peoples on their Territories in the Forest Zones: Summary of Findings and Recommendations. National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM). March 2016.
<https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2016/04/komnas-ham-nationalinquiry-summary-apr2016.pdf>
- Website of the Indigenous Peoples' Alliance of the Archipelago (AMAN). In Indonesia. <https://www.aman.or.id/>
- Submission to the United Nations Universal Periodic Review of Human Rights. Indigenous Peoples' Alliance of the Archipelago (AMAN). May 2017.
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/indonesia/session_27_-_may_2017/aman_upr27_idn_e_main.pdf
- As a Woman: Leading Indonesia's Indigenous People's Alliance (interview with Rukka Sombolinggi Toraja). Cultural Survival Quarterly Magazine. June 2019.
<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/woman-leading-indonesias-Indigenous-peoples-alliance>
- The Indigenous World 2021: Indonesia. International Work Group for Indigenous Affairs. March 2021.
<https://www.iwgia.org/en/indonesia/4224-iw-2021-indonesia.html>

Papua

- Enough is Enough. Report of the Documentation Working Group on Violence and Human Rights Violations Against Papuan Women, 2009-2010.
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-IDN-Enough-Women_Papua-Report-2010.pdf
- Masa Lalu Yang Tidak Pernah Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

Sebelum dan Setelah Reformasi. International Center for Transitional Justice. June 2012.

<https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-ELSHAM-Indonesia-Papua-2012-English.pdf>

- All the Birds are Gone: Indigenous Women Speak Out Against Forest Loss in Papua. Papuan Women. March 2021. Report published by Asia Justice and Rights (AJAR) working together with the Women's Advocacy Institute (eL AdPPer), The Justice, Peace, and Integrity of Creation Section of the Evangelical Christian Church of Papua (KPKC GKITP), The Institute for Human Rights Studies and Advocacy Papua (Elsham Papua) and the Kaki Abu Legal Aid Institute (LBH Kaki Abu).
- I Am Here: Voices of Papuan Women in the Face of Unrelenting Violence. 2019. Report published by Asia Justice and Rights (AJAR) in cooperation with el-Adpper [Advocacy Institute for Women's Care], KPKC Gereja Kristen Injili di Tanah Papua [Commission on Justice, Peace, and the Integrity of Creation of the Evangelical Christian Church in Papua], Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua/ELSHAM Papua [Institute for the Study and Advocacy of Human Rights in Papua], and Yayasan Humi Inane Wamena [Foundation for Women's Voices of Wamena].
<https://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2019/04/I-am-Here-Voices-of-Papuan-Women-2019.pdf>
- The Reckoning, Fien Jarangga and Galuh Wandita. Cultural Survival Quarterly Magazine 35-1, March 2011.
<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/reckoning>
- Comprehending West Papua. The West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney. Edited by Peter King, Jim Elmslie and Camellia Web-Gannon. November 2011.
http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/04/2011_Large-corporations-and-obstacl.pdf
- Indigenous World 2019: West Papua
<https://www.iwgia.org/en/indonesia/3441-iw2019-west-papua.html>
- West Papua: the issue that won't go away for Melanesia, Lowy Institute, Johnny Blades, 1 May 2020
<https://www.lowyinstitute.org/publications/west-papua-issues-wont-go-away-melanesia>

Bougainville

- Bougainville Peace Agreement. <https://www.abg.gov.pg/peace-agreement>
- Bougainville: Beyond Survival. Cultural Survival Quarterly Magazine. September 2002
<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/bougainville-beyond-survival>

- Timing Truth Reconciliation and Justice After War. John Braithwaite and Ray Nickson. A revised version of John Braithwaite's Schwartz Lecture on Dispute Resolution, delivered at the Ohio State University Moritz College of Law on April 5, 2011.
http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/03/Timing_truth.pdf
- Sustaining Peace in Papua New Guinea: Prevention in Practice, International Peace Institute, Lesley Connolly and Laurie Mincieli, September 2019
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/09/1909_Sustaining-Peace-in-PNG.pdf
- Facing ghosts of the past in Bougainville, Catherine Wilson, Lowy Institute 11 October 2018
<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/facing-ghosts-past-bougainville>

Mindanao, Filipina

- Transitional Justice and Reconciliation Commission Official website and final report. <https://www.tjrc.ph/>
- Grounding reconciliation: transforming relationships in Mindanao, Rufa Cagoco-Guiam. 26 April 2020.
<https://rc-services-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Mindanao.pdf>
- The Final Report of the Philippine Transitional Justice and Reconciliation Commission: Amplifying the Voices of Women. Priya Pillai. 30 March 2016. Georgetown Institute for Women, Peace and Security.
<https://giwps.georgetown.edu/the-report-of-the-philippine-transitional-justice-reconciliation-commission-amplifying-the-voices-of-women/>
- Philippines Indigenous Peoples. Minority Rights Group.
<https://minorityrights.org/minorities/Indigenous-peoples-6/>
- International Crisis Group Philippines page:
<https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/philippines>
- Keeping Normalisation on Track in Bangsamoro, ICG Report 15 April
<https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/philippines/313-southern-philippines-keeping-normalisation-track-bangsamoro>
- Asian Justice and Rights (AJAR) Report on a 2018 Transitional Justice Conference, 11 April 2018, Quezon City Philippines
<http://asia-ajar.org/wp-content/uploads/2018/06/TJ-Conference-April-11-2018.pdf>

Nepal

- International Work Group on Indigenous Affairs. Indigenous World 2020: Nepal.
<https://www.iwgia.org/en/nepal/3607-iw-2020-nepal.html>
- Truth and Reconciliation Commission Nepal. Official website.
<https://trc.gov.np/>
- Conflict victims not to engage with commissions sans law amendment.

Himalayan Times. 15 July 2021.

<https://thehimalayantimes.com/nepal/conflict-victims-not-to-engage-with-commissions-sans-law-amendment>

- Nepal: New Government Should Address Rights: Letter to Prime Minister Deuba Sets Out Major Concerns. Human Rights Watch, July 2021
<https://www.hrw.org/news/2021/07/29/nepal-new-government-should-address-rights>
- Nepal: Recent steps undermine transitional justice. Amnesty International. January 2020
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/nepal-recent-steps-undermine-transitional-justice/>
- Nepal, country page. International Center for Transitional Justice
<https://www.ictj.org/our-work/regions-and-countries/nepal>
- Nepal's Truth and Reconciliation Commission limps on: a culture of impunity has proved stubborn and entrenched. Renee Jeffery, Lowy Institute. February 2019.
<https://www.loyyinstitute.org/the-interpreter/nepal-truth-and-reconciliation-commission-limps>

Taiwan

- Cultural Survival, Quarterly Magazine, June 2002
<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/first-nations-taiwan-special-report-taiwans-Indigenous>
- IWGA: Indigenous peoples of Taiwan
<https://www.iwgia.org/en/taiwan/3609-iw-2020-taiwan.html>
- Minority Rights: Taiwan
<https://minorityrights.org/minorities/Indigenous-peoples-7/>
- Indigenous Historical and Transitional Justice Committee
<https://Indigenous-justice.president.gov.tw/EN>
- Submission of Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) and its member organizations for the report of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples on Recognition, reparations and reconciliation
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/StudyRRR/AIPP_submission_EMRIP_RRR.pdf
- Taiwan's Indigenous peoples are still seeking justice on the democratic side of the Taiwan Strait. Nick Aspinwall, Supchina.com 13 February 2019.
<https://supchina.com/2019/02/13/taiwans-Indigenous-are-still-seeking-justice/>

Australia

Beberapa Artikel Kunci tentang Para Pemimpin Penduduk Pribumi.

- Marcia Langton, Understanding Sovereignty: 65,000 years of links to land. Essay written for Sydney Biennale 2020
<https://www.atns.net.au/understanding-sovereignty>

- Noel Pearson, A Rightful Place: Race, recognition and a more complete Commonwealth. Quarterly Essay 55.
<https://www.quarterlyessay.com.au/essay/2014/09/a-rightful-place/extract>
- Galarrwuy Yunupingu, Truth, Tradition and Tomorrow. Essay in The Monthly magazine. December 2008-January 2009.
<https://www.themonthly.com.au/issue/2008/december/1268179150/galarrwuy-yunupingu/tradition-truth-tomorrow#mtr>

Dari Ahli Sejarah Bukan Penduduk Pribumi

- Truth Telling: History, Sovereignty and the Uluru Statement. Henry Reynolds. NewSouth Publishing 2021.

Naskah-Naskah dari Parlemen Australia

- From Dispossession to Reconciliation. Parliament of Australia. Research Paper 27 1998-99. John Gardiner-Garden, Social Policy Group 29 June 1999.
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp9899/99Rp27.

Naskah-naskah dari Parlemen Australia

- Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (IAITSIS, Canberra Australia) <https://aiatsis.gov.au/>
- Indigenous Law Centre, University of NSW (Sydney Australia)
<https://www.ilc.unsw.edu.au/>
- The Healing Foundation <https://healingfoundation.org.au/>

Beberapa Proses Pengungkapan Kebenaran Yang Terkini di Australia

Tindak lanjut Pernyataan Uluru dari Hati

- Final Report of the Referendum Council, 30 June 2017.
https://www.referendumcouncil.org.au/sites/default/files/report_attachments/Referendum_Council_Final_Report.pdf
- Laporan Dewan Referendum tentang Dialog
<https://www.referendumcouncil.org.au/dialogues.html>
- Pernyataan Uluru dari Hati <https://ulurustatement.org/>
- Uluru Statement, A Quick Guide. Parliament of Australia. Law and Bills Digest Section, Daniel McKay. 19 June 2017
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/Quick_Guides/UluruStatement
- Uluru Statement, A special NSW Bar Association seminar: Professor Megan Davis, Associate Professor Rosalind Dixon, Associate Professor Gabrielle Appleby and Noel Pearson. 17 October 2017.
<http://classic.austlii.edu.au/au/journals/NSWBarAssocNews/2018/20.pdf>
- Truth Telling section of the Interim Report of The Joint Select Committee on Constitutional Recognition relating to Aboriginal and Torres Strait Islander

Peoples. 23 November 2018 (The Committee presented its interim report on 30 July 2018 and presented its final report on 29 November 2018).

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Former_Committees/Constitutional_Recognition_2018/ConstRecognition/Final_Report/section?id=committees%2Freportjnt%2F024213%2F26675

- Treaty and Truth Telling section of Interim Report of The Joint Select Committee on Constitutional Recognition relating to Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples.

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Former_Committees/Constitutional_Recognition_2018/ConstRecognition/Interim_Report/section?id=committees%2Freportjnt%2F024174%2F26325

- Interim Report of the Indigenous Voice Co-Design process. Senior Advisory Group. October 2020.

<https://voice.niaa.gov.au/sites/default/files/2021-01/Indigenous-voice-codesign-process-interim-report-2020.pdf>

Perjanjian tingkat negara bagian dan proses pengungkapan kebenaran

- Yoo-rrook Justice Commission website
<https://www.firstpeoplesvic.org/our-work/truth-telling/yoo-rrook-justice-commission>
- Northern Territory Treaty Commission <https://treatynt.com.au/>
- Towards Truth Telling, Paper by Northern Territory Treaty Commission. February 2021.
https://treatynt.com.au/_data/assets/pdf_file/0005/982544/towards-truth-telling.pdf
- Queensland:
 - » First Nations Treaty: Where are We at in Queensland? Paul Wright and Katrina Hall, ANTAR, 26 October 2020
<https://antar.org.au/news/first-nations-treaty-where-are-we-queensland>
- South Australia:
 - » South Australian Government Decides Not to Go Ahead with Aboriginal Treaties. ABC 8 June 2021
<https://www.abc.net.au/news/2018-06-08/sa-govt-decides-not-to-go-ahead-with-aboriginal-treaty/9851166>
- Western Australia
 - » Treaty in Western Australia. ANTAR (Australians for Native Title and Reconciliation) <https://antar.org.au/stories/treaty-western-australia>
 - » The Noongar Settlement: Australia's First Treaty Harry Hobbs and George Williams. Sydney Law Review 2018.
<https://static1.squarespace.com/static/56cac409d51cd4381775480d/t/5b10e012758d46284f9ac724/1527832598645/The+Noongar+Settlement+First+Australian+Treaty.pdf>
 - » The Biggest Step in Truth Telling about Australia's Colonisation History,

Paul Wright, ANTAR. 11 March 2021.

<https://antar.org.au/news/biggest-step-truth-telling-about-australia%E2%80%99s-colonisation-history>

- » Indigenous constitutional recognition and representation. Parliament of Australia, Social Policy, James Haughton and Apolline Kohen.
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook46p/IndigenousRecognition

Proses Pengungkapan Kebenaran di Masa Lalu di Australia: dua proses nasional resmi

Komisi Kerajaan/Negara untuk Kematian Aborigin dalam Penahanan (1987-1991)

- Final Report of the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody. National Archives of Australia.
<https://www.naa.gov.au/explore-collection/first-australians/royal-commission-aboriginal-deaths-custody>
- The National Archives' guide Aboriginal Deaths in Custody: The Royal Commission and its Records, 1987-1991 by Peter Nagle and Richard Summerrell, describes all the records of the Royal Commission.
<https://www.naa.gov.au/help-your-research/research-guides/aboriginal-deaths-custody-royal-commission-and-its-records>
- Patrick Dodson: 25 years on from the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody recommendations. Speech at the National Press Club, delivered 13 April 2016. <http://www5.austlii.edu.au/au/journals/IndigLawB/2016/12.pdf>
- Thirty years on I sense the same storm brewing around Aboriginal deaths in custody. Pat Dodson. The Guardian Australia, 17 April 2021.
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/17/thirty-years-on-i-sense-the-same-storm-brewing-around-aboriginal-deaths-in-custody>
- Elena Marchetti - Missing Subjects: Women and Gender in the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody. Griffith University, Queensland Australia. PhD thesis, 2005. https://researchrepository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/366882/Marchetti_2005_01Thesis.pdf?sequence=1
- Critical Reflections Upon Australia's Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody, Elena Marchetti. Macquarie Law Journal (2005) Vol 5
<http://classic.austlii.edu.au/au/journals/MqLawJl/2005/6.html>
- A reflection on the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody and its consideration of Aboriginal women's issues. Professor Megan Davis. Australian Indigenous Law Review Vol. 15, No. 1 (2011), pp. 25-33 (9 pages) Published By: Indigenous Law Centre, Law School, University of New South Wales
<http://classic.austlii.edu.au/au/journals/AUIndigLawRw/2011/4.pdf>
- Review of the implementation of the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody. National Indigenous Australians Agency. October 2018 (the Deloitte report)

- <https://www.niaa.gov.au/resource-centre/Indigenous-affairs/review-implementation-royal-commission-aboriginal-deaths-custody>
- Joint response to the Deloitte Review of the implementation of the recommendations of the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody. 2018 (The statement is endorsed by 33 academic and professional experts) <https://caepr.cass.anu.edu.au/research/publications/joint-response-deloitte-review-implementation-recommendations-royal-commission>
- Interview transcript: The Healing Foundation CEO Fiona Cornforth with Dan Bourchier, on the 30th anniversary of the report of the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody. ABC Radio Canberra 15 April 2021 <https://healingfoundation.org.au/2021/04/21/the-healing-foundation-ceo-fiona-cornforth-with-dan-bourchier-abc-radio-666-canberra-afternoons-thursday-15-april-2021/>
- Indigenous Prison Population Continues to Increase, While Non-Indigenous Incarceration Rate Falls. Guardian Australia, 22 January 2021. <https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jan/22/Indigenous-prison-population-continues-to-increase-while-non-Indigenous-incarceration-rate-falls>
- Australia's Anguish: Indigenous Kids Trapped Behind Bars. Guardian Australia. 18 January 2018. <https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jan/18/australias-anguish-the-Indigenous-kids-trapped-behind-bars>
- Australian Indigenous Law Review 2011 Vol 15 No 1. Articles and commentary 20 years on from the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody.

Penyelidikan Nasional tentang Pemisahan Anak-anak Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres dari Keluarga mereka (1995–1997), oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Nasional Australia.

- Report link: <https://humanrights.gov.au/our-work/bringing-them-home-report-1997>
- Bringing Them Home 20 Years On: An Action Plan for Healing.
- Aboriginal and Torres Strait Islander Healing Foundation. <https://healingfoundation.org.au/app/uploads/2017/05/Bringing-Them-Home-20-years-on-FINAL-SCREEN-1.pdf>
- Link Up (NSW) <https://www.linkupnsw.org.au/>
- Sorry: the unfinished business of the Bringing Them Home report. Coral Dow, Australian Parliament Social Policy Unit 4 February 2008. https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/bn/0708/bringingthemhomereport
- Media release – Removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children continues 12 years after the apology. SNAIIC. 13 February 2020. <https://www.snaicc.org.au/media-release-removal-of-aboriginal-and-torres-strait-islander-continues-12-years-after-the-apology/>

Inisiatif Masyarakat Sipil

Kontra Narasi dalam Gerakan Seni Kimberley Timur: Pengungkapan kebenaran asli melalui budaya dan seni tradisional dan kontemporer

- The East Kimberley painting movement: performing colonial history, Arnaud Morvan. Ritual Art and Performance in Aboriginal Australia, 24 January 2013. Musee du Quay Branley, France.
<https://journals.openedition.org/actesbranly/579>
- Contemporary Art from the East Kimberley: An Overview by Georges Petitjean. Published with the exhibition Beyond Sacred: Australian Aboriginal Art, The Laverty Collection, Sydney Australia March 2015.
<https://www.deutscherandhackett.com/38-essay/contemporary-art-east-kimberley-georges-petitjean>
- Landscapes in blood, Sydney Morning Herald, December 14, 2002 (on Blood on the Spinifex exhibition)
<https://www.smh.com.au/national/landscapes-in-blood-20021214-gdfysp.html>
- Killing fields of the Kimberley, The Age (Melbourne) (on the dance performance Fire Fire Burning Bright) October 17, 2002
<https://www.theage.com.au/entertainment/art-and-design/killing-fields-of-the-kimberley-20021017-gdup7i.html>
- Fire Fire Burning Bright: Oral History from Paddy Bedford and Timmy Timmes, Stage Adaptation Written and Directed by Andrish Sain. Cultural Survival Quarterly Magazine. June 2002.
<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/fire-fire-burning-bright-oral-history-paddy-bedford-and>
- Queenie McKenzie's 'Mistake Creek Massacre' displayed by National Museum after years of controversy (Talking Blak to History exhibition, Canberra Australia). ABC 22 July 2020.
<https://www.abc.net.au/news/2020-07-22/talking-blak-to-history-Indigenous-exhibition-a-national-museum/12472370>

Proyek Pembantaian Kolonial di Garis Depan 1788-1930, Universitas Newcastle

- Colonial Frontier Massacres in Australia 1788-1930. University of Newcastle
<https://c21ch.newcastle.edu.au/colonialmassacres/>
- Mapping the sites of frontier massacres. Presentation by. Professor Lyndall Ryan, University of Newcastle (audio and transcript). National Library of Australia. 13 February 2020.
<https://www.nla.gov.au/stories/audio/mapping-the-sites-of-frontier-massacres>
- The Killing Times. The Guardian Australia
<https://www.theguardian.com/australia-news/ng-interactive/2019/mar/04/massacre-map-australia-the-killing-times-frontier-wars>

Pembantaian Myall Creek: pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi lokal

- Friends of Myall Creek: Ngiyani winangay ganunga - We remember them
<https://myallcreek.org/>
- New South Wales Parliamentary Debate. 8 June 2000, Hansard.
<https://www.parliament.nsw.gov.au/Hansard/Pages/HansardResult.aspx#/docid/HANSARD-1323879322-22077>
- Myall Creek Massacre - a symbol of reconciliation as descendants of victims and perpetrators gather. ABC 10 June 2018
<https://www.abc.net.au/news/2018-06-10/myall-creek-massacre-memorial-a-symbol-of-reconciliation/9845158>
- State of Reconciliation 2021, Case Study p.34. Reconciliation Australia
https://www.reconciliation.org.au/wp-content/uploads/2021/01/State-of-Reconciliation-in-Australia-report_2021_full.pdf

Simposium dan Laporan Kebenaran 2018

- Truth Telling Symposium Report.
<https://www.reconciliation.org.au/wp-content/uploads/2019/02/truth-telling-symposium-report1.pdf>

Australia's Formal Reconciliation Process: 1991-2021

- Final Report of the Council for Aboriginal Reconciliation
<http://www5.austlii.edu.au/au/orgs/car/finalreport/prelimo4.htm>
- "Commonwealth Government response to the Council for Aboriginal Reconciliation Final Report Reconciliation: Australia's Challenge - Digest" [2002] Australian Indigenous LawReporter 66; (2002) 7(4) Australian Indigenous Law Reporter 54.
<http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUIndigLawRpr/2002/66.html>
- State of Reconciliation 2021: From Safe to Brave. Reconciliation Australia
https://www.reconciliation.org.au/wp-content/uploads/2021/01/State-of-Reconciliation-in-Australia-report_2021_full.pdf
- State of Reconciliation 2016: Our History, Our Story, Our Future. 2016. Summary. See especially Foreword by Pat Dodson, marking 25 years since the start of official national reconciliation process. Reconciliation Australia.
https://www.reconciliation.org.au/wp-content/uploads/2017/11/State-of-Reconciliation-Report_SUMMARY.pdf
- Why practical reconciliation is failing Indigenous people. Annual Social Justice and Native Title reports of the Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner Dr William Jonas. Australian Human Rights Commission. 29 March 2001.
<https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/why-practical-reconciliation-failing-Indigenous-people>
- Reconciliation Progress Report. ANTaR 2010.

https://antar.org.au/sites/default/files/reconciliation_progress_report_final_o.pdf

- Meanings and Perspectives of Reconciliation in the Australian Socio-political Context. Nina Burridge, University of Technology, Australia. International Journal of Diversity, Vol 6. 2007.
<https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/6516/1/2007001207.pdf>

Selandia Baru/Aotearoa

- IWGIA, Indigenous peoples in Aotearoa
<https://www.iwgia.org/en/aotearoa-new-zealand.html>
- The Treaty of Waitangi in Brief
<https://nzhistory.govt.nz/politics/treaty/the-treaty-in-brief>
- The Treaty of Waitangi, FAQs
<https://nzhistory.govt.nz/politics/treaty/treaty-faqs>
- The Waitangi Tribunal, official website
<https://waitangitribunal.govt.nz/about-waitangi-tribunal/>
- New Zealand Department of Justice
<https://www.justice.govt.nz/about/learn-about-the-justice-system/how-the-justice-system-works/the-basis-for-all-law/treaty-of-waitangi/>
- 'Waitangi Tribunal – Te Rōpū Whakamana - Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand, Mark Derby.
<http://www.TeAra.govt.nz/en/waitangi-tribunal-te-ropu-whakamana/page-3>
- Reparations and the Waitangi Tribunal. Paper to the “Moving Forward: achieving reparations for the Stolen Generations”. Conference. Sydney, Australia. By Chief Judge JV Williams, former Chairperson of the Waitangi Tribunal.
<https://humanrights.gov.au/our-work/aboriginal-and-torres-strait-islander-social-justice/reparations-and-waitangi-tribunal>
- 25th Anniversary of the Waitangi Tribunal. Speech. Margaret Wilson, then Speaker of the House of Representatives New Zealand. 10 October 2000.
<https://www.beehive.govt.nz/speech/25th-anniversary-waitangi-tribunal>
- 'To honour the treaty, we must first settle colonisation' (Moana Jackson 2015): the long road from colonial devastation to balance, peace and harmony
- Margaret Mutu (Ngāti Kahu, Te Rarawa and Ngāti Whātua nations). Journal of the Royal Society of New Zealand, Vol 49 2019.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03036758.2019.1669670>

Eropa

Greenland

- In Conversation: Shifting Narratives of Colonialism through Reconciliation in Greenland and Canada
<http://postkolonial.dk/files/KULT%2014/4%20Christensen%20and%20Heinrich%20final.pdf>

- Reconciliation in Greenland, Video presentation, Jens Heinrich (former member of the Commission)
<https://www.youtube.com/watch?v=OBCnBviom88&t=161255>
- Greenland Reconciliation Commission finds colonization did 'a lot of damage' CBC News. 4 February 2017.
<https://www.cbc.ca/news/canada/north/greenland-reconciliation-commission-report-1.4471695>
- Abuse and Colony Era Still Marks Greenlanders. Arne Finne. High North News. 15 December 2017.
<https://www.highnorthnews.com/en/abuse-and-colony-era-still-marks-greenlanders>

Norwegia, Finlandia, Swedia: Suku Sámi di Skandinavia Utara

- Indigenous Peoples in Sapmi. International Work Group for Indigenous Affairs. <https://www.iwgia.org/en/sapmi.html>

Norwegia

- https://uit.no/kommisjonen/mandat_en
- <https://www.lawtransform.no/transitional-justice-in-norway-and-beyond/>

Swedia

- Swedish Truth Commission on the Way, Oliver Truc. Justice Info.Net. 28 August 2020.
<https://www.justiceinfo.net/en/45184-swedish-truth-commissions-on-the-way.html>

Institusi nasional dan regional Masyarakat Sipil

- Indigenous Peoples Major Group for Sustainable Development
<https://www.Indigenouspeoples-sdg.org/index.php/english/>
- International Work Group for Indigenous Affairs
<https://www.iwgia.org/en/>
- Cultural Survival <https://www.culturalsurvival.org/>
- International Center for Transitional Justice <http://www.ictj.org>
- Asia Indigneous Peoples Pact (AIPP) <https://aippnet.org/>
- Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions
<https://www.asiapacificforum.net/>
- AJAR: Asia Justice and Rights <http://www.asia-ajar.org/>

